

LAPORAN KINERJA

INTERIM TRIWULAN I TAHUN 2025 BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH



KATA PENGANTAR



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt.
Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025.

Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas kami dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas sesuai dengan DIPA tahun 2025, yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM.

Selama periode kinerja Triwulan I Tahun 2025, kami telah menerapkan pola kinerja efektif dengan selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang disusun berdasarkan Rencana Strategis terkini. Perubahan pada peta strategis, penambahan indikator kinerja, serta penyesuaian terhadap isu strategis yang berkembang merupakan upaya adaptasi kami dalam menghadapi dinamika regulasi dan tantangan di lapangan.

Dengan penuh kebanggaan dan antusiasme, kami menyajikan Laporan Kinerja Triwulan I Balai Besar POM di Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran DIPA tahun 2025. Kami telah menyelesaikan berbagai program dan kegiatan untuk memberikan kinerja terbaik, yang tercermin dalam pencapaian **9 sasaran kegiatan dan 25 Indikator Kinerja**

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh telah berhasil memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 98,30 dengan **kategori Baik** dimana realisasi anggaran sebesar Rp 3.180.894.861 atau 15,65% persen dari alokasi DIPA Tahun 2025.

Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh untuk melaksanakan tugas penting dalam memastikan produk obat dan makanan yang beredar di pasar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat dengan **strategi pencegahan, pengawasan, dan penindakan** yang diperkuat dengan internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Reformasi Birokrasi melalui slogan **KolaborAksi Siap WBBM**.

Kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 dapat menjadi referensi yang dapat diandalkan bagi organisasi dalam merencanakan langkah-langkah untuk peningkatan kinerja organisasi dan meningkatkan pengelolaan birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memberikan informasi kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu melimpahkan berkah, kesempurnaan, dan kemudahan dalam setiap usaha kita dengan semangat sinergi dan transformasi untuk selalu mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan POM mewujudkan Indonesia emas tahun 2045.

Banda Aceh, 13 Agustus 2025
Kepala Balai Besar Pengawas
Obat dan Makanan di Banda Aceh,



Yudi Noviandi, M.Sc.Tech., Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (Balai Besar POM di Banda Aceh) telah disusun dan merupakan perwujudan akuntabilitas Balai Besar POM di Banda Aceh. Laporan ini memberikan uraian dan penjelasan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berisi informasi dan penjelasan yang memadai atas capaian Sasaran Kegiatan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2025 telah menandatangani Perjanjian Kinerja yang memuat 25 (Dua puluh lima) Indikator Kinerja Kegiatan (IK) untuk mencapai 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan. Capaian Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) di Triwulan I sebesar 98,30 dengan predikat Baik.

Pimpinan telah melakukan dialog kinerja kepada fungsi-fungsi di UPT sehingga kinerja organisasi dapat diukur dan dinilai dengan baik secara akuntabel.

SASARAN KEGIATAN 1 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Sasaran Kegiatan meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berhasil dicapai dengan sangat baik dengan capaian 110,67. Beberapa Risiko sudah dikelola sepanjang periode 2020 hingga 2024. Adanya peristiwa risiko berupa produk yang tidak memenuhi syarat akibat rendahnya pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) di Aceh dikendalikan dengan meningkatkan pendampingan CPPOB pada produsen dan aktif melakukan operasi hukum atau penindakan terhadap produsen yang menggunakan bahan berbahaya dalam Pangan.

Tabel 1. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2025

Sasaran Kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			110,67
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	84,75	100	117,99
<i>Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i>	Nilai di TW IV	Nilai di TW IV	Nilai di TW IV
<i>. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	93,46	109,95

<i>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT</i>	Diexclude dari Penilaian		
<i>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	88,18	103,74
<i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	75,00	75,96	101,28
<i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	93,00	100	107,53
<i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	Diexclude dari Penilaian		
<i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	Diexclude dari Penilaian		
<i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	85,00	100	117,65
<i>Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i>	85,8	100	116,55

SASARAN KEGIATAN 2 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori perlu upaya keras. Capaian realisasi terhadap target pada indikator ini bersifat akumulatif hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian, Balai Besar POM di Banda Aceh tetap optimis target indikator ini akan dapat dicapai sesuai target pada akhir tahun 2025 dengan tetap mencapai target setiap triwulan hingga target akhir tahun tercapai sepenuhnya.

Tabel 2. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2025

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	25,00	25,00	100,00

SASARAN KEGIATAN 3 MENGUATNYA LABORATORIUM PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT

Balai Besar POM di Banda Aceh terus senantiasa bekerja demi mewujudkan keamanan Obat dan Makanan di seluruh lapisan masyarakat melalui kinerja yang optimal dan berkolaborasi efektif dalam Laboratorium Regional Medan sehingga mampu mencapai target di Triwulan ini.

Tabel 3. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2025

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		101,69	
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i>	71,00	72,2	101,69

SASARAN KEGIATAN 4 MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan survei Efektifitas KIE triwulan I dengan jumlah responden 97 orang (indeks KIE 95.96) dengan perincian responden KIE Tatap muka sebanyak 56 orang (indeks 91.92) dan responden KIE media sebanyak 41 orang (indeks 100). Realisasi tingkat efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan triwulan 1 di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebesar 95.96 dan capaian tingkat efektifitas KIE yaitu 110.89 %. Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 7. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai sehingga Target terlampaui.

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 4 Tahun 2025

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT		110,89	
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i>	86,54	95,96	110,89
<i>Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>	Dimulai April 2025		
<i>Jumlah desa pangan aman</i>	Dimulai April 2025		
<i>Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas</i>	Dimulai April 2025		

SASARAN KEGIATAN 5 MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU

Pada awal tahun terjadi perubahan target sarana pendampingan yaitu 13 sarana UMKM pangan, OBA dan Kosmetik dengan komposisi 8 sarana pangan, 3 sarana OBA dan 2 sarana Kos (8;3;2), karena kondisi lapangan memang belum ditemukan sarana OBA dan Kos yang menjadi target pendampingan sehingga diusulkan menjadi komposisi dari 13 (11;1;1). Pada manual IKU pada penetapan target dijadwalkan pada jan-feb 2025, bergeser di maret 2025. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan pada tahun sebelumnya tidak menjadi penilaian target tetapi untuk tahun 2025 menjadi tahapan proses yang dihitung sebagai target di TW I, pelaksanaan yang direncanakan luring karena efisiensi menjadi daring dan sudah dilaksanakan di maret 2025.

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2025

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		64,83		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	
<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan</i>	18,00	11,67	64,83	

SASARAN KEGIATAN 6 TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Salah satu resiko kegiatan penindakan yang dilakukan pada TW I adalah Petugas tidak menemukan barang bukti di TKP, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebelum dilakukan penindakan, petugas melakukan pemantauan terhadap aktivitas sosial media terduga pelaku yang menjadi target, selain itu petugas juga melakukan investigasi di lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari sosial media.

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 6 Tahun 2024

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		100,00		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian	
<i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>	14,00	14,00	100,00	

Teknik yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan adalah teknik cover, baik melalui media sosial target dengan cara menyamar sebagai pengikut (follower)

guna memantau aktivitas target, maupun dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli secara langsung (offline) di lokasi/sarana.

Selain itu, teknik pengamatan (surveillance) dan eliciting juga dimanfaatkan dalam proses investigasi sebagai upaya untuk mengungkap suatu kasus secara lebih mendalam.

SASARAN KEGIATAN 7 TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT

Capaian kinerja sebesar 100,00 % terhadap target TW I sebesar 50,00% berasal dari salah satu komponen penyusunnya, yaitu Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber, yang dihitung berdasarkan jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disampaikan tepat waktu, yaitu sebesar 50%.

Sementara itu, dua komponen lainnya, yaitu Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT, belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan karena Rekomendasi Cegah Tangkal dari Direktorat Cegah Tangkal BPOM RI belum ada, dan pembuatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dijadwalkan selesai pada Triwulan IV. Sehingga, jika dibandingkan dengan target tahunan, masih perlu upaya keras untuk pencapaiannya.

Tabel 7. Capaian Sasaran Kegiatan 7 Tahun 2025

Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT			100,00
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
<i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	50,00	50,00	100,00

SASARAN KEGIATAN 8 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Sasaran Kegiatan 8 belum ada penilaian pada triwulan I dengan didukung 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT.

Tabel 8. Capaian Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2025

Layanan Publik UPT yang prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
-------------------	--------	-----------	----------

Indeks Pelayanan Publik UPT	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV
-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

SASARAN KEGIATAN 9 TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL

Sasaran Kegiatan 9 belum ada penilaian pada Triwulan I.

Tabel 9. Capaian Sasaran Kegiatan 9 Tahun 2025

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV	Dinilai pada TW IV



Bagan 1. Profil Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

REALISASI ANGGARAN

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mengalokasikan Anggaran DIPA tahun 2025 TW I sebesar Rp20.322.633.000 yang telah dibelanjakan dengan **realisasi anggaran 15.65 persen** sebesar Rp3.180.894.861 dengan perolehan **Nilai Pencapaian Sasaran 98,30** kategori **Baik**.

REVISI LAKIN INTERIM TW 1

Telah dilakukan perbaikan pada Lakin Interim TW I Tahun 2025 pada halaman 47, 48, 49, dan 52. Perbaikan berupa pencantuman nilai capaian indikator 3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. **Nilai yang dicantumkan 109,95 mengganti pencantuman nilai 109,45 pada pelaporan pertama April 2025.**

HIGHLIGHT KINERJA

Balai Besar POM di Banda Aceh melaksanakan beberapa kegiatan selama triwulan I tahun 2025 guna mendukung perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh turut menghadiri kegiatan Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlangsung pada 06 Januari 2025. **Total penerima manfaat program ini mencapai 3.478 orang**, yang terdiri dari 574 anak TK, 2.017 siswa SD, 415 siswa SMP, 172 siswa SMA, serta 300 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.



Peserta rapat terdiri dari 10 instansi pelayanan publik yang memiliki daftar kunjungan relatif rendah namun dengan potensi besar untuk menarik minat masyarakat. Inovasi ini **mencakup deteksi cemaran merkuri pada kosmetik, cemaran bahan berbahaya pada makanan, serta pengujian kandungan sildenafil pada kopi.**



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) menggelar kegiatan Pencanaan dan Sosialisasi Penguatan Reformasi Birokrasi (RB), Indeks Manajemen Risiko, serta Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 15 Januari 2025. Melalui kegiatan ini, diharapkan **BPOM Aceh terus berkomitmen melaksanakan perubahan** untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh turut hadir dalam kegiatan pelatihan lokakarya (workshop) dan seminar pengolahan kuliner perikanan siap saji pada 17 Januari 2025. Dengan sinergi yang terus terjalin, diharapkan **perekonomian lokal dapat tumbuh secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh Barat dan sekitarnya.**



memperoleh Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM.

Bimtek dilaksanakan pada 13 Februari 2025 secara daring, Peserta kegiatan ini berasal dari pelaku usaha pangan olahan yang belum memiliki sertifikat IP CPPOB di berbagai kabupaten/kota dalam wilayah pengawasan BPOM Aceh. Melalui bimtek ini, diharapkan **para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produk serta mendaftarkan produknya melalui e-reg RBA** untuk



Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Banda Aceh menggelar kegiatan Tribakti Pangan Aman di lima warung kopi (warkop) pada 18 Februari 2025. Hasil uji sederhana menunjukkan bahwa **makanan yang diperiksa bebas dari bahan berbahaya**, seperti formalin dan boraks, sehingga aman untuk dikonsumsi.



Balai Besar POM di Banda Aceh mendapatkan penghargaan **“Satker dengan implementasi KKP terbaik I”**.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh bersama Pemerintah Kota Banda Aceh dan SAKA POM menggelar Intensifikasi Pengawasan Pangan Jajanan Ramadan (takjil) di Kota Banda Aceh pada 13 Maret 2025. Dari total 63 sampel takjil yang diuji, **seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat (MS)**, tanpa adanya temuan bahan berbahaya maupun yang dilarang.



Ombudsman berperan dalam mengawasi aspek pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan hak mereka dalam jaminan keamanan pangan. “BPOM memiliki kewenangan utama dalam memastikan makanan yang beredar aman dan bermutu, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang,” Melalui dialog ini, diharapkan para pelaku usaha semakin memahami pentingnya menjaga kebersihan dan sanitasi dalam proses produksi serta menghindari penggunaan bahan berbahaya dalam produk makanan.



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BPOM Aceh) menggelar kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan secara daring melalui Zoom Meeting pada 21 Maret 2025. Melalui sosialisasi ini, BPOM Aceh berharap semakin banyak pelaku usaha yang memahami pentingnya menerapkan standar keamanan pangan yang baik, sehingga produk pangan yang beredar di masyarakat tetap terjamin kualitas dan keamanannya.

DAFTAR ISI

HIGHLIGHT KINERJA.....	i
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3. Struktur Organisasi	4
1.4.2. Analisis Lingkungan Strategis Internal	10
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis.....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	23
BAB III	33
AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi	169
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja	173
BAB IV	183
PENUTUP	183
4.1 Kesimpulan	183
4.2 Saran	184

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi	14
Table 2. Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh.....	19
Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025	21
Table 4. Kategori Capaian Indikator Kinerja	30
Table 5. Nilai Predikat Sasaran Kegiatan	34
<i>Table 6. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	<i>37</i>
<i>Table 7. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>39</i>
<i>Table 8. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>43</i>
<i>Table 9. Target dan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i>	<i>44</i>
<i>Table 10. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>45</i>
<i>Table 11. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>46</i>
<i>Table 12. Target dan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	<i>48</i>
<i>Table 13. Perbandingan realisasi TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>50</i>
<i>Table 14. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>53</i>
<i>Table 15. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.....</i>	<i>54</i>
<i>Table 16. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target 2024</i>	<i>56</i>
<i>Table 17. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>57</i>
<i>Table 18. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	<i>58</i>
<i>Table 19. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>60</i>
<i>Table 20. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>62</i>

<i>Table 21. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	<i>63</i>
<i>Table 22. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>	<i>65</i>
<i>Table 23. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>67</i>
<i>Table 24. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	<i>69</i>
<i>Table 25. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>72</i>
<i>Table 26. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>74</i>
<i>Table 27. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	<i>75</i>
<i>Table 28. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>76</i>
<i>Table 29. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>78</i>
<i>Table 30. Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	<i>80</i>
<i>Table 31. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>83</i>
<i>Table 32. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>86</i>
<i>Table 33. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	<i>87</i>
<i>Table 34. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>89</i>
<i>Table 35. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>91</i>
<i>Table 36. Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi</i>	<i>92</i>
<i>Table 37. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>95</i>
<i>Table 38. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>97</i>
<i>Table 39. Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>	<i>98</i>
<i>Table 40. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>100</i>
<i>Table 41. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>101</i>

<i>Table 42. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i>	<i>103</i>
<i>Table 43. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>104</i>
<i>Table 44. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>106</i>
<i>Table 45. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.....</i>	<i>107</i>
<i>Table 46. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>108</i>
<i>Table 47. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>111</i>
<i>Table 48. Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.....</i>	<i>112</i>
<i>Table 49. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>115</i>
<i>Table 50. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>116</i>
<i>Table 51. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.....</i>	<i>117</i>
<i>Table 52. Perbandingan Realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>119</i>
<i>Table 53. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>120</i>
<i>Table 54. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh</i>	<i>121</i>
<i>Table 55. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>123</i>
<i>Table 56. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>124</i>
<i>Table 57. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan</i>	<i>126</i>
<i>Table 58. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>129</i>
<i>Table 59. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>132</i>
<i>Table 60. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.....</i>	<i>134</i>
<i>Table 61. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>136</i>
<i>Table 62. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.....</i>	<i>138</i>

<i>Table 63. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>	<i>139</i>
<i>Table 64. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>140</i>
<i>Table 65. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>141</i>
<i>Table 66. Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik UPT</i>	<i>142</i>
<i>Table 67. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>144</i>
<i>Table 68. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>144</i>
<i>Table 69. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh</i>	<i>146</i>
<i>Table 70. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>147</i>
<i>Table 71. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>151</i>
<i>Table 72. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh</i>	<i>152</i>
Table 73. Kategori Penilaian SAKIP	153
Table 74. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024	153
<i>Table 75. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>154</i>
<i>Table 76. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>155</i>
<i>Table 77. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh</i>	<i>157</i>
<i>Table 78. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>158</i>
<i>Table 79. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>161</i>
<i>Table 80. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh</i>	<i>165</i>
<i>Table 81. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025</i>	<i>166</i>
<i>Table 82. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</i>	<i>167</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh.....	4
Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh	10
Gambar 3. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh.....	11
Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh adalah:

- a. Pemantauan dan Pengawasan: Pemantauan dan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Aceh dengan luas wilayah dan jangkauan yang jauh bisa menjadi tugas yang rumit bila tidak didukung dengan komitmen yang kuat dari lintas sektor terkait di Kab/Kota.
- b. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal secara *online*: Maraknya peredaran Obat dan Makanan yang diperjual belikan secara *online* melalui media sosial dan banyak diminati oleh golongan muda, menjadi tantangan serius yang memerlukan konsistensi dalam pengawasannya melalui peningkatan *siber patrol* dan informasi dari masyarakat.

- c. Kepatuhan pelaku usaha: Memastikan produk yang dihasilkan dan pendistribusian yang dilakukan oleh pelaku usaha berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku guna melindungi masyarakat dari produk obat, dan makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan atau tidak memenuhi standar.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk mencapai tujuan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh ini, sangat dibutuhkan adanya kerjasama dan komitmen yang kuat antara BPOM, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal Obat dan Makanan aman di Provinsi Aceh.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Provinsi Aceh, berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dengan alamat di Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23126, Telp. (0651) 7411698-23926, Fax. (0651) 22735, 22845. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh sebagai berikut:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM.
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM.
- c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Besar POM di Banda Aceh menjalankan Tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

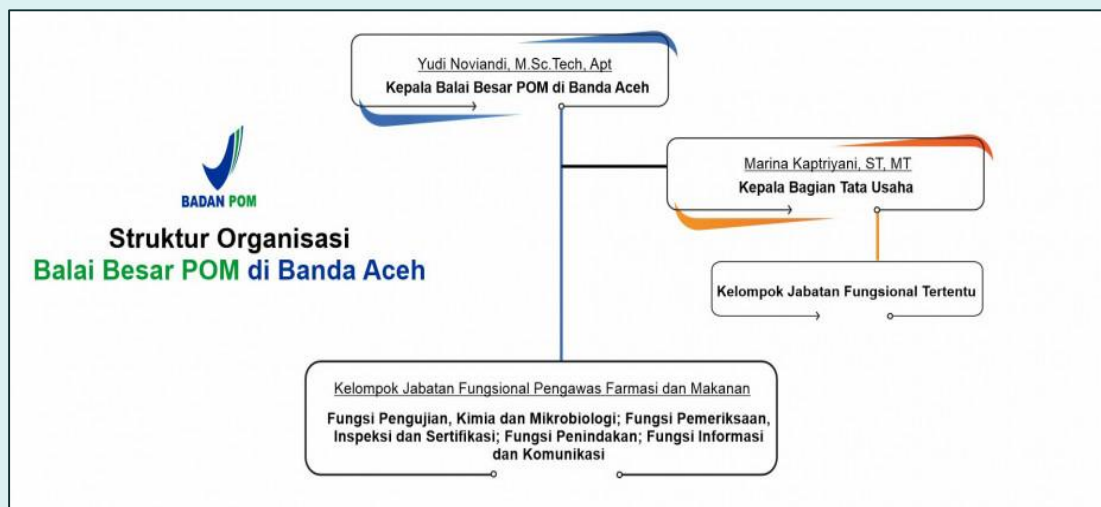
UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada peran Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Lembaga Pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Banda Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 Fungsi serta kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Fungsi Pengujian, mempunyai tugas dan fungsi:
 - Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pengujian kimia dan mikrobiologi obat dan makanan.
- b. Fungsi Pemeriksaan, mempunyai tugas dan fungsi:
 - Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas

produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk obat dan makanan.

- Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk obat dan makanan.
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan makanan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan terdiri dari:
 - Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
 - Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

c. Fungsi Penindakan, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

d. Fungsi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi,

edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- Pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana.
- Pelaksanaan urusan kepegawaian.
- Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
 - Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi, komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan system pengawasan full spectrum mulai dari



premarket hingga post market control yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (community empowerment). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 adalah melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (post-market) di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Kapasitas Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi menghadapi permasalahan pokok Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan kewenangannya, yaitu:

1. Strategi Pencegahan: melalui perkuatan regulasi, pelaksanaan komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
2. Strategi pengawasan: melalui perkuatan lintas sektor, perkuatan manajemen dan utilitasi database, intensifikasi pengawasan berbasis resiko, dan perkuatan implementasi regulasi.
3. Strategi penindakan: difokuskan pada tahap importasi, produksi dan distribusi obat melalui tiga pendekatan, yakni pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, kerjasama lintas sektor terkait dan penyusunan pedoman kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Banda Aceh dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga

dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

1.4.1. Permasalahan Utama

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh antara lain:

1. Percepatan penanganan Stunting

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*. BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah/PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penjualan Produk Obat dan Makanan secara online

Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun, aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung



jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun motto CEK KLIK harus tetap dilakukan. Cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek tanggal kedaluarsa. Kemudahan dalam melakukan pengecekan terhadap produk saat ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile, yang dapat diakses secara online Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan patroli siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

3. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan tahun 2025 berusaha memperoleh predikat Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) dengan tetap konsisten melaksanakan kegiatan dan anggaran secara akuntabel dan berorientasi pelayanan prima.

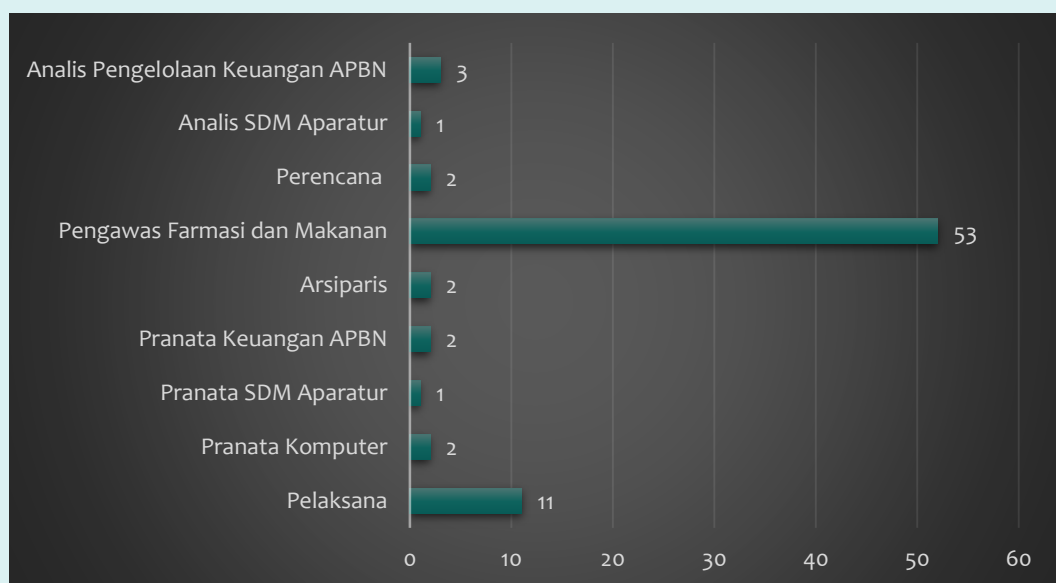
4. Regionalisasi Laboratorium Pengujian

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengujian laboratorium, telah diterapkan sistem regionalisasi laboratorium, konsep regionalisasi laboratorium ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 199 Tahun 2023 tentang Tim Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Konsep dasar dari regionalisasi laboratorium adalah pengelompokan laboratorium berdasarkan region dan spesialisasi pengujian dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Model ini tetap mengutamakan validitas dan kecepatan dalam hal pelaksanaan pengujian yang tentunya akan mempercepat tindak lanjut yang perlu dilakukan.

1.4.2. Analisis Lingkungan Strategis Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh saat ini adalah 79 orang yang terdiri atas 71 PNS dan 8 PPPK. Sebanyak 53 orang menduduki jabatan fungsional farmasi dan makanan (PFM), 13 orang jabatan fungsional tertentu lainnya dan 11 orang pelaksana, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9 orang, tenaga outsourcing 16 orang, sehingga total pegawai berjumlah 111 orang.



Gambar 2. Jabatan Fungsional Pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh

Untuk mendukung tugas Balai Besar POM di Banda Aceh sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik.

b. Sumber Daya Lainnya

Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki 3 buah gedung yang terdiri dari 2 gedung kantor dan 1 gedung laboratorium yang berdiri pada luas lahan Balai Besar POM di Banda Aceh seluas 3.262 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 3.169 m², listrik bersumber dari PLN dengan daya sebesar 53 KVA dan 41.5 KVA dilengkapi genset 200 KVA, 10 unit kendaraan dinas. Balai Besar POM di Banda Aceh memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi, peralatan dan instrumen

modern seperti PCR, AAS, Kromatografi Cair Kinerja Tinggi, Kromatografi Gas, GC-MS, Spectrofotometer, Elisa Reader dan lain-lain. Selain itu, Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mewujudkan Visi, Misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu yang telah tersertifikasi yaitu: ISO 9001:2015, dan akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025:2017 untuk seluruh bisnis prosesnya.



Gambar 3. Gambar Bangunan Balai Besar POM di Banda Aceh

c. Keunggulan Balai Besar POM di Banda Aceh

Keunggulan Balai Besar POM di Banda Aceh dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari fasilitas, peran strategis, maupun kontribusinya terhadap masyarakat dan pelaku usaha. Berikut beberapa keunggulannya:

➤ **Fasilitas Laboratorim**

Banda Aceh memiliki fasilitas laboratorium pengujian yang lengkap untuk menguji keamanan dan mutu produk sediaan farmasi, pangan olahan, kosmetik, suplemen kesehatan, produk bahan berbahaya. Alat laboratorium ini memungkinkan mendeteksi bahan berbahaya dan memverifikasi kandungan produk secara akurat.

➤ **Wilayah Strategis**

Balai Besar POM di Banda Aceh terletak di Ibukota Provinsi Aceh mampu menjangkau wilayah paling barat Indonesia dan sangat strategis untuk mengawasi distribusi produk dari dalam maupun luar negeri (termasuk produk impor dari negara tetangga).

➤ **Pelayanan Cepat dan Responsif**

Pelayanan yang diberikan berupa pengujian sampel secara cepat dan layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat yang dilakukan secara aktif, baik secara langsung maupun lewat media sosial.

➤ **Aktif dalam Edukasi dan Sosialisasi**

Seperti yang diketahui, Balai Besar POM di Banda Aceh aktif dalam sosialisasi keamanan pangan di sekolah, edukasi kepada pelaku UMKM tentang Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) maupun pendampingan sertifikasi produk.

➤ **Pendampingan UMKM**

Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku UMKM agar produknya aman untuk dikonsumsi, mendapatkan izin edar serta berdaya saing di pasar lokal dan nasional.

➤ **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah**

Melakukan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindag dan instansi terkait untuk menjaga peredaran produk yang aman dan legal di masyarakat.

1.4.3. Eksternal

a. Kondisi geografis dan Demografis



Gambar 4. Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah di Provinsi Aceh terletak antara 010 58' 37,2"-060 04' 33,6" LU dan 940 57' 57,6"-980 17' 13,2" BT. dengan

ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah: Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Barat dengan Samudera Indonesia. Pemerintahan di Provinsi Aceh dibagi ke dalam 18 wilayah Kabupaten dan 5 wilayah kota dengan total 23 Kabupaten/Kota dan luas wilayah 56.770,81 km². Seiring dengan perkembangan organisasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh, maka dibentuklah 2 (dua) LOKA POM berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dengan terbentuknya 2 (dua) LOKA POM tersebut, sehingga luas cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi berkurang menjadi 34.843,91 km².

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pada BAB VIII ketentuan peralihan Pasal 29 Poin C disebutkan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan sebelum peraturan Badan ini diundangkan, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan program dan kegiatan tersebut berakhir. Maka terhitung 1 Januari 2024 pelaksanaan program dan kegiatan telah mengacu pada ketentuan dalam PerBPOM tersebut dengan cakupan wilayah pengawasan dari 3 (tiga) UPT BPOM di wilayah Provinsi Aceh (yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

- **Balai Besar POM di Banda Aceh**

Luas cakupan pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh menjadi 9 Kabupaten dan 4 Kota (13 Kab/Kota). Dari 13 Kabupaten/Kota yang diawasi oleh Balai Besar

POM di Banda Aceh, 1 (satu) Kota merupakan daerah kepulauan yaitu Kota Sabang.

- **Loka POM Aceh Selatan**

Cakupan pengawasan Loka Aceh Selatan adalah 5 (lima) Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue (merupakan pulau terluar).

- **Loka POM Aceh Tengah**

Untuk Loka Aceh Tengah dengan cakupan pengawasan 5 (lima) Kabupaten: Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Nagan Raya.

b. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh meliputi industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, dan industri pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

NO	JENIS SARANA	JUMLAH SARANA	
Sarana Distribusi			
1.	PBF	27	Sarana
2.	Apotek	661	Sarana
3.	Toko Obat	416	Sarana
4.	Klinik	355	Sarana
5.	Rumah Sakit	64	Sarana
6.	Puskesmas	214	Sarana
7.	GFK	14	Sarana
8.	Distribusi Makanan	2266	Sarana
9.	Distribusi Kosmetik dan Salon	2887	Sarana
10.	Distribusi OT dan Suplemen Kesehatan	2824	Sarana

TOTAL SARANA DISTRIBUSI		9728	Sarana
Sarana Produksi			
1.	Industri Farmasi	0	Sarana
2.	Industri Obat Tradisional	0	Sarana
3.	UMOT	12	Sarana
4.	UKOT	9	Sarana
5	Industri Kosmetik	10	Sarana
6.	Industri Makanan (MD)	141	Sarana
7.	PIRT	2273	Sarana
TOTAL SARANA PRODUKSI		2445	Sarana



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas Pembangunan Jangka menengah, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya harus menyusun Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan sasaran strategis yang mengacu kepada Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029. Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang dihadapi di masa depan, Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai Unit Pelaksana Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tugas dan fungsi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Provinsi Aceh diharapkan mampu melihat perubahan lingkungan yang dinamis dan mengakomodasi berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Badan POM telah menetapkan Visi dan Misi Badan POM 2025-2029 yaitu:

VISI

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi dalam memberikan standar tertinggi regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

MISI

Misi Balai Besar POM di Banda Aceh sama dengan Misi BPOM 2025-2029, yaitu:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025-2029 adalah:

- 1) **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.** Tujuan ini menegaskan komitmen Balai Besar POM di Banda Aceh dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas
- 2) **Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.** Tujuan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- 3) **Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.** Tujuan ini menggaris bawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

di sektor obat dan makanan. Balai Besar POM di Banda Aceh berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

- 4) **Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.** Tujuan ini menekankan peran Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- 5) **Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.** Tujuan ini merupakan komitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam memberikan layanan publik yang prima.

Pada penyusunan Renstra periode tahun 2020-2025, BPOM menggunakan pendekatan Balance Corecard dengan pendekatan perspektif baik dari Stakeholders Perspective, Internal Process Perspective maupun Learning and Growth Perspective. Namun, pada penyusunan Renstra 2025-2029 direviu sesuai dengan pedoman maupun Permen PPN Nomor 10 tahun 2023. Perumusan Sasaran Strategis sekarang disesuaikan berdasarkan Logical Framework yang menggambarkan cascading/penjenjangan kinerja BPOM mulai dari level sasaran strategis, sasaran program hingga sasaran kegiatan. Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh disusun berdasarkan logical frame work BPOM yang merupakan cascading dari sasaran strategis BPOM hingga level Rincian Output pada UPT.

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.

Table 2. Rencana Kinerja Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00

4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	90.3
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
7.	Terlaksananya kegiatan Deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Balai Besar POM di Banda Aceh tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja pada tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		Persentase PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00
		Persentase Fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00

		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	90.3
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5
7.	Terlaksananya kegiatan Deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00
8.	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai

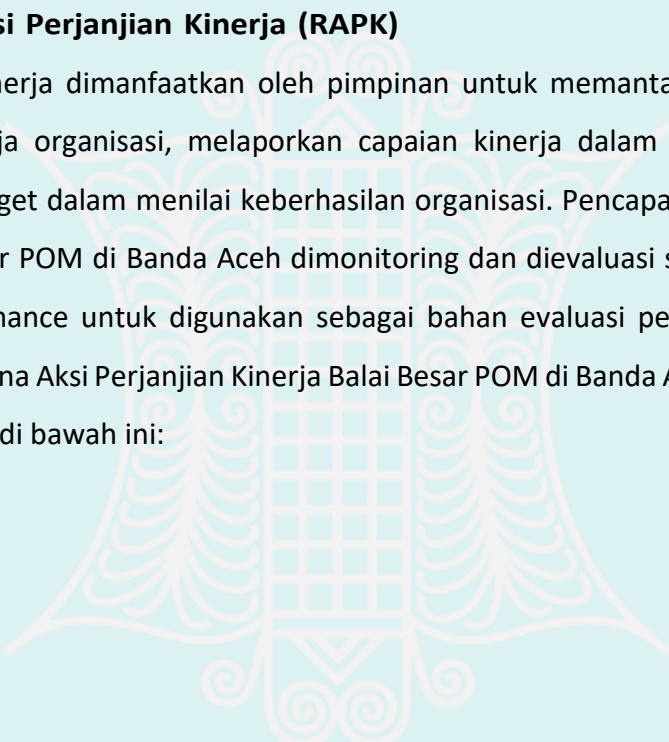


wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan pada triwulan berikutnya. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	84.75	618,898,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	43,550,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	318,123,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	23,662,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	23,662,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	73	74	75	76	77	78	78.5	79	80	81	82	83.3	108,651,250
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	13,333,750
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	13,333,750
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	96.75	338,214,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	338,214,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	85.8	316,848,250
2.	02 - Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		25	25	25	25	50	50	50	75	75	75	75	5,069,000
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			71	71	71	71.5	71.5	71.5	72	72	72	73	2,992,448,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
4.	04 - Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	86.54	272,181,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				40	50	60	62.5	77.5	87.5	97.5	100	10	436,427,000
		03 - Jumlah desa pangan aman				25	25	50	50	60	70	90	100	4	709,656,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				25	50	50	75	100	100	100	100	1	140,558,000
5.	05 - Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	8	18	28	38	42	47	57	67	77	82	90.3	48,359,000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	14	17.5	27.5	31.25	38.75	67.5	71.5	75	80	92.5	473,984,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	73,305,000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	112,285,000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.25	482,100,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82.78	106,030,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	12,090,091,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3.2	22,640,000
														Total	20,121,623,000
Banda Aceh, 12 February 2025 Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh  YUDI NOVIANDI															

2.5 Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Table 4. Kategori Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$< 110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90$	
Kurang	$< 60\%$	

Kategori capaian indikator kinerja tabel di atas digunakan untuk penilaian pada point a BAB III dan tabel capaian kinerja di bawah untuk digunakan pada penilaian point c di BAB III.

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran kegiatan digunakan pembobotan untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS\ 2 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2}{2}$$

$$NPS\ 3 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3}{3}$$

$$NPS\ 4 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4}{4}$$

$$NPS\ 5 = \frac{1NPI\ 1 + 1NPI\ 2 + 1NPI\ 3 + 1NPI\ 4 + 1NPI\ 5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Besar POM di Banda Aceh adalah sebagai berikut: Menunjuk 1 orang petugas penanggungjawab data di Balai Besar POM di Banda Aceh yang disahkan oleh SK Kepala BPOM.

1. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh.
2. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada aplikasi Sigarang secara online rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai.
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI (Capaian Output), monev Bappenas, RHPK dan Aplikasi e-performance.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance.
5. Reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN pada aplikasi SIASN yang merupakan

pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian reward dan punishment atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.

6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banda Aceh guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Indikator Kinerja Periodik tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.

Balai Besar POM di Banda Aceh pada triwulan I di Tahun 2025 berhasil meraih Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) dengan capaian 98,30 dengan predikat Baik, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja telah tercapai sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan cukup efektif dan efisien. Namun, masih perlunya evaluasi terhadap beberapa indikator yang menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan upaya-upaya strategis untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya.

Data dan informasi yang tersedia dalam laporan ini dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja sekaligus mendapatkan rekomendasi perbaikan berkelanjutan untuk mencapai target kinerja pada triwulan berikutnya.

Table 5. Nilai Predikat Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target TW I	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 98.30 dengan Predikat Baik							
SK1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 110.67 dengan kategori Sangat Baik	IKSK1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	100	117.99	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Nilai di TW IV			
		IKSK3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.46	109.95	Sangat Baik 
		IKSK4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Diexclude dari Penilaian			
		IKSK5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.18	103.74	Sangat Baik 
		IKSK6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	75.96	101.28	Sangat Baik 
		IKSK7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53	Sangat Baik 
		IKSK8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Diexclude dari Penilaian			

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target TW I	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
		IKSK9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Diexclude dari Penilaian			
		IKSK 10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK 11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	100	116.55	Tidak dapat disimpulkan 
SK2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 100 dengan kategori Baik	IKSK 12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25.00	25.00	100.00	Baik 
SK3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT 101.69 dengan kategori Sangat Baik	IKSK 13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.00	72.2	101.69	Sangat Baik 
SK4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT 110.89 dengan kategori Sangat Baik	IKSK 14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	95.96	110.89	Tidak dapat disimpulkan 
		IKSK 15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20.00	Dimulai Bulan April 2025		
		IKSK 16	Jumlah Desa pangan aman	20.00			
		IKSK 17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20.00			
SK5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu 64.83 dengan kategori Cukup	IKSK 18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18.00	11.67	64.83	Cukup 

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)		Target TW I	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
SK6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 100 dengan kategori Baik	IKSK 19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	14.00	14.00	100.00	Baik 
SK7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 100 dengan kategori Baik	IKSK 20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50,00	100.00	Baik 
SK8	Layanan Publik UPT yang prima	IKSK 21	Indeks Pelayanan Publik UPT	Nilai di TW IV			
SK9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh				
		IKSK 23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh				
		IKSK 24	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh				
		IKSK 25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh				

Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, terdapat 5 (lima) indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik**, 3 (tiga) indikator kinerja dengan kategori **Baik**, 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori **Tidak dapat disimpulkan**, 1 (satu) indikator kinerja yang berkategori **Cukup**, 3 (tiga) indikator kinerja yang **diexclude** dari penilaian dan 9 (sembilan) indikator kinerja yang belum ada penilaian.

SASARAN KEGIATAN I

Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 1 dicapai dengan NSS 110,67 dengan kategori sangat baik. Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 11 (sebelas) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan melampaui target.

Indikator Kinerja

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi triwulan I tahun 2025

Table 6. Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	100	117.99 	Tidak dapat disimpulkan

Sediaan farmasi berisiko yang dimaksud dalam indikator ini meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik yang disampling dan dilakukan pengujian berdasarkan analisis risiko. Sampel dipilih berdasarkan analisis risiko dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus: $(A+B+C+D) / 4$

$$\frac{(A+B+C+D)}{4} \times 100\%$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- A. Persentase sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- B. Persentase sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- C. Persentase sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

D. Persentase sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Kriteria sampel Obat berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Kesesuaian perencanaan sampling mencakup kesesuaian dengan target sampel, rentak kategori sampel dan rentak kategori kelas terapi. 2). Kesesuaian pelaksanaan sampling mencakup kesesuaian dengan rentak periode/waktu sampling dan ketentuan evaluasi penandaan. 3). Kesesuaian pelaksanaan pengujian mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai pedoman sampling yang berlaku. 4). Kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling. 5). Kesesuaian pelaporan monitoring penarikan.

Kriteria sampel Obat Bahan Alam berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 3). Kesesuaian parameter uji. 4). Akurasi dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Kriteria sampel Suplemen Kesehatan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 3). Kesesuaian parameter uji. 4). Akurasi dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Kriteria sampel Kosmetik berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan, meliputi: 1). Pemenuhan target pengawasan mencakup jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai dengan pedoman sampling. 2). Kesesuaian pelaksanaan sampling. 3). Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan. 4). Ketepatan dalam penentuan kesimpulan. 5). Tanggapan atas surat tindak lanjut.

Realisasi persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah dari hasil pemeriksaan, pengujian, pelaporan dan tindak lanjut sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan

persentase 100% dari target 84.75%. Selama TW I, jumlah sampel sediaan farmasi yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh yang masuk ke laboratorium sendiri maupun ke laboratorium regional dengan total sebanyak 87 sampel terdiri dari 20 sampel obat, 27 sampel Obat Bahan Alam, 5 sampel suplemen kesehatan, 35 sampel kosmetik, dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sementara jumlah sampel obat yang masuk ke laboratorium baik yang disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh maupun yang disampling balai regional sebanyak 33 sampel dan keseluruhan dapat diuji parameternya sesuai ketentuan. Capaian persentase indikator ini pada TW I sebesar 117.99% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 7. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	100	117.99 ▲	Tercapai/ melampaui

Perbandingan realisasi kinerja sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I terhadap target tahun 2025 sebesar 100% sudah melampaui target Renstra 2025 yaitu 84.75%. Capaian indikator kinerja ini sebesar 117.99% dengan kategori Tercapai/Melampaui. Berdasarkan capaian ini, dengan rencana kerja yang baik, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis dapat memenuhi target Renstra 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indikator persentase sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk TW I dengan nilai 100%. Sampel sediaan farmasi telah disampling selama TW I sebanyak 87 sampel yang merupakan target efisiensi anggaran dari target semula sebanyak 877 sampel. Seluruh sampel yang disampling sesuai dengan perencanaan sampling yang telah direncanakan dan dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, penandaan label, ketepatan waktu pengambilan, pengujian, pelaporan dan tanggapan atas surat tindak lanjut. Sampel yang disampling selama TW I sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang disusun pada awal tahun kemudian pada bulan Februari dan Maret karena adanya efisiensi maka dilakukan penyesuaian rencana sampling terhadap ketersediaan reagen dan baku di laboratorium.

Komoditi obat yang disampling selama TW I sebanyak 20 sampel yang merupakan target efisiensi dari target semula 259 sampel. Sampel yang disampling merupakan target efisiensi dan sampling sesuai rencana. Terdapat beberapa kendala yaitu dalam memenuhi minimal 2 kriteria analisa risiko dalam memilih obat yang akan disampling, sarana yang terpilih berdasarkan analisa risiko tidak memiliki obat yang akan disampling sesuai dengan jenis dan jumlah, serta semakin sulit menemukan sampel sesuai kriteria pada pedoman sampling disebabkan kemampuan uji laboratorium yang berkurang akibat efisiensi anggaran. Kendala diatasi dengan membuat daftar obat yang termasuk dalam kriteria analisa risiko berdasarkan pedoman sampling sehingga memudahkan analisa risiko di sarana tempat sampling. Memperluas cakupan area sampling sehingga lebih banyak cadangan sarana yang memiliki analisa risiko sesuai dan dilakukan penyesuaian terhadap rencana sampling sehingga capaian realisasi tetap terpenuhi yaitu 100%. Lokasi sampling komoditi obat selama TW 1 masih terbatas di kota Banda Aceh disebabkan tidak ada perjalanan dinas luar kota untuk melakukan pengadaan sampel.

Kendala pengujian yang dialami laboratorium Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW I adalah keterbatasan reagensia, suku cadang dan perawatan alat rusak akibat efisiensi anggaran sehingga jenis sampel yang diuji tidak banyak. Cara mengatasi kendala tersebut dengan mengkomunikasikan jenis sampel yang dapat diuji kepada balai penyampling seluruh anggota regional Medan sesuai dengan kemampuan laboratorium dan menerapkan sistem clock off untuk alat yang rusak yaitu KCKT dan GCMS. Dengan penerapan sistem ini maka 33 sampel yang masuk ke laboratorium baik dari balai sendiri maupun balai regional, keseluruhannya dapat diuji parameternya sesuai ketentuan pada pedoman sampling pengujian. Dengan demikian target realisasi pada kriteria kesesuaian pelaksanaan pengujian yaitu kesesuaian parameter uji sesuai pedoman sampling terealisasi 100%. Kendala pemenuhan target pada kriteria kesesuaian pelaporan hasil sampling dan pengujian mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling hampir tidak ada. Hal ini disebabkan oleh dari 20 sampel yang disampling, hanya 7 sampel yang diuji oleh laboratorium balai regional, sisanya 13 sampel diuji oleh Balai Besar POM di Banda Aceh sendiri sehingga pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan dapat dikendalikan dengan baik sehingga dapat terealisasi 100%.

Komoditi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu selama TW I sebanyak 32 sampel yang merupakan target efisiensi dari target semula 252 sampel (terdiri dari obat bahan alam 187 sampel, obat kuasi 14 sampel dan suplemen kesehatan 51 sampel). Lokasi sampling secara luring terbatas di kota Banda Aceh. Pembelian sampel secara daring melalui e-commerce dari daerah Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Bireuen dan Aceh Besar. Penetapan daerah tersebut sebagai lokasi sampling daring berdasarkan analisis kajian risiko yang merupakan wilayah rawan peredaran sampel Tanpa Izin Edar (TIE).

Kendala pengujian yang dialami laboratorium obat bahan alam dan suplemen kesehatan Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW I adalah kerusakan alat dan tidak tersedianya suku cadang yaitu alat Disintegration tester sehingga tidak dapat melakukan pengujian uji waktu hancur sehingga dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Medan. Kolom Poraplot GC tidak dapat digunakan lagi sehingga dilakukan

penggantian metode. Ferrule GCMS sudah tidak tersedia sehingga pengujian dengan alat GCMS juga terkendala. Pengujian sampel selesai 100% namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena antrian alat dan sampel yang diduga TMS memerlukan pengujian ulang. Untuk selanjutnya laboratorium merencanakan akan membuat perencanaan pembelian suku cadang dan menjadwalkan maintenance alat dengan teknisi serta menggunakan metode analisa dengan instrumen yang bervariasi untuk meminimalkan antrian dan penggunaan instrumen lain.

Komoditi kosmetik yang disampling TW I sebanyak 35 sampel yang merupakan target sampel efisiensi dari target semula 366 sampel. Lokasi sampling selama TW I umumnya daerah Banda Aceh, terdapat sampel dari daerah Aceh Barat yang dibeli pada bulan Januari sebelum diberlakukan efisiensi.

Kendala pengujian yang dialami laboratorium Kosmetika Balai Besar POM di Banda Aceh selama TW I adalah semua instrumen HPLC mengalami kerusakan/trouble (HPLC LC-20 AD kerusakan pada part LPGE di pompa dan HPLC LC-40 mengalami penyumbatan pada flowcell) sehingga kinerja tidak optimal. Pada Instrumen GC kolom Poraplot Q yang mengalami penurunan kinerja sehingga pengujian etanol metanol dilakukan di Balai Besar POM di Medan. Ferrule GCMS sudah tidak tersedia sehingga pengujian dengan alat GCMS juga terkendala. Pengujian sampel selesai 100% namun membutuhkan waktu yang lebih lama karena antrian alat. Untuk selanjutnya laboratorium merencanakan akan membuat perencanaan pembelian suku cadang dan menjadwalkan maintenance alat dengan teknisi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian indikator ini memenuhi target dengan kriteria Tercapai/Melampaui karena upaya-upaya yang telah dilakukan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan perencanaan dan pelaksanaan sampling akan disesuaikan dengan pedoman sampling yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal tahun sebelum diberlakukan efisiensi. Upaya lain yang dilakukan adalah memperkuat komunikasi antar balai penyampling dan penguji agar sampel yang disampling disesuaikan dengan kemampuan uji laboratorium berkenaan dengan

ketersediaan reagensia, baku pembanding dan sarana prasarana pengujian lainnya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 8. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	613.168.000	15.293.891	2.49	117.99	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Selama TW I masih berlaku masa efisiensi sehingga realisasi anggaran masih sedikit namun capaian indikator persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tetap tercapai.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai acuan dalam monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh serta melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja persentase sampel sediaan farmasi berisiko dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025 - 2029, sehingga laporan kinerja interim TW I akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja pada TW berikutnya baik pada persentase sampel obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik berisiko dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Laporan ini juga digunakan untuk menyusun rencana kerja yang lebih optimal pada triwulan berikutnya sehingga setiap proses tahapan pada capaian indikator kinerja akan selalu tercapai.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Resiko terkait Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 9. Target dan Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO				

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diperoleh menggunakan formula:

$$\frac{A}{B} \times 100\%$$

Kriteria nilai A dan B yaitu:

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi

belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dibandingkan dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan yaitu tahun 2025. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

Pada Triwulan I tahun 2025 nilai KTD/ESO belum ada dan akan diperoleh pada Triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 10. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	-	-	-

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO belum ada pada triwulan I dan akan diperoleh pada triwulan IV. Balai Besar POM di Banda Aceh akan tetap melakukan proses memberikan KIE kepada fasilitas pelayanan kesehatan dan optimis mencapai target pada tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada TW I belum ada target pelaporan KTD/ESO.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Selanjutnya untuk menunjang kinerja, maka ada beberapa aksi yang telah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan Kegiatan Pelaksanaan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM di periode interim Triwulan I. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di catchment area Balai Besar POM di Banda Aceh yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.
2. Jumlah peserta KIE yang diundang adalah 45 peserta. yang terdiri dari 20 Rumah Sakit, 17 Puskesmas dan 8 Klinik. Kepada peserta telah diberikan akun e-MESO yang digunakan untuk pelaporan KTD/ESO.
3. Pemahaman peserta diukur dengan nilai pre-test dan post-test. Seluruh peserta memenuhi syarat mendapatkan sertifikat dengan nilai post-test minimal 70.
4. Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan pemantauan pelaporan KTD/ESO dari seluruh sarana pelayanan kesehatan yang telah mengikuti KIE mulai April – Desember 2025.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 11. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	43.550.000	0	0	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Kinerja ini baru ditetapkan di tahun 2025 sehingga belum ada Laporan Kinerja yang digunakan sebagai bahan atau referensi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja di triwulan I. Analisa kinerja dan informasi yang dipaparkan di laporan kinerja triwulan I ini akan digunakan sebagai informasi kinerja bagi pelaksanaan kegiatan di triwulan II.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Masih rendahnya jumlah laporan KTD/ESO yang diterima dari sarana pelayanan kesehatan menjadi risiko yang diidentifikasi di tahun 2025 ini. Penyebab yang telah diidentifikasi adalah kurangnya kesadaran dan keaktifan petugas sarana pelayanan kesehatan terkait pelaporan KTD/ESO dan sarana pelayanan kesehatan telah mempunyai sistem pelaporan KTD/ESO secara mandiri yang belum semuanya terintegrasi dengan e-MESO Badan POM. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan KIE Farmakovigilans di triwulan I pada 25 Maret 2025 dan akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan KTD/ESO oleh sarana pelayanan kesehatan yang telah dilakukan KIE sepanjang April hingga Desember 2025.

3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 12. Target dan Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.46	109.95 	Sangat Baik

Pangan Olahan berisiko yang dimaksud dalam indikator ini adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko, diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

Keterangan:

- A. Kesesuaian target sampel UPT;
- B. Kesesuaian parameter uji;
- C. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
- D. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
- E. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- F. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya.

Kerangka Sampling dalam indikator ini meliputi:

1. Sampel pangan berdasarkan proporsi sampling, dilakukan pada kategori pangan 1 sampai 16 (kecuali kategori pangan 10 telur dan produk-produk telur) dan BTP. Penetapan proporsi berdasarkan kriteria pembobotan data produk beredar, trend temuan produk Tidak Memenuhi Syarat (TMS), temuan produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) Label, kategori risiko produk, risiko konsumsi pada kelompok konsumen tertentu (antara lain: anak, balita, ibu hamil dan menyusui, lansia) dan munculnya isu baru pada pangan (seperti Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), etilen glikol/dietilen glikol (EG/DEG), penggunaan

BTP yang belum diatur, isu residu pestisida, dll), serta berdasarkan kajian mendalam Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan terhadap implementasi pedoman sampling.

2. Sampel pangan fortifikasi, dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional percepatan perbaikan gizi masyarakat. Sampling pangan fortifikasi merupakan sampling yang bertujuan untuk memonitor implementasi fortifikasi pada pangan fortifikasi, meliputi sampel garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, yang diambil di sarana produksi dan peredaran.
3. Sampel Kemasan Pangan, pengambilan sampel terhadap produk pangan terdaftar di peredaran dengan fokus pada kemasan yang digunakan. Kemasan yang disampling merupakan bagian integral dari produk pangan yang bersangkutan, sehingga tidak memiliki proporsi khusus. Sampel kemasan pangan merupakan bagian dari sampel pada kategori pangannya, seperti ikan dalam kaleng, air minum dalam kemasan (AMDK) berbahan PC, maupun AMDK berbahan PET. Tujuan sampling ini adalah untuk memastikan keamanan kemasan pangan yang digunakan serta kepatuhannya terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku
4. Sampel Kajian, dilakukan terhadap produk pangan olahan dan dilakukan pengujian terhadap parameter uji kajian. Sampel ini bertujuan untuk mengawal kebutuhan penyusunan kebijakan/regulasi terhadap isu terkini dan posisi Indonesia pada forum internasional.

Selama TW I, telah dilakukan sampling pangan olahan berbasis risiko sebanyak 28 sampel dan sebanyak 52 sampel (termasuk sampel dari Loka Aceh Tengah dan Aceh Selatan) yang masuk ke laboratorium untuk diuji sesuai parameter uji pada Pedoman Sampling dan telah dilaporkan ke pusat dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dengan persentase 93.46% dari target 85%. Capaian Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 109.95% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 13. Perbandingan realisasi TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.46	109.95 	Tercapai/ Melampaui

Perbandingan realisasi kinerja TW I terhadap target tahun 2025 sudah mencapai dan melewati target. Capaian indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 109.95%. Berdasarkan Capaian di TW I ini Balai Besar POM di Banda Aceh optimis akan dapat mencapai target tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk TW I. Target awal DIPA untuk sampel pangan olahan berbasis resiko adalah sebanyak 302 sampel. Selama TW I sebanyak 28 sampel pangan olahan yang disampling merupakan target efisiensi anggaran dari target efisiensi sebanyak 96 sampel. Seluruh sampel yang disampling dilakukan pemeriksaan terkait kondisi produk, penandaan label, nomor izin edar, dan kedaluarsa untuk menentukan apakah sampel dapat diteruskan ke laboratorium pengujian ataupun tidak. Sampel yang disampling selama TW I sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang disusun pada awal tahun, dan adanya efisiensi pada bulan Februari dan Maret, dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan sampling terhadap ketersediaan reagen maupun baku di laboratorium. Lokasi Sampling selama TW I masih terbatas pada kota Banda Aceh karena dampak dari efisiensi anggaran, dimana tidak ada perjalanan dinas luar kota untuk melakukan

pengadaan sampel di kabupaten / kota lain di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Untuk kesesuaian parameter uji, pada TW I sampling disesuaikan dengan kondisi baku dan reagen yang tersedia di laboratorium dengan berpedoman pada Pedoman Sampling 2025 sehingga dapat memenuhi semua parameter wajib yang telah ditetapkan. Untuk Parameter Uji yang belum bisa diuji lengkap adalah kategori sampel yang mewajibkan parameter Aflatoksin BG, Aflatoksin M1, Okratoksin, Deoksivalenol, 3 MCPD, Polisiklik Aromatik Hidrokarbon (PAH), Beta Karoten, dan Sianida. Hal ini disebabkan baku dan reagen parameter tersebut yang sudah tidak tersedia di laboratorium. Sehingga perlu dilakukan percepatan pengadaan untuk pengujian pada TW selanjutnya. Agar kesesuaian parameter uji dapat terpenuhi tetap akan dilakukan koordinasi dengan tim sampling terkait kelengkapan parameter uji untuk proses selanjutnya.

Karena sampel yang diuji telah memenuhi semua parameter yang telah ditetapkan pada Pedoman Sampling, maka pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji sudah sesuai. Adapun hal-hal yang perlu diantisipasi agar tidak terjadi kesalahan pengambilan Kesimpulan Pengujian diantaranya adalah:

1. Ketepatan pemilihan Metode Analisa
2. Ketepatan proses pengujian terkait metode analisa, baku pembandingan, reagen, instrumen, serta analisa hasil pengujian dengan instrumen
3. Kesesuaian kompetensi penguji dengan jenis pengujian
4. Ketepatan pengisian hasil uji pada Lembar Catatan Pengujian (LCP) oleh penguji dan verifikasi oleh Ketua Tim
5. Ketepatan pengisian hasil uji pada SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu) baik dari penguji maupun Ketua Tim.
6. Pada sampel TMS telah dilakukan analisa dengan menjalankan analisa HULS (Hasil Uji diluar Spesifikasi) sesuai prosedur sehingga kesalahan penarikan kesimpulan dapat diminimalisir.

Ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian yang tidak terpenuhi hanya pada sampel bulan Januari. Hal ini disebabkan sampel Januari baru diterima dan mulai diuji di laboratorium pada tanggal 30 Januari sehingga tidak dapat selesai pada tanggal 15

Februari. Sementara itu sampel bulan Februari dan Maret umumnya pelaporan sampling dan pengujian tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya. Secara umum waktu penyelesaian pengujian sampel dari pembuatan SPK sampai dengan terbit Lembar Hasil Uji (LHU) pada TW 1 rata-rata adalah 15 HK, dengan waktu tersingkat 11 HK dan waktu terlama 21 HK. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya jumlah sampel yang masih sedikit dibanding tahun lalu karena adanya efisiensi anggaran, maupun ketersediaan sarana prasarana pengujian terkait masih memadai, kondisi instrumen yang baik, dll. Kendala yang harus diantisipasi terkait ketepatan waktu pelaporan adalah ketepatan waktu datangnya sampel di laboratorium, yaitu maksimal tanggal 10 tiap bulannya, serta kondisi instrumen dan sarana pengujian yang memadai baik laboratorium Kimia maupun Mikrobiologi. Saat ini sedang dilakukan monitoring evaluasi terkait pemenuhan sarana pengujian terkait performance instrumen, reagen, alat gelas dan suku cadang agar pengujian dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan.

Selama TW I terdapat 2 sampel pangan olahan terdaftar yang Tidak Memenuhi Syarat dari hasil pengujian parameter kimia maupun parameter mikro. Tindak lanjut yang dilakukan berupa pembinaan kepada sarana distribusi pangan olahan untuk selalu menjaga mutu pangan yang diedarkan, sedangkan tindak lanjut terkait mutu produk pangan olahan yang terdaftar di Badan POM akan ditindaklanjuti oleh pusat. Komitmen dari petugas sampling sangat diperlukan dalam pemenuhan tahapan pelaksanaan sampling sesuai pedoman agar dapat mencapai nilai maksimal sehingga target yang ditetapkan dapat selalu dicapai.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

1. Perencanaan dan pelaksanaan sampling yang sesuai dengan Pedoman Sampling yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal tahun. Dampak efisiensi juga dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan target sampel.
2. Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium kurang dari 5 hari kerja sejak sampel disampling oleh petugas.

3. Pemeriksaan sampel disertai komitmen petugas sampling dalam melakukan penginputan data sampel sesuai dengan Pedoman Sampling.
4. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan
5. Monitoring dan evaluasi terkait kompetensi penguji, sehingga kesalahan hasil uji dapat dihindari dan ketepatan waktu uji juga dapat dipenuhi
6. Monitoring dan evaluasi terkait kondisi instrumen laboratorium seperti HPLC, ICP OES, ELISA Reader, Spektrofotometer, dll, baik kalibrasi/verifikasi alat maupun suku cadang dan spare part yang harus diganti serta pemeliharaan alat.
7. Monitoring dan evaluasi pengadaan reagen dan baku pengujian, terutama untuk yang pengadaannya inden dengan waktu tertentu seperti baku Aflatoksin, Okratoksin, Deoksivalenol, dan lain-lain.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 14. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	325.667.000	23.581.947	7.24	109.95	Efisien

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran TW I sebesar 7.24% merupakan realisasi anggaran berdasarkan efisiensi anggaran yang terjadi selama TW I dimana belum dilakukan pengadaan reagen dan belanja sampel juga belum maksimal. Walaupun anggaran yang dikelola selama TW I merupakan anggaran efisiensi, target indikator tetap dapat dicapai. Dengan demikian anggaran tahun 2025 yang tersedia sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator persentase pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025 - 2029, sehingga laporan kinerja interim TW I ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada TW berikutnya mulai dari tahap kesesuaian target sampling, penetapan parameter pengujian, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan serta tindak lanjut sesuai pedoman. kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Risiko terkait Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 15. Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Indikator Kinerja	Target TW III (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100			

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus:

% sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sesuai standar yang dimaksud dalam indikator ini adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Selama TW I, tidak ada sampel KLB yang diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh, sehingga target untuk indikator ini tidak dapat terpenuhi dan tidak dihitung sebagai kinerja balai, karena pemenuhan terkait indikator kinerja ini tidak dapat dikendalikan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh khususnya terkait adanya kasus KLB dan ketersediaan sampel yang dapat diperiksa dan diuji sesuai standar.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 16. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target 2024

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100			

Selama TW I tahun 2025 tidak ada sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dan demikian juga untuk TW selanjutnya tidak dapat dipastikan apakah sampel KLB keracunan pangan akan ada pada TW berikutnya sehingga target tahun 2025 dapat dicapai sebagai kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tidak ada realisasi terhadap target dari indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar dikarenakan tidak adanya sampel terkait KLB keracunan pangan baik dari lintas sektor dinas kesehatan maupun hasil penelusuran yang dilakukan oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terkait adanya informasi KLB keracunan pangan.

Tim pemeriksaan maupun tim pengujian selalu siap apabila terdapat sampel KLB KP yang diterima dari dinas kesehatan kabupaten/kota dengan memprioritaskan penginputan data, pengujian (ketersediaan reagen, baku dan instrumen) serta pelaporan sesuai ketentuan, sehingga apabila pada tw berikutnya terdapat sampel KLB Keracunan Pangan, target pada indikator ini dapat tercapai 100%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Belum ada capaian terkait indikator persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar selama TW I, walaupun demikian beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator ini antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi aktif petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dengan tim gerak cepat KLB Keracunan Pangan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia.
3. Kompetensi petugas yang menangani sampel KLB Keracunan Pangan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 17. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	22.755.000	1.629.369	7.16	-	Tidak Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran tidak efisien di mana tidak ada realisasi capaian indikator tetapi terdapat realisasi anggaran. Hal yang menyebabkan terdapatnya realisasi anggaran pada indikator ini yaitu anggaran untuk indikator persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT digunakan juga untuk mencapai indikator persentase sampel PIRT yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. walaupun demikian, ketersediaan anggaran ini sangat diperlukan untuk perlu dipersiapkan untuk sumber daya seperti reagen yang diperlukan untuk pengujian sampel KLB keracunan pangan apabila terdapat sampel KLB keracunan pangan di kemudian hari sehingga sepenuhnya diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator ini.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan/Dinas Kesehatan untuk menindak lanjuti hasil pengujian terhadap sampel KLB keracunan pangan. Ketersediaan dan kesiapan sumber daya Balai Besar POM di Banda Aceh juga menjadi informasi yang sangat bermanfaat agar capaian terhadap indikator ini dapat terpenuhi apabila terdapat sampel KLB Keracunan Pangan yang diterima pada TW selanjutnya.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh khususnya sampel KLB Keracunan Pangan yang utama adalah terkait koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota agar sampel yang dikirimkan sudah memenuhi unsur penetapan KLB dan masih layak untuk dilakukan pengujian, sehingga dapat mengurangi dan mengatasi kendala lain yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Sampai saat ini, resiko yang mungkin menghambat pencapaian indikator ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 18. Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.18	103.74 	Sangat Baik

Pada indikator ini, sampel PIRT yang disampling mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan terdiri dari 11 kategori pangan.

Penetapan proporsi per kategori untuk PIRT yang disampling ditentukan dengan risk-based bersama pakar sebagaimana telah dilakukan untuk pangan MD/ML, berdasarkan beberapa aspek:

1. PIRT yang beredar, dimana sampling dilakukan dengan mempertimbangkan peredaran produk yang akan dikonsumsi masyarakat.
2. Potensi risiko untuk produk asal hewan dan ikan yang rentan terhadap kontaminasi bakteri patogen, seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Pengolahan yang tidak higienis atau penyimpanan yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko ini.
3. Rekam jejak temuan produk Tidak Memenuhi Syarat Rekam dimana merupakan pendekatan spesifik di masing-masing wilayah. Rekam jejak temuan ini mengidentifikasi produk yang memiliki potensi risiko lebih tinggi. Data yang digunakan pada kategori ini mengacu pada data rekam jejak pengujian nasional.
4. Produk yang berpotensi dengan BTP maksimum level BTP adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan untuk tujuan tertentu, seperti pengawetan, penambah rasa, atau pewarna. Pada produk PIRT penggunaan BTP seringkali dilakukan tanpa penimbangan sehingga berpotensi melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan.
5. Potensi penggunaan Bahan Berbahaya/Bahan yang tidak diizinkan pada pangan Potensi penggunaan bahan berbahaya atau bahan yang tidak diizinkan digunakan pada pangan merupakan isu dalam keamanan pangan, terutama untuk produk PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Penggunaan bahan berbahaya dalam pangan, contohnya penambahan formalin pada produk perikanan, sedangkan untuk bahan yang tidak diizinkan pada pangan contohnya penggunaan bahan kimia obat (BKO) pada produk kopi.
6. Potensi terhadap target konsumen tertentu Potensi terhadap konsumen tertentu dimaksudkan pada produk PIRT yang dikonsumsi untuk kalangan usia yang rentan, contohnya untuk produk dalam kategori pangan gula, kembang gula/ permen dan coklat seringkali dikonsumsi oleh konsumen anak-anak.

Selama TW I, telah dilakukan sampling pangan PIRT berbasis risiko sebanyak 11 sampel dan sebanyak 22 sampel (termasuk sampel dari Loka Aceh Tengah dan Aceh Selatan)

yang masuk ke laboratorium untuk diuji sesuai parameter uji pada Pedoman Sampling dan telah dilaporkan ke pusat dan ditindak lanjuti sesuai ketentuan dengan persentase 88,18% dari target 85%. Capaian Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 103,74% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 19. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.18	103.74 	Tercapai/ Melampaui

Realisasi Indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2025 dengan kategori Sangat Baik. Pemenuhan setiap tahapan untuk pencapaian indikator ini harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang efektif. Untuk itu perlu komitmen dan strategi yang lebih baik lagi agar Balai Besar POM di Banda Aceh mampu mempertahankan dan memenuhi target 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk TW I. Target awal DIPA untuk sampel PIRT berisiko adalah sebanyak 28 sampel. Selama TW I sebanyak 11 sampel pangan olahan telah di sampling dan merupakan target efisiensi anggaran dengan target sebanyak 11 sampel. Seluruh sampel yang disampling dilakukan pemeriksaan

terkait kondisi produk, penandaan label, nomor izin edar, dan kedaluarsa untuk menentukan apakah sampel dapat diteruskan ke laboratorium pengujian ataupun tidak. Sampel yang disampling selama TW I sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang disusun pada awal tahun, dan adanya efisiensi pada bulan Februari dan Maret, sudah tidak lagi dilakukan sampling produk PIRT karena sudah memenuhi target rencana sampling efisiensi. Sampling produk PIRT yang dilakukan tidak terbatas pada produk PIRT yang diproduksi dari wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh, tetapi juga produk PIRT dari wilayah lain yang banyak beredar di wilayah Balai Besar POM di Banda Aceh. Sampling yang dilakukan selama TW I masih terbatas pada wilayah kota Banda Aceh dikarenakan terdapat efisiensi anggaran sehingga tidak ada perjalanan dinas keluar kota untuk pengadaan sampling.

Untuk kesesuaian parameter uji pada TW I sampel PIRT, hanya terdapat 1 sampel yang tidak bisa uji lengkap, yaitu sampel kopi karena parameter uji Okratoksin tidak dapat dipenuhi disebabkan baku yang belum tersedia. Selain itu timeline pelaporan pengujian juga belum bisa terpenuhi dikarenakan sampel PIRT diterima laboratorium tanggal 30 Januari, namun karena terdapat kendala pada SIPT pada kategori sampel PIRT saat itu sehingga pembuatan SPK baru dapat dilakukan melalui SIPT pada tanggal 13 Februari, sehingga sampel belum dapat diselesaikan tanggal 15 Februari. Namun semua sampel PIRT dapat diselesaikan dibawah 20 HK, sehingga untuk timeline pengujian masih dapat terpenuhi.

Terdapat 1 sampel yang tidak uji lengkap jadi untuk ketepatan pengambilan kesimpulan hanya 10 dari 11 sampel yaitu 90,9 % yang terpenuhi. Untuk kedepannya akan dilakukan koordinasi untuk percepatan pengadaan baku dan reagen yang sudah tidak tersedia agar tidak terjadi lagi parameter uji wajib yang tidak dapat dilakukan.

Selama TW I tidak terdapat sampel yang Tidak Memenuhi Syarat dari hasil pengujian parameter kimia maupun parameter mikro. Koordinasi dengan lintas sektor khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan juga telah dilakukan dengan memberi informasi terkait sampel PIRT yang telah disampling oleh Balai Besar POM di Banda Aceh agar

tidak dilakukan sampling ulang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mendapat dana untuk sampling dan uji produk PIRT.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

1. Perencanaan dan pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Pedoman Sampling. Penyesuaian target sampling juga dilakukan akibat dampak adanya efisiensi anggaran pada TW I.
2. Penetapan waktu sampling, dimana sampel sudah harus masuk ke Laboratorium maksimal 5 hari kerja terhitung dari waktu sampling dilakukan oleh petugas.
3. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait hasil uji sampel yang telah selesai dilakukan pengujian untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan
4. Monitoring dan evaluasi terkait kompetensi penguji, sehingga kesalahan hasil uji dapat dihindari dan ketepatan waktu uji juga dapat dipenuhi
5. Monitoring dan evaluasi terkait kondisi instrumen laboratorium seperti HPLC, ICP OES, ELISA Reader, Spektrofotometer, dll, baik kalibrasi/verifikasi alat maupun suku cadang dan spare part yang harus diganti serta pemeliharaan alat
6. Monitoring dan evaluasi pengadaan reagen dan baku pengujian, terutama untuk yang pengadaannya inden dengan waktu tertentu seperti baku Aflatoksin, Okratoksin, Deoksivalenol, dan lain-lain.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 20. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22.755.000	1.629.369	7.16	103.74	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi

anggaran sebesar 7.16% merupakan realisasi berdasarkan anggaran efisiensi dan untuk belanja pengadaan sampel. Dengan demikian anggaran tahun 2025 sudah mendukung pencapaian indikator Persentase PIRT yang berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan penggunaan anggaran akan lebih dioptimalkan lagi realisasi pada TW berikutnya.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Sampel PIRT yang telah dilakukan sampling dan pengujian selama TW I tidak terdapat sampel yang Tidak Memenuhi Syarat karena tidak memiliki izin edar, rusak, kedaluarsa maupun dari hasil uji dengan parameter kimia dan mikro. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan sarana produksi PIRT akan terus dilakukan agar produk-produk PIRT yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang aman dan bermutu.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait sampling dan pengujian produk PIRT pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh terutama berhubungan dengan operasional baik mengenai sarana prasarana, perencanaan, maupun pelaporan secara terpadu melalui SIPT. Risiko yang teridentifikasi telah dimitigasi dengan efektif sehingga dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat tercapai dan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 21. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	75.96	101.28 	Sangat Baik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus:

$$(A + B) / 2$$
$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$
$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha (badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan) dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penertiban keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Selama triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan lintas sektor sebanyak 30 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan sebanyak 23 pelaku usaha dan lintas sektor yang memberikan respon tindak lanjut/feedback. Capaian Persentase

keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 101.28% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 22. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi TW II 2024 (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3	75.96	91.18 	Akan Tercapai

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan I tahun 2025 belum mencapai target tahun 2025. Harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang efektif untuk pemenuhan pencapaian indikator ini. Perlu upaya komitmen dan strategi yang lebih baik agar Balai Besar POM di Banda Aceh mampu memenuhi target tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian indikator kinerja persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sudah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I. Stakeholder atau pemangku

kepentingan yang dimaksud pada indikator ini terdiri dari pelaku usaha dan lintas sektor. Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi sarana distribusi obat, pelayanan kefarmasian, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, produksi dan distribusi pangan olahan. Selama triwulan I jumlah surat yang dikirimkan ke sarana sediaan farmasi dan pangan olahan sebanyak 26 surat (komoditi obat 12 surat; obat tradisional dan suplemen kesehatan 1 surat; kosmetik 11 surat; produksi pangan olahan 2 surat) dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 20 surat (komoditi obat 8 surat; obat tradisional dan suplemen kesehatan 1 surat; kosmetik 10 surat; produksi pangan olahan 1 surat). Beberapa pelaku usaha tidak dapat dihubungi pada saat menyampaikan surat tindak lanjut dan kurangnya pemahaman pelaku usaha dan penanggung jawab dalam membuat CAPA sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menindaklanjuti permintaan CAPA. Upaya yang akan dilakukan yaitu dengan menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara intensif dengan cara menghubungi melalui WA. Pada sarana produksi, komunikasi aktif akan terus dilakukan petugas dengan pelaku usaha agar dapat mengetahui kendala dan kemajuan pembuatan CAPA serta memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi whatsapp dan telepon maupun tatap muka langsung ke kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.

Monitoring terkait pembuatan CAPA kepada setiap APJ sarana yang mendapatkan surat TL melalui WA, telepon maupun email setelah 1 minggu surat diterima sarana. Keputusan hasil inspeksi sarana distribusi makanan, kosmetika dan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan dilakukan pembuatan penyelesaian CAPA di sarana langsung dengan melengkapi dokumen tindak lanjut dengan BA Pemusnahan, BA Serah Terima, Surat Pernyataan dan Lembaran Penilaian CAPA. Sehingga capaian persentase keputusan hasil inspeksi untuk sarana distribusi ini bisa diupayakan dengan optimal. Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor selama triwulan I sebanyak 3 surat yang ditindaklanjuti dari total 4 surat yang dikirim oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh kepada instansi terkait sarana sediaan farmasi komoditi obat. Pimpinan instansi terkait lama memberikan respon terhadap surat tindak lanjut yang dikirim. Untuk

dapat terus meningkatkan serta mempertahankan capaian terhadap indikator ini petugas akan melakukan komunikasi aktif dan intensif dengan lintas sektor/instansi terkait baik kepada pimpinan maupun tim teknis secara formal maupun informal agar capaian indikator ini tercapai dan meningkat.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah:

- Pendampingan pembuatan CAPA pelaku usaha secara intensif komunikasi melalui Whatsapp dan telepon maupun tatap muka langsung ke kantor Balai Besar POM di Banda Aceh.
- Monitoring dan evaluasi oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh terhadap rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha apakah sudah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atau tidak sesuai timeline yang diberikan melalui menghubungi atau mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut.
- Advokasi dan koordinasi berkesinambungan kepada lintas sektor secara intensif baik kepada pimpinan atau tim teknis untuk meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan terkait hasil pengawasan sarana maupun produk di kabupaten/kota terkait.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 23. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	101.637.500	200.000	0.20	101.28	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran sebesar 0.20% merupakan realisasi berdasarkan anggaran efisiensi yang berlaku selama triwulan I. Dengan demikian anggaran tahun 2025 sudah mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, penggunaan anggaran akan lebih dioptimalkan lagi realisasi pada TW berikutnya.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2025, pencapaian indikator ini telah tercapai sesuai target, capaian ini ditingkatkan dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi surat tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti pelaku usaha dan lintas sektor dengan melakukan komunikasi aktif untuk meminta respon yang ditindaklanjuti secara administratif. Dengan meningkatnya capaian indikator ini merupakan perwujudan dari kepatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi, demikian juga dengan lintas sektor, dengan koordinasi yang baik diharapkan kedepannya semakin aktif dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Komunikasi aktif pelaku usaha dan koordinasi dengan lintas sektor yang semakin baik diharapkan tetap dapat dipertahankan agar Indikator ini tetap dapat dicapai pada akhir tahun 2025.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian kinerja indikator ini telah mencapai target dengan kategori baik sebesar 101.28%, yang mana mencerminkan bahwa risiko - risiko yang ada pada indikator ini telah dikendalikan dengan efektif. Faktor risiko eksternal terkait kurangnya kepatuhan pelaku usaha menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan telah dikendalikan dengan memberikan sanksi yang lebih tegas, kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam menindaklanjuti CAPA dikendalikan dengan pemberian bimbingan pembuatan CAPA, serta peran petugas yang aktif dalam melakukan monitoring pelaku usaha dan lintas sektor yang belum menindaklanjuti rekomendasi telah dimitigasi dengan baik. Kemungkinan risiko ini akan muncul kedepannya tetaplah ada, walaupun demikian,

berbagai strategi dan upaya pengendalian yang lebih efektif juga akan dilakukan agar resiko - resiko akibat kurangnya kepatuhan pelaku usaha dan stakeholder dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan dapat diminimalisir.

7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 24. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53 	Sangat Baik

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan terdiri dari perhitungan:

$$= \frac{\% \text{ Sarprod Obat} + \% \text{ Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan} + \% \text{ Sarprod Kosmetik}}{3}$$

Beberapa kategori dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Persentase Sarana produksi Obat = $A+B+C / 3$

Keterangan :

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan}}{\text{Jumlah sasaran dan cakupan target renlak}} \times 100\%$$

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun}}{\text{Jumlah target tahunan}} \times 100\%$$

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut

= rata-rata persentase sub aspek 1-6

- 1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
- 2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
- 3) Kesesuaian format laporan inspeksi
- 4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT

- 5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
- 6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Persentase Sarprod OBA dan SK = $A+B+C+D / 4$

Keterangan:

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

Persentase Sarprod Kosmetik = $A+B+C+D / 4$

Keterangan:

A. Pelaksanaan inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{Jumlah target sesuai Renlak}} \times 100\%$$

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat

$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{Jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Sarana produksi (sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi sarana produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit); Sarana produksi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yaitu yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), industri suplemen kesehatan; dan Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Proses diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang baik dan konsisten dilakukan sehingga menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Selama triwulan I tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada sarana produksi kosmetik sebanyak 2 sarana. Semua sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Persentase realisasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sebesar 100% dari target 93%. Dengan demikian capaian persentase pada indikator ini di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target yaitu 107.53 dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 25. Perbandingan Realisasi Kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53 	Tercapai / Melampaui

Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I tahun 2025 sudah mencapai target renstra tahun 2025 dengan kriteria tercapai/melampaui. Walaupun demikian masih diperlukan upaya untuk mempertahankan realisasi agar target tahun 2025 tetap tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan untuk triwulan I. Sarana produksi sediaan farmasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam dan kosmetik. Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/ laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa. Selama triwulan I tahun 2025, target sarana produksi sediaan farmasi yang dilaksanakan merupakan target sarana efisiensi, sehingga sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa hanya sarana kosmetik sebanyak 2 sarana yang telah dilaporkan melalui pelaporan terpadu SIPT. Sarana produksi kosmetik yang diperiksa merupakan sarana

yang terletak di Banda Aceh disebabkan dampak efisiensi yang tidak dilakukan perjalanan dinas ke luar kota/kabupaten wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetik yaitu terdapat 1 sarana dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan. Sarana Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan adanya temuan berupa produk kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM yang sudah didistribusikan kepada masyarakat. Hasil pemeriksaan juga telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pedoman pengawasan sarana produksi obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetika yaitu Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika dimana untuk sarana TMK diberikan sanksi administratif berupa Peringatan dan untuk sarana MK diberikan pembinaan teknis berupa surat perbaikan untuk melakukan perbaikan hasil Temuan inspeksi. Pemberian tindak lanjut sesuai pedoman kepada pelaku usaha produksi kosmetik ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta pemenuhan penerapan cara produksi kosmetik yang baik secara konsisten dilakukan untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama TW I yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko dan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
2. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 26. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	53.335.000	800.000	1.50	107.53	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Selama TW I masih berlaku masa efisiensi sehingga realisasi anggaran masih sedikit namun capaian indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tetap tercapai.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim TW I tahun 2025, pencapaian indikator persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target dengan capaian 107.53%. Seluruh tahapan terkait pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetik TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA oleh pelaku usaha. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi/dikendalikan secara efektif. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang

memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi akan semakin menantang. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 27. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00			

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD dan juga izin edar IRTP. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu pelaporan
2. Ketepatan tindak lanjut termasuk koordinasi dengan
3. Kesesuaian grading

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Selama TW I, telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi sebanyak 2 sarana pangan olahan MD yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko. Semua sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, tetapi belum dilakukan perhitungan karena pengukuran capaian kinerja untuk indikator ini belum ditetapkan oleh unit pengampu Deputy III dan Biro Perencanaan, sehingga untuk TW I ini belum dapat dilakukan perhitungan pasti untuk capaian kinerja indikator persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, walaupun target untuk TW I telah ditetapkan sebesar 85% dan merupakan target tahunan dengan target flat tiap bulannya.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 28. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85			

Realisasi persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan TW I tahun 2025 belum dapat ditetapkan secara pasti 2025 menunggu ketetapan unit pengampu dan biro perencanaan untuk pencapaian indikator ini. Walaupun demikian, sarana produksi pangan olahan yang

telah diperiksa selama TW I telah ditindaklanjuti dan dilaporkan tepat waktu sesuai dengan pedoman pemeriksaan pangan olahan agar realisasi kedepannya dapat mencapai target tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan untuk TW I. Target sarana produksi pangan olahan yang dilaksanakan selama TW I merupakan target sarana efisiensi, dimana target semula untuk setahun sebanyak 44 sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dikurangi menjadi 12 sarana yang direncanakan sesuai anggaran efisiensi. Pemilihan target sarana produksi pangan olahan berdasarkan riwayat hasil pemeriksaan sarana sebelumnya terutama sarana yang Hasil pemeriksaan dari 2 sarana yang diperiksa yaitu 1 sarana produksi Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), sarana yang belum pernah diperiksa, dan juga sarana yang diperoleh informasi terkait aktivitas sarana produksi pangan olahan baik tutup, pindah alamat, hasil uji TMS ataupun pengaduan masyarakat. Selama TW I dari 12 target sarana produksi baru dilakukan pemeriksaan sebanyak 2 sarana produksi pangan olahan MD yang telah dilaporkan melalui pelaporan terpadu SIPT dengan tepat waktu yaitu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya sesuai dengan Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022. Hasil pemeriksaan dari 2 sarana yang diperiksa yaitu 1 sarana produksi pangan olahan air minum dalam kemasan (AMDK) dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana produksi minuman jelly dengan hasil pemeriksaan Memenuhi Ketentuan (MK). Hasil pemeriksaan juga telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pedoman pengawasan sarana produksi pangan olahan yaitu Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dimana untuk sarana TMK dengan rating C/D diberikan sanksi administratif berupa Peringatan, dan untuk sarana MK dengan

rating B diberikan tindak lanjut berupa permintaan CAPA hasil pemeriksaan. Pemberian tindak lanjut sesuai pedoman kepada pelaku usaha produksi pangan olahan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta pemenuhan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik secara konsisten dilakukan untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama TW I yang menunjang pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko dan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
2. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.
3. Peningkatan kompetensi petugas pemeriksaan sarana produksi pangan olahan baik secara mandiri melalui Ideas dan terpadu oleh pusat yaitu pelatihan Food Inspector Dasar di TW I.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 29. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.333.750	200.000	1.50	-	-

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa telah terdapat realisasi anggaran sebesar 1,50% dari anggaran yang tersedia yang mana sebanyak 2 sarana produksi pangan

olahan telah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tingkat efisiensi terhadap penggunaan anggaran belum dapat ditetapkan karena capaian indikator ini belum ada ketetapan terkait perhitungan pada manual iku dari unit pengampu dan Biro Perencanaan. Ketersediaan sumber daya sangat diperlukan dalam pencapaian indikator ini dan akan dioptimalkan penggunaan anggaran tersebut secara efisien untuk mencapai target yang ditetapkan.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti telah belum dapat ditetapkan realisasi terhadap target yang ditetapkan. Walaupun demikian, seluruh tahapan proses terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA oleh pelaku usaha. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi / dikendalikan secara efektif. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan akan semakin menantang, pelaku usaha UMK semakin banyak yang memproduksi produk risiko rendah dengan kemudahan pengurusan izin edar OSS RBA berupa evaluasi dokumen dan audit lapangan dilakukan satu tahun setelah izin terbit akan menjadi tantangan kembali untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam memproduksi pangan olahan yang aman dan bermutu. Risiko - risiko lain yang

mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 30. Realisasi Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75			

Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus =

$$(A+B+C)/3$$

Keterangan:

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Pemenuhan Target Pemeriksaan (a)} + \text{Kesesuaian Tindakanlanjutan (b)}}{2} \times 100\%$$

a) Pemenuhan target pemeriksaan ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh UPT dengan rumus (A/B) dimana A merupakan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100% dan B merupakan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan

obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan.

- b) Kesesuaian Tindak Lanjut, kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan, diperoleh dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d)/4$$

Keterangan:

- Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$
- Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$
- Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$
- Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
$$= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= (a+b+c+d)/4$$

Keterangan:

- Pelaksanaan inspeksi
$$= \frac{\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana}}{\text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}} \times 100\%$$
- Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
$$= \frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi

$$= \frac{\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai}}{\text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}} \times 100\%$$

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana

$$= \frac{\text{Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh tindak lanjut}} \times 100\%$$

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Sarana distribusi sediaan farmasi yang diperiksa Balai Besar POM di Banda Aceh meliputi sarana distribusi obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, kosmetik, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik,

puskesmas, toko obat berizin). Pemilihan sarana fasilitas distribusi sediaan farmasi yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa.

Selama triwulan I, telah dilakukan pemeriksaan fasilitas distribusi sediaan farmasi sebanyak 47 sarana yang ditetapkan berdasarkan analisis kajian risiko. Semua sarana yang diperiksa telah dilaporkan tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, tetapi belum dilakukan perhitungan karena pengukuran capaian kinerja untuk indikator ini belum ditetapkan oleh unit pengampu Deputi III dan Biro Perencanaan, sehingga untuk TW I ini belum dapat dilakukan perhitungan pasti untuk capaian kinerja indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, walaupun target untuk TW I telah ditetapkan sebesar 96.75% dan merupakan target tahunan dengan target flat tiap bulannya.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 31. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75			

Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan I belum dapat ditetapkan secara pasti tahun 2025, masih menunggu ketetapan dari unit pengampu dan biro perencanaan untuk pencapaian

indikator ini. Walau demikian petugas Balai Besar POM di Banda Aceh akan selalu melakukan peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif sehingga indikator persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti dan dilaporkan tepat waktu ini dapat dicapai hingga kinerja akhir tahun 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan untuk triwulan I dengan kriteria sangat baik. Selama triwulan I tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi sebanyak 47 sarana. Lokasi pemeriksaan selama triwulan I umumnya berada di daerah kota Banda Aceh dan Target selama TW I merupakan target sarana berdasarkan efisiensi anggaran. Pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian terdiri atas pemeriksaan pada PBF sebanyak 1 sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan, pemeriksaan pada apotek sebanyak 6 sarana dengan hasil 5 sarana Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, pemeriksaan pada toko obat sebanyak 2 sarana dengan hasil Memenuhi Ketentuan, pemeriksaan pada Instalasi Farmasi Provinsi/Kabupaten/Kota sebanyak 1 sarana yaitu Instalasi Farmasi Kota Banda Aceh dengan hasil sarana Memenuhi Ketentuan, pemeriksaan pada rumah sakit sebanyak 2 sarana dengan hasil 1 sarana Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, pemeriksaan pada puskesmas sebanyak 3 sarana dengan hasil sarana Memenuhi Ketentuan dan pemeriksaan pada klinik sebanyak 3 sarana dengan hasil sarana Memenuhi Ketentuan. Sarana distribusi obat dan saryanfar yang tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana apotek dan rumah sakit, masih terdapat apotek maupun rumah sakit yang melakukan pengelolaan obat tidak sesuai ketentuan yang berlaku seperti pengelolaan obat narkotika dan psikotropika yang tidak baik, penyaluran yang tidak tertelusur, pengelolaan produk CCP yang tidak baik dan faktor mayor dan kritis yang dapat menurunkan mutu produk.

Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dan kosmetik selama triwulan I telah dilakukan terhadap 29 sarana dengan hasil 17 sarana Memenuhi Ketentuan dan 12 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemeriksaan pada sarana obat tradisional sebanyak 3 sarana dengan hasil 2 sarana Memenuhi Ketentuan dan 1 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan, pemeriksaan pada sarana distribusi kosmetik sebanyak 26 sarana dengan 11 sarana Memenuhi Ketentuan dan 15 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Sarana distribusi yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan yaitu sarana distribusi kosmetik disebabkan masih banyaknya produk - produk tanpa izin edar karena tren kosmetik kekinian dan produk tanpa izin edar dari luar negeri, dan juga bertambahnya sarana-sarana distribusi baru yang belum pernah mendapat pembinaan dari Balai Besar POM di Banda Aceh.

Selama triwulan I seluruh sarana yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan pemeriksaan sarana. Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan sanksi administratif dan akan menjadi prioritas target pengawasan untuk dipantau kembali kepatuhan pelaku usaha pada rencana pemeriksaan tahun berikutnya.

Capaian indikator ini sudah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dengan kategori sangat baik capaian sebesar 103.36%. Walaupun demikian, masih sangat diperlukan berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Komitmen, kekompakan, kompetensi dan kepatuhan dari petugas, monitoring serta evaluasi yang ketat dari ketua tim kerja sangat memegang peranan dalam pencapaian indikator ini.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan atau peningkatan kinerja indikator ini antara lain:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan target pemeriksaan sarana berdasarkan analisis resiko dan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.

2. Monitoring dan evaluasi oleh ketua tim terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan terkait waktu pelaporan sesuai timeline dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 32. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	341.019.500	12.372.605	3.63	-	-

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa telah terdapat realisasi anggaran sebesar 3.63% dari anggaran yang tersedia. Tingkat efisiensi terhadap penggunaan anggaran belum dapat ditetapkan karena capaian indikator ini belum ada ketetapan terkait perhitungan pada manual iku dari unit pengampu dan Biro Perencanaan. Ketersediaan sumber daya sangat diperlukan dalam pencapaian indikator ini dan akan dioptimalkan penggunaan anggaran tersebut secara efisien untuk mencapai target yang ditetapkan.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian indikator kinerja ini tercapai sebesar 103.36%, dengan demikian seluruh proses terkait pemeriksaan distribusi fasilitas sediaan farmasi sudah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan sarana distribusi fasilitas sediaan farmasi TMK berupa tindak lanjut sanksi administratif Peringatan perlu dimonitoring tindak lanjut CAPA dari pelaku usaha oleh petugas Balai Besar POM di Banda Aceh. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tindak lanjut dan monitoring terhadap hasil pemeriksaan sarana perlu dilakukan secara efektif serta didukung dengan komitmen yang kuat dari petugas sehingga capaian indikator ini tetap dapat dicapai.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian indikator kinerja ini baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah dimitigasi / dikendalikan secara efektif. Seperti adanya penolakan oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan melakukan komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. Pemberian tindak lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko Fraud/penyalahgunaan wewenang seperti gratifikasi juga telah dimitigasi dengan menghindari petugas yang memiliki benturan kepentingan melakukan pemeriksaan, penandatanganan pakta integritas serta pemberian sanksi tegas apabila terbukti terjadi fraud. Walaupun demikian, tantangan untuk tahun kedepannya terkait pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi akan semakin menantang. Risiko - risiko lain yang mungkin muncul pada indikator ini akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 33. Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I(%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65 	Tidak dapat disimpulkan

Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$A + B + C$$

Keterangan:

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa.
2. Ketepatan waktu pelaporan.
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana).

Pemilihan sarana distribusi pangan olahan yang akan dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana distribusi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/laporan dari pihak luar, sarana yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana baru yang belum pernah diperiksa. Sarana distribusi pangan olahan yang menjadi target pengawasan yaitu sarana retail modern, sarana retail tradisional, dan distributor pangan, sedangkan untuk sarana importir pangan belum menjadi target pemeriksaan karena tidak ada importir pangan aktif di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

Selama TW I, telah dilakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sebanyak 11 sarana dari target 11 sarana untuk TW I dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pedoman pengawasan peredaran pangan olahan sehingga realisasi TW I sebesar 100% dari target 85%. Dengan demikian capaian persentase sarana distribusi

pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 117,65% dengan kategori **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 34. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65 	Tercapai/Melampaui

Realisasi persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target tahun 2025 yaitu dengan kategori tercapai/Melampaui. Balai Besar POM di Banda Aceh akan selalu melakukan peningkatan strategi dalam pengawasan yang lebih efektif agar target tahun 2025 ini dapat dicapai hingga kinerja akhir tahun.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Selama TW I tahun 2025, pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan telah dilakukan sebanyak 11 sarana dengan rincian 8 sarana distribus retail tradisional, 2 sarana retail modern dan 1 sarana distributor pangan olahan. Dari 11 sarana yang diperiksa terdapat 9 sarana Memenuhi Ketentuan dan 2 sarana distribusi pangan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Sarana yang TMK yaitu 1 sarana distribusi pangan retail tradisional dan 1 sarana retail modern. Target selama TW I merupakan target sarana berdasarkan efisiensi anggaran dimana target awal sebanyak 107 sarana

direvisi menjadi 32 sarana setelah efisiensi dan telah diperiksa sebanyak 11 sarana di TW I. Seluruh sarana yang diperiksa ini telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan pemeriksaan sarana. Sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan sanksi administratif dan akan menjadi prioritas target pengawasan untuk dipantau kembali kepatuhan pelaku usaha pada rencana pemeriksaan tahun berikutnya.

Capaian indikator ini sudah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dengan kategori tidak dapat disimpulkan dengan capaian sebesar 117.65%, hal ini karena seluruh tahapan penilaian untuk perhitungan indikator ini telah terpenuhi dengan maksimal sehingga realisasi menjadi 100% dari target sebesar 85%. Walaupun demikian, masih sangat diperlukan berbagai upaya untuk tetap dapat mempertahankan capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Komitmen, kekompakan, kompetensi dan kepatuhan dari petugas, monitoring serta evaluasi yang ketat dari ketua tim kerja sangat memegang peranan dalam pencapaian indikator ini.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja indikator ini antara lain:

- Peningkatan kompetensi petugas pengawas pangan olahan berupa Pelatihan Inspektur Pangan yang diadakan oleh pusat maupun pembelajaran mandiri melalui aplikasi IDEAS.
- Komitmen petugas pengawas sarana distribusi pangan olahan untuk melakukan pemeriksaan sarana sesuai ketentuan, menindaklanjuti dan melaporkan tepat waktu sesuai timeline.
- Monitoring dan evaluasi ketua tim kerja terkait rencana pelaksanaan, ketepatan tindak lanjut dan pelaporan tepat waktu timeline.
- Pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan yang berlaku terkait distribusi obat dan makanan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 35. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	341.019.500	12.372.605	3.63	117.65	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh informasi bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran selama TW I ini baru sekitar 3,63%, yang mana anggaran yang tersedia adalah anggaran efisiensi. Untuk mendukung pencapaian indikator ini pada TW selanjutnya, akan dioptimalkan penggunaan sumber daya anggaran agar target persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tetap dapat dicapai.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian indikator ini telah melampaui target untuk TW I dengan capaian sebesar 117.65%. Walaupun sudah mencapai target tahun 2025, tetapi tantangan untuk pemenuhan ketentuan terhadap pencapaian indikator ini tetap harus selalu dilakukan monitoring dan evaluasi yang ketat. Pembinaan berkelanjutan kepada pelaku usaha distribusi pangan olahan juga sangat diperlukan, dan pemberian tindak lanjut sesuai ketentuan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan. Untuk itu masih sangat diperlukan berbagai upaya yang untuk mempertahankan capaian ini dengan tetap rutin melakukan monitoring evaluasi serta komitmen dari petugas dalam melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan sesuai ketentuan.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian pada indikator Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai untuk target TW I tahun 2025 dengan

kategori sangat baik. Berbagai risiko yang mungkin muncul dan risiko yang juga telah terjadi dapat dikendalikan dengan efektif. Seperti adanya penolakan oleh pelaku usaha saat petugas melakukan pemeriksaan telah dikendalikan dengan melakukan komunikasi persuasif kepada pelaku usaha, peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek teknis untuk meminimalisir risiko terkait operasional. Risiko fraud seperti adanya penyalahgunaan wewenang/jabatan serta gratifikasi telah dimitigasi dengan sosialisasi sanksi yang akan diterima apabila risiko fraud terjadi. Pemberian tindak lanjut yang lebih tegas juga dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha yang merupakan faktor eksternal penyebab risiko. Risiko-risiko yang menghambat pencapaian indikator ini telah dimitigasi dan akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih sesuai dan relevan untuk kondisi yang akan datang.

11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 36. Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	100	116.55 	Tidak dapat disimpulkan

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan rumus = $(A+B+C+D+E)/5$

Keterangan:

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

$$= \frac{a+b}{2}$$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (a+b+c)/3$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (a+b+c)/3$$

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$$

c. Akurasi pengambilan keputusan

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai}}{\text{Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}} \times 100\%$$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

$$= (a+b) / 2$$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$= \frac{\text{Jumlah \% capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target}}{\text{Jumlah media (4)}} \times 100\%$$

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target

$$= \frac{\text{Capaian jumlah iklan per media}}{\text{Jumlah target per media}} \times 100\%$$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu

$$= \frac{\% \text{ rerata capaian evaluasi dan verifikasi Operator UPT} + \% \text{ rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}}{2}$$

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang dievaluasi}} \times 100\%$$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang diawasi}}{\text{Jumlah target iklan sesuai renlak}} \times 40\%$$

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling

$$= \frac{(\text{Jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi})}{\text{Proporsi target media}} \times 20\%$$

c. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah iklan yang diawasi}} \times 40\%$$

Poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100% Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait. Selama triwulan I, telah dilakukan pengawasan terhadap iklan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan total sebanyak 222 iklan yang diawasi sesuai pedoman dan dilaporkan melalui SIPT tepat waktu. Iklan sediaan farmasi yang diawasi terdiri dari iklan obat sebanyak 39, iklan kosmetik sebanyak 87, iklan Obat Bahan Alam sebanyak 23, iklan Suplemen Kesehatan sebanyak 4 dan iklan pangan olahan sebanyak 69 iklan. Capaian persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I sebesar 116.55% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 37. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi 2025	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	100	116.55 ▲	Tercapai/ Melampaui

Perbandingan realisasi kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan selama triwulan I terhadap target tahun 2025 sebesar 100% sudah melampaui target renstra 2025 yaitu 86.8%. Capaian indikator kinerja ini sebesar 116.55% dengan kategori tercapai/melampaui. Berdasarkan capaian ini, dengan rencana kerja yang baik, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis dapat memenuhi target Renstra 2025.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan sudah mencapai target yang ditetapkan pada triwulan I. Seluruh iklan yang diawasi pada triwulan I dilakukan sesuai dengan perencanaan iklan yang sudah diatur dengan kategori media dan pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman komoditi masing-masing dan dilaporkan melalui SIPT.

Iklan komoditi obat yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama triwulan I sebanyak 39 iklan dengan persentase 100%. Pengawasan iklan obat membutuhkan waktu yang ketelitian petugas untuk mencari database yang sesuai di SIAPik sehingga iklan yang dilaporkan sesuai. Iklan komoditi Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama triwulan I sebanyak 23 iklan dari target 24 iklan. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak maupun media penyiaran yaitu TV nasional. Bulan Februari dilaporkan sebanyak 11

iklan dari target 12 iklan. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk memenuhi kategori iklan media penyiaran khususnya media penyiaran lokal, umumnya iklan media pada penyiaran lokal merupakan iklan yang berulang, sehingga terjadi penurunan persentase tidak mencapai 100% iklan komoditi obat bahan alam yang diawasi sesuai ketentuan. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan komisi penyiaran daerah terkait iklan yang disiarkan pada media penyiaran lokal agar lebih beragam.

Iklan komoditi kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT selama triwulan 1 sebanyak 87 iklan dengan persentase 100%. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak, media luar ruang, media online dan media elektronik. Pengawasan iklan komoditi kosmetik pada media elektronik yaitu video TV membutuhkan waktu atau durasi yang panjang merekam iklan untuk mendapatkan iklan yang sesuai dengan kriteria target pengawasan. Perlu adanya satu alat atau perangkat yang digunakan untuk merekam iklan media elektronik dalam waktu yang lama.

Iklan komoditi suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama triwulan I sebanyak 4 iklan dengan persentase 100%. Kendala yang terjadi pada pengawasan iklan komoditi suplemen kesehatan sama dengan iklan komoditi obat bahan alam yaitu sulit untuk memenuhi kategori iklan media penyiaran khususnya media penyiaran lokal.

Iklan komoditi pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dan dilaporkan ke SIPT tepat waktu selama triwulan I sebanyak 69 iklan. Jumlah iklan yang diawasi sesuai dengan target perencanaan yang telah ditetapkan. Iklan yang diawasi berasal dari media cetak, media online, media penyiaran dan media luar ruang. Pada tanggal 18 bulan Februari diterbitkan Surat Edaran Mekanisme Pengawasan Iklan Pangan Olahan Tahun 2025 yang mewajibkan untuk mengawasi iklan dari setiap media pada setiap bulan. Iklan media luar ruang sulit ditemukan karena adanya efisiensi sehingga pengawasan iklan media luar ruang terbatas hanya di wilayah Kota Banda Aceh, sedangkan iklan media luar ruang yang tersedia di wilayah tersebut belum berganti. Selama triwulan I telah dilakukan penyesuaian target perencanaan pengawasan iklan sesuai ketentuan sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Komitmen dan keaktifan petugas Balai Besar POM di Banda Aceh dalam mengawasi iklan tidak terbatas pada saat jam dinas juga diperlukan sehingga target iklan yang ditetapkan

selalu tercapai tahun 2025.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target ini antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi aktif petugas dan ketua tim terkait pelaksanaan pengawasan iklan sesuai ketentuan.
2. Perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan yang sesuai dengan rencana yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal tahun.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 38. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	318.251.000	10.805.090	3.40	116.55	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa terdapat realisasi anggaran sebesar 3.40% dari anggaran yang tersedia. Penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Selama TW I masih berlaku masa efisiensi sehingga realisasi anggaran masih sedikit namun capaian indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan tetap tercapai.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan ini merupakan indikator baru pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025 - 2029, sehingga laporan kinerja interim

TW I ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada TW berikutnya mulai dari tahap penyusunan rencana target pengawasan iklan, pemenuhan target media iklan, kesesuaian penarikan kesimpulan dan ketepatan waktu pelaporan. Kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Risiko terkait persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

SASARAN KEGIATAN 2

Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran Kegiatan 2 dicapai dengan NSS 100 dengan kategori baik. Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan sesuai target.

Indikator Kinerja

12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan I

Table 39. Realisasi Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25.00	25.00	100.00 	Baik

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Selama TW I, telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sebanyak 1 sarana dari 4 sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi cakupan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Realisasi indikator ini diperoleh sebesar 25% dengan target 25% untuk TW I dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 40. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	25.00	33.00 	Perlu Upaya Keras

Realisasi persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum mencapai target tahun 2025 dengan kategori perlu upaya keras. Capaian realisasi terhadap target pada indikator ini bersifat akumulatif hingga akhir tahun 2025. Dengan demikian, Balai Besar POM di Banda Aceh tetap optimis target indikator ini akan dapat dicapai sesuai target pada akhir tahun 2025 dengan tetap mencapai target setiap triwulan hingga target akhir tahun tercapai sepenuhnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Cakupan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh berdasarkan data sarana produksi pangan fortifikasi terdaftar hingga tahun 2023 yaitu sebanyak 4 sarana produksi pangan fortifikasi yang memproduksi garam konsumsi beryodium. Untuk tahun 2025, target cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yaitu sebanyak 3 sarana dan target bersifat akumulatif hingga akhir tahun 2025. Selama TW I, telah dilakukan pemeriksaan 1 sarana produksi pangan fortifikasi garam konsumsi beryodium yang berlokasi di kota Banda Aceh. Hasil pemeriksaan yaitu sarana sudah tutup dan tidak melakukan produksi karena sarana produksi yang terdaftar merupakan sarana sewa dan sudah beralih fungsi menjadi rumah tinggal. Pemilik izin edar sudah tidak melakukan produksi dan tidak terdapat stok produk, sedangkan izin edar produk masih berlaku hingga 31 Agustus 2027. Sampling terhadap produk fortifikasi sebagaimana yang tertuang dalam manual indikator kinerja ini tidak dapat dilakukan

karena sudah tidak terdapat produk garam konsumsi beryodium untuk dilakukan sampling dan pengujian. Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi garam konsumsi beryodium ini tetap dilakukan dengan pembuatan Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dilaporkan melalui SIPT dengan tindak lanjut rekomendasi Pencabutan Izin Penerapan CPPOB dan Pencabutan Izin Edar an UKM Garam Get. Sebanyak 1 sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa ini sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan yang ditargetkan untuk TW I, sehingga realisasi pada TW I sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 sarana dengan persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 25% dengan hasil capaian terhadap target TW I adalah 100%.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang mendukung untuk pencapaian realisasi pada indikator kinerja ini antara lain:

- a. Perencanaan pelaksanaan pemeriksaan sarana pangan fortifikasi yang dilaksanakan dengan konsisten.
- b. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan sarana sesuai dengan ketentuan.
- c. Koordinasi dan komunikasi efektif antara seksi inspeksi dengan seksi sertifikasi terkait rekomendasi pencabutan IPCPOB dan NIE produk terhadap sarana produksi pangan fortifikasi yang sudah tidak memenuhi persyaratan.
- d. Pembinaan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi untuk selalu mematuhi peraturan terkait CPPOB.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 41. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	5.069.000	5.069.000	-	100	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator tercapai tetapi tidak terdapat realisasi anggaran. Hal ini disebabkan karena pada TW I terdapat efisiensi anggaran termasuk untuk indikator cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sehingga pelaksanaan pemeriksaan sarana pangan fortifikasi ini menggunakan anggaran pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Walaupun demikian, sumber daya yang tersedia untuk mencapai indikator ini tetap dioptimalkan dimana masih terdapat 2 sarana produksi pangan fortifikasi yang menjadi target pada triwulan selanjutnya sehingga capaian indikator cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru pada renstra 2025 - 2029, sehingga pemanfaatan laporan kinerja akan sangat diperlukan untuk melihat perkembangan capaian indikator ini selanjutnya. Sarana produksi pangan fortifikasi yang telah diperiksa pada TW I ini merupakan sarana yang direkomendasi untuk dicabut IP CPOB dan NIE produk, sehingga tidak akan masuk dalam target cakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi untuk tahun selanjutnya.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Capaian indikator persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah tercapai dengan baik sesuai target yang ditetapkan. Pengelolaan berbagai risiko yang muncul baik yang bersifat operasional, terkait sumber daya manusia, dan faktor eksternal (pelaku usaha) telah

dimitigasi / dikendalikan secara efektif. Risiko terkait adanya fraud/penyalahgunaan wewenang dan adanya gratifikasi juga telah dikendalikan secara efektif dengan membuat pakta integritas dan penerapan sanksi tegas bagi petugas yang terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran. Risiko - risiko baru yang mungkin muncul akan selalu diidentifikasi serta pengendalian yang telah dilakukan akan selalu dimonitoring keefektifannya apakah masih relevan dengan tindakan pengendalian yang telah ada atau diperlukan tindakan pengendalian yang lebih efektif kembali.

SASARAN KEGIATAN 3

Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 3 dicapai dengan NSS 101,69 dengan kategori sangat baik. Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan melampaui target.

Indikator Kinerja

13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 42. Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.00	72.2	101.69 	Sangat Baik

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM, yang dimaksud dengan

pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium dan Metoda Analisa yang Terverifikasi. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, komponen standar kemampuan laboratorium sebagai berikut:

- Standar Lingkup Pengujian 50%
- Standar Peralatan 20%
- Standar Kompetensi 20%
- Standar Metoda Terverifikasi 10%

Hasil penilaian terhadap komponen standar kemampuan laboratorium pada TW1 sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup 83.3%
- Standar Peralatan 80,3%
- Standar Kompetensi 50%
- Standar Metoda Terverifikasi 44.4%

Total capaian nilai SKL 72.2 %, target SKL TW 1 71%, nilai SKL terhadap target 101.6%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 43. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.00	72.2	98.90 	Akan Tercapai

Realisasi sebesar 72.2% dari target tahunan sebesar 73% dengan kategori Akan Tercapai, persentase capaian tahunan sebesar 98.90%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Terdapat kendala dalam pelaksanaan pengujian di TW I antara lain:

- Masalah terkait penambahan ruang lingkup, verifikasi metoda, peningkatan kompetensi penguji adalah tidak tersedianya bahan baku pembanding antara lain Sulbaktam, dan minimnya anggaran pembelian reagen, suku cadang dan sampel.
- Instrumen yang tidak dapat berfungsi karena perlu penggantian spare part.
- GC MS *Troube* pada window.
- HPLC Thermo penggantian spare part pump, dan auto sampler.
- Scanner HPTLC penggantian rotor.
- Minimnya anggaran pemeliharaan alat.

Rencana tindak lanjut terhadap kendala diatas:

- Penyesuaian rencana penambahan ruang lingkup, verifikasi metoda analisa, peningkatan kompetensi penguji sesuai dengan ketersediaan reagen, suku cadang dan sampel yang ada di laboratorium
- Koordinasi dengan pihak internal dan eksternal seperti dengan PPK dan vendor.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Verifikasi Metoda Analisa pada laboratorium Obat sebanyak (5) MA dan OBASKK sebanyak (3) MA.
- Pelatihan internal di laboratorium OBASKK dan Laboratorium Mikrobiologi.
- Pengadaan alat laboratorium pada laboratorium obat berupa Disolusi Tester, timbangan analitik.
- Pengadaan reagensia dan media mikrobiologi, alat gelas, suku cadang.
- Kalibrasi alat laboratorium.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 44. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator (%)	Tingkat Efisiensi
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2.992.448.000	639.988.844	21.39	101.69	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran efisien di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Realisasi anggaran sebesar 21.39% merupakan realisasi berdasarkan anggaran efisiensi. Anggaran tahun 2025 sudah mendukung pencapaian indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dan penggunaan anggaran akan lebih dioptimalkan lagi realisasi pada TW berikutnya.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai monitoring dan evaluasi capaian Balai Besar POM di Banda Aceh dan juga untuk melihat kendala yang dialami selama proses realisasi indikator kinerja. Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ini merupakan indikator yang terdapat pada Rencana Strategis Badan POM tahun 2025 - 2029, sehingga laporan kinerja interim TW I ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pencapaian indikator kinerja ini pada TW berikutnya mulai dari tahap penyusunan rencana target, pemenuhan target. Kontrol dari setiap proses tahapan pada indikator ini menjadi poin nilai yang sangat perlu diperhatikan agar indikator ini dapat selalu tercapai dengan kategori sangat baik.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium terdapat pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh dapat mengurangi dan mengatasi

kendala yang mungkin timbul sehingga indikator kinerja ini dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan. Pengelolaan risiko ini juga memberikan gambaran perencanaan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu pencapaian kinerja. Adapun Risiko terkait Indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium banyak terkait dengan operasional baik mengenai Sarana Prasarana Laboratorium, Perencanaan, maupun IT pelaporan, namun sampai saat ini masih dapat dikendalikan dengan efektif.

SASARAN KEGIATAN 4

Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 4 dicapai dengan NSS 110.89 dengan kategori Kinerja Sangat Baik. Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja. Indikator Kinerja jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, jumlah desa pangan aman dan jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas akan dimulai bulan April 2025.

Indikator Kinerja

14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 45. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	95.96	110.89 	Tidak dapat disimpulkan

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek

sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 46. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	95.96	110.89 	Melampaui/ Tercapai

Realisasi Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan triwulan I telah mencapai target Renstra tahun 2025 dengan target indeks 86.54 dan % capaian sebesar 110.89% dengan kategori “Tercapai/melampaui”. Hal ini menunjukkan masyarakat semakin peduli dan paham kegiatan KIE BPOM. Hal ini tidak lepas dari peran dan kontribusi seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait Obat dan Makanan aman, bermutu, berkhasiat dan berdaya saing.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai Tingkat Efektifitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh telah mencapai target pada triwulan I tahun 2025, hal ini disebabkan kegiatan KIE dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya yaitu KIE di warung kopi melalui inovasi Sanger Ureung Aceh yang berkolaborasi dengan SAKA POM, KIE untuk pencegahan stunting kepada ibu hamil KEK dan balita dan KIE untuk program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Untuk kegiatan KIE melalui media telah dilaksanakan dengan membuat konten-konten secara mandiri di media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh dan membuat inovasi Podcast Berbisik BPOM (Berbincang Asik Bersama BPOM). Podcast ini mengundang narasumber terpercaya dari luar dan narasumber Balai Besar POM di Banda Aceh dipandu oleh host dengan tema yang menarik setiap bulannya.

Analisis penyebab keberhasilan kinerja adalah:

1. Penilaian masyarakat atas pemahaman yang mereka peroleh dari konten informasi setelah mengikuti kegiatan KIE yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh semakin baik.
2. Banyaknya ragam media KIE yang pernah diikuti oleh responden membuat pengetahuan masyarakat semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat dari kegiatan KIE yang dilakukan.
3. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video, dan kuis sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.

4. Pelaksanaan KIE yang dilakukan secara langsung dan daring dalam bentuk webinar secara intensif.
5. Diseminasi produk informasi (leaflet, brosur, infografis, videografis, dll) kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat luas.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan indeks efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga triwulan I tahun 2025 pada Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh 95.96 (Sangat Efektif) dengan metode survey menggunakan kobotoolbox (17 pertanyaan survey). Metode ini tidak lagi memuat rincian indeks per indikator, namun berisi interpretasi efektivitas dengan 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Table 46. Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Analisis kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Peran dan kontribusi seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh dalam menyebarkan informasi/konten terkait Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berkhasiat kepada masyarakat luas sehingga jumlah *followers* media sosial bertambah.
2. Pengelolaan media sosial unit kerja perlu dilakukan lebih optimal dengan lebih banyak menghadirkan konten-konten edukasi disamping informasi kinerja. Konten materi KIE sebaiknya relevan dengan isu terkini serta mampu menjawab

kebutuhan informasi masyarakat dengan mempertimbangkan budaya dan bahasa setempat yang mudah dipahami.

3. Peningkatan indikator ragam kegiatan perlu terus dilakukan melalui terobosan dan inovasi KIE baik media sosial, non-media sosial maupun KIE secara langsung (tatap muka) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan informasi target audien. Ragam media yang digunakan memiliki pengaruh terhadap efektivitas KIE Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk ragam media KIE melalui webinar/daring secara langsung dan penyuluhan langsung (luring), hal ini memiliki kedekatan komunikasi dua arah antara Balai Besar POM di Banda Aceh dengan masyarakat, yaitu komunikasi yang terjadi sangat efektif, interaktif dan efisien, sehingga masyarakat mendapatkan informasi dan edukasi secara langsung atas pertanyaan atau permintaan informasinya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 47. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	272.181.000	13.920.851	5.11	110.89	Efisien

Dari hasil tabel di atas dengan realisasi pada 5.11% indikator dapat dicapai sebesar 110.89% namun tidak efisien.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang Obat dan Makanan, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini adalah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi

pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu pemberitaan terkait Kinerja KIE Obat dan makanan di berbagai media cetak/online, elektronik dan media sosial berkonotasi negatif. Penyebab resikonya adalah media tidak mendapatkan sumber informasi yang valid sehingga berdampak kepercayaan publik terhadap Balai Besar POM di Banda Aceh menurun dengan level resiko inheren 10. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah:

1. Menyebarluaskan informasi strategis BPOM kepada media dan masyarakat serta lebih terbuka.
2. Ragam Media KIE yang disampaikan dalam tools penilaian terlalu banyak atribut Pengendalian berupa Laporan Tingkat Efektifitas KIE per triwulan.

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 7. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 48. Realisasi Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi

kepada komunitas sekolah. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Sekolah Full Intervensi:

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah.
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

5. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 50. Bobot Progres Tahapan Program Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi (%)	% Capaian
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25 %	Jan - April	0 %	-
Sosialisasi Keamanan Pangan	20 %	Maret - Mei	0 %	-
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25 %	Maret - Mei	0 %	-
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25 %	Juni - Juli	0 %	-
Pengawasan	5 %	Feb - Des	0 %	-
Total Skor	100 %			

Pada tahun 2025 program PJAS ini telah masuk dalam tagging tematik Anggaran Responsif Gender (PUG). Pada triwulan I belum dapat diukur capaian realisasi untuk indikator jumlah sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan tahapan akan dilaksanakan di bulan April 2025.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 49. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan				

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025. Target jumlah sekolah yang akan diintervensi untuk melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tahun 2025 sebanyak 5 (lima) sekolah dengan lingkup SD dan SMP di wilayah Kota Banda Aceh. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun menyebabkan perubahan target jumlah sekolah yang diintervensi yang semula 10 (sepuluh) sekolah menjadi 5 (lima) sekolah dan dilaksanakan di dalam Kota Banda Aceh. Target ini akan tercapai di akhir tahun 2025 (tahapan program berlangsung mulai TW II - TW IV) dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I belum dapat diukur capaian realisasi untuk indikator jumlah sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan tahapan akan dilaksanakan di bulan April 2025 sehingga tidak dapat dianalisis keberhasilan/kegagalan kinerja. Tim Program Prioritas Nasional Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus memastikan tahapan dilaksanakan sesuai dengan alurnya dan berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan pembudayaan keamanan pangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan I belum dapat diukur capaian realisasi untuk indikator jumlah sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan tahapan akan dilaksanakan di bulan April 2025 sehingga tidak dapat dianalisis keberhasilan/kegagalan kinerja. Tim Program Prioritas Nasional Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus memastikan tahapan dilaksanakan sesuai dengan alurnya dan berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Cabang Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan pembudayaan keamanan pangan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 50. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	436.427.000	-	-	-	N/A

Kegiatan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan ini belum dapat diukur atas penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Desa Pangan Aman dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh, diharapkan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat berjalan dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip

keamanan pangan. Dengan demikian, semakin meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu sekolah yang diintervensi tidak komitmen dalam pelaksanaan program PJAS. Penyebab resikonya adalah pergantian atau mutasi kepala sekolah dan guru sebagai penanggungjawab kegiatan sehingga berdampak Program Prioritas Nasional PJAS tidak berjalan dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membentuk Tim Keamanan Pangan Sekolah.

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Tim Keamanan Sekolah
2. Laporan monitoring sekolah

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

16. Jumlah Desa Pangan Aman

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 51. Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi %	Capaian %	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman				

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama

dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrase dengan program lain).

Adapun tahapan, persentase progress, realisasi dan % capaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 54. Bobot Progres Tahapan Program Desa Pangan Aman

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal Pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi	% Capaian
Advokasi	25%	Februari – April	0 %	-
Pelatihan kader	25%	Maret-April	0 %	-
Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni	0 %	-
Monev	20%	Juli	0 %	-
Pengawasan	10%	Februari – November	0 %	-
Total Skor	100 %			

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 52. Perbandingan Realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Desa Pangan Aman				

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025. Target jumlah desa pangan aman yang akan diintervensi tahun 2025 sebanyak 1 (satu) desa dengan angka stunting tinggi di wilayah Kota Banda Aceh. Adanya efisiensi anggaran pada awal tahun menyebabkan perubahan target jumlah sekolah yang diintervensi yang semula 4 (empat) desa menjadi 1 (satu) desa dan dilaksanakan di dalam Kota Banda Aceh. Target ini akan tercapai di akhir tahun 2025 (tahapan program berlangsung mulai TW II - TW IV) dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I belum dapat diukur capaian realisasi untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan tahapan akan dilaksanakan di bulan April 2025 sehingga tidak dapat dianalisis keberhasilan/kegagalan kinerja. Tim Program Prioritas Nasional Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus memastikan tahapan dilaksanakan sesuai dengan alurnya dan berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan pembudayaan keamanan pangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan I belum dapat diukur capaian realisasi untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan tahapan akan dilaksanakan di bulan April 2025 sehingga tidak dapat dianalisis keberhasilan/kegagalan kinerja. Tim Program Prioritas Nasional Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus memastikan tahapan dilaksanakan sesuai dengan alurnya dan berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bappeda sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan pembudayaan keamanan pangan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 53. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah desa pangan aman	709.656.000	-	-	-	N/A

Kegiatan program Desa Pangan Aman ini belum dapat diukur penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dan Program Pasar Aman Berbasis Komunitas.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh, diharapkan program Desa Pangan Aman dapat berjalan dan desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program Desa Pangan Aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didukung untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa. Dengan demikian,

semakin meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu Desa yang diintervensi tidak komitmen dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman. Penyebab resikonya adalah Desa tidak menjalankan Rencana aksi dan program berkelanjutan yang telah disusun bersama saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi sehingga berdampak Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman tidak berjalan dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah:

1. Membentuk Tim Keamanan Pangan Desa
2. Membentuk Kader Keamanan Pangan Desa

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Tim Keamanan Pangan Desa
2. SK Kader Keamanan Pangan Desa
3. Laporan Program Desa Pangan Aman

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

17. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

a. Perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan III

Table 54. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas				

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Table 58. Bobot Progres Tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tahapan	Bobot Progres	Jadwal Pelaksanaan sesuai KAK	Realisasi	% Capaian
Forum advokasi Komitmen Pemda dan lintas sektor pasar	25 %	Jan - April	0	-
Bimtek dan Penyuluhan komunitas pasar	25 %	Maret - Juni	0	-
Sosialisasi Keamanan pangan kepada komunitas pasar	20%	Maret - Juni	0	-
Pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi	20%	Mei - Juni	0	-
Pengawasan	10 %	Februari - Juli	0	-
Total Skor	100 %			

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 55. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas				

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025. Target jumlah pasar aman berbasis komunitas yang akan diintervensi tahun 2025 sebanyak 1 (satu) pasar di wilayah Kota Banda Aceh. Target ini akan tercapai di akhir tahun 2025 (tahapan program berlangsung mulai TW II - TW IV) dengan adanya dukungan dari lintas sektor terkait, anggaran dan sarana prasarana.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomen-dasi perbaikan kinerja)

Pada triwulan I belum dapat diukur capaian realisasi untuk indikator jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan tahapan akan dilaksanakan di bulan April 2025 sehingga tidak dapat dianalisis keberhasilan/kegagalan kinerja. Tim Program Prioritas Nasional Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus memastikan tahapan dilaksanakan sesuai dengan alurnya dan berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti: Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Pasar, Bappeda, Dinas Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan pembudayaan keamanan pangan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pada triwulan I belum dapat diukur capaian realisasi untuk indikator jumlah sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan tahapan akan dilaksanakan di bulan April 2025 Pada triwulan I belum dapat diukur capaian realisasi untuk indikator jumlah pasar aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh disebabkan tahapan akan dilaksanakan di bulan April 2025 sehingga tidak dapat dianalisis keberhasilan/kegagalan kinerja. Tim Program Prioritas Nasional Balai Besar POM di Banda Aceh untuk terus memastikan tahapan dilaksanakan sesuai dengan alurnya dan berkoordinasi secara aktif dengan Lintas Sektor terkait seperti: Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM, Dinas Pasar, Bappeda, Dinas Pangan, dan Dinas Lingkungan Hidup sehingga dapat melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan pembudayaan keamanan pangan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 56. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	140.558.000	-	-	-	N/A

Kegiatan program Pasar Aman ini belum dapat diukur penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Kegiatan ini disinergikan pelaksanaannya dengan kegiatan Program Prioritas Nasional lainnya, yaitu Desa Pangan Aman dan Program sekolah dengan Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja triwulan dan tahunan, dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan himbauan agar Pemerintah Daerah melakukan replikasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di pasar lain sehingga program ini dapat diterapkan di pasar pasar lain dan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah. Diharapkan para pedagang pada pasar yang intervensi akan terus menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, dan menjaga Pangan terbebas dari Bahan Berbahaya yang dilarang pada pangan.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa resiko yang diidentifikasi yaitu masih ditemukan bahan berbahaya pada pangan yang dijual pada pasar yang diintervensi. Penyebab resikonya adalah tindak lanjut temuan dari Balai Besar POM di Banda Aceh kepada Pemerintah Daerah/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setempat belum optimal sehingga berdampak Program Prioritas Nasional PPABK tidak berjalan dengan level resiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membentuk Tim Fasilitator Pasar Aman.

Atribut Pengendalian berupa:

1. SK Fasilitator Pasar Aman
2. Laporan Monev Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian

Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

SASARAN KEGIATAN 5

Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran Kegiatan 5 dicapai dengan NPS 64,83 dengan kategori Kurang. Sasaran Kegiatan ini didukung 1 (satu) indikator kinerja.

Indikator Kinerja

18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 57. Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18.00	11.67	64.83 	Kurang

Pada Triwulan I Tahun 2025, Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan belum tercapai seluruhnya untuk tiap tahapan progress pelaksanaan. Dengan demikian, capaian indikator Persentase

UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik berada pada kriteria kurang. Defenisi Operasional Rincian Output UPT Balai/ Balai Besar sebagai berikut:

1) Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

1) Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan

4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

2) Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Cara Perhitungan Dan Formula : **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3**

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIP

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 58. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	90.3	11.67	64.83 ▼	Perlu Upaya Keras

Dilihat dari tabel di atas capaian kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh sebesar 64,83% dengan kategori Akan Tercapai sehingga tetap optimis mampu mencapai target kinerja renstra tahun 2025 yaitu 90,3%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Sama seperti tahun sebelumnya, pada tahun 2025 ini BBPOM di Banda Aceh akan melakukan layanan pendampingan terhadap 14 UMKM yang menjadi target dalam aspek pemenuhan standar dimana 12 UMK pangan, dan masing masing 1 UMKM untuk Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik. Selama Periode Januari sampai Maret 2025 (TW 1) tahapan pendampingan UMKM yang memenuhi standar untuk UMKM Pangan terhadap terhadap progres capaian sebesar 15% terdiri dari Penetapan target UMK Obat Tradisional (5%) dan Sosialisasi / KIE Keamanan Obat dan Makanan (10%), untuk UMK Kosmetik dan OBA terdiri dari Penetapan terget pendampingan UMKM (10%). Akumulasi perhitungan TW I terhadap tahapan pendampingan UMKM

yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dibagi 3 sebesar 11,67%. Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan belum tercapai seluruhnya untuk tiap tahapan progres pelaksanaan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Pada awal tahun terjadi perubahan target sarana pendampingan yaitu 13 sarana UMKM pangan, OBA dan Kosmetik dengan komposisi 8 sarana pangan, 3 sarana OBA dan 2 sarana Kos (8;3;2), karena kondisi lapangan memang belum ditemukan sarana OBA dan Kos yang menjadi target pendampingan sehingga diusulkan menjadi komposisi dari 13 (11;1;1).
2. Pada manual IKU pada penetapan target dijadwalkan pada jan-feb 2025, bergeser di Maret 2025.
3. Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan pada tahun sebelumnya tidak menjadi penilaian target tetapi untuk tahun 2025 menjadi tahapan proses yang dihitung sebagai target di TW 1, pelaksanaan yang direncanakan luring karena efisiensi menjadi daring dan sudah dilaksanakan di Maret 2025.
4. Pelaksanaan Bimtek IP CPPOB untuk UMKM Pangan olahan, Bimtek CPKB untuk UMKM Kosmetik dan Bimtek CPOTB untuk UMKM Obat Bahan Alam tidak dapat dilaksanakan di Maret 2025 karena pada awal april masih membahas terkait target pendampingan untuk UMKM OBA dan Kosmetik. Progres tahapan selanjutnya berupa Bimtek IP CPPOB untuk UMKM Pangan, petugas akan meningkatkan progres capaian pada triwulan berikutnya dan akan melaporkan tepat waktu setiap tahapan pendampingan sesuai timeline, mulai dari laporan pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek CPKB, bimtek CPOTB, dan bimtek izin penerapan CPPOB), laporan pelaksanaan pendampingan (termasuk fasilitasi pendampingan dan PSB pangan) serta monitoring dan evaluasi. Selain itu keberhasilan pelaksanaan pendampingan juga ditunjang oleh kompetensi petugas serta komitmen petugas substansi sertifikasi.

Strategi Untuk dapat terus meningkatkan capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT dan kosmetik

yang baik, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD pemerintah Aceh dalam mendukung percepatan proses registrasi pada sistem terintegrasi.
- b. Pembinaan terprogram secara terus menerus kepada pelaku usaha melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OBA.
- c. Pendampingan secara berkesinambungan dalam desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan.

Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima. Proses perjalanan organisasi yang dinamis juga menuntut adanya rotasi pegawai sehingga pertukaran posisi petugas di sertifikasi juga berubah oleh karena itu maka pelatihan ini juga harus diikuti setiap tahunnya untuk mengupgrade ilmu pengetahuan yang diikuti perubahan peraturan yang sangat dinamis juga. Pelatihan yang diperlukan berkaitan dengan sertifikasi produk obat dan makanan dalam hal ini pangan, kosmetik dan Obat Bahan Alam dengan menjadi fasilitator UMKM pangan, OBA dan Kosmetik, dan pelatihan untuk auditor distribusi Obat dan Makanan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program - program yang telah dilakukan selama tahun 2025 untuk mencapai realisasi maksimal pada indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, antara lain pelatihan Fasilitator CPOTB dan CPKB, pelatihan Fasilitator IP CPPOB serta pelatihan auditor junior CDOB dan pelatihan lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Banda Aceh, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- b. Kolaborasi dengan SKPD pemerintah Aceh terkait perizinan di OSS sangat membantu mempercepat proses registrasi produk karena sistem registrasi

melalui OSS RBS yang mengharuskan peran aktif dari SKPD sesuai tupoksinya masing masing.

- c. Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) secara intensif (termasuk melakukan bimtek dan sosialisasi terkait perizinan pangan olahan, kosmetik dan OBA) sesuai jadwal untuk target sarana produksi OBA, Kosmetik dan Pangan akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2025.

Namun pada realisasi pendampingan UMKM di TW 1 ini tidak mencapai target hal ini disebabkan pelaksanaan bimtek CPPOB, CPKB dan CPOTB yang seyogyanya dilaksanakan pada maret 2025 tidak terlaksana dikarenakan masih adanya desk pembahasan terkait target pendampingan UMKM di 2025 sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran. Khusus untuk pendampingan UMKM Pangan dibantu fasilitasi oleh Orang Tua Asuh (OTA) yang dikoordinir oleh Direktorat PMPU PO yang direncanakan dilaksanakan pada Mei 2025. Jadi Bimtek harus mundur di TW selanjutnya, yang akan dilaksanakan pada April untuk UMKM OBA dan Kosmetik sementara Bimtek pangan akan dilaksanakan pada April-Mei 2025 menunggu persetujuan bantuan pelaksanaan dari OTA. Realisasi pelaksanaan pendampingan UMKM pangan, OBA dan Kosmetik juga berkoordinasi dengan pusat serta menunggu arahan-arahan terkait pelaksanaan bimtek.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 59. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	48.359.00	-	-	64.83	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran **efisien** di mana

realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Interim TW I dapat digunakan sebagai laporan pada pelaksanaan layanan kepada masyarakat dalam hal pendampingan kepada pelaku usaha salah satu inovasi pelayanan publik. Selain itu juga menjadi salah bukti komitmen UPT Balai Besar POM di Banda Aceh dalam hal memenuhi standar pelayanan sehingga apa yang dibahas pada saat pelaksanaan Forum Komunitas Publik terverifikasi dengan baik yang merupakan komitmen nyata dari petugas sertifikasi.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait pendampingan UMKM pangan, OBA dan Kosmetik seperti yang terdapat pada daftar risiko Balai Besar POM di Banda Aceh yaitu:

1. Petugas menerima gratifikasi atas layanan yang diberikan pada, risiko ini dapat diatasi dengan menolak gratifikasi yang diberikan secara langsung dan memberikan pengertian dan pemahaman kepada pelaku usaha bahwa tidak dibenarkan memberikan gratifikasi kepada petugas dalam hal menjaga integritas dan komitmen yang tinggi dalam pelayanan kepada konsumen, selain itu juga menempelkan stiker anti gratifikasi di sarana produksi.
2. Pelaku usaha kosmetik dan OBA tidak dapat menyelesaikan CAPA audit sertifikasi SPA CPKB/SPA CPOTB dikarenakan: a. biaya renovasi sarana atas rekomendasi petugas, sampai saat ini belum ditemukan risiko terkait jadi tidak mengganggu proses pendampingan kepada pelaku usaha. b. pelaku usaha belum memahami cara pembuatan dokumen mutu, terkait risiko ini juga masih berjalan dengan baik sehingga risiko ini masih bisa diatasi.
3. Pelaku usaha belum memahami cara pembuatan dokumen mutu, untuk risiko ini sampai tw I ini masih bisa diatasi dan tidak menjadi kendala dalam pendampingan.
4. Petugas tidak dapat memproses pengajuan di e-sertifikasi karena aplikasi sertifikasi mengalami gangguan sehingga dapat menjadi kendala pada proses pengajuan sertifikasi. Untuk risiko ini juga masih dapat diatasi karena aplikasi masih berjalan normal secara umum. sehingga tidak menjadi kendala dalam

proses pendampingan perizinan kepada pelaku usaha.

SASARAN KEGIATAN 6

Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 1 dicapai dengan NSS 100 dengan kategori baik. Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) IKU yang dapat dicapai dengan sangat baik dan sesuai target.

Indikator Kinerja

19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 60. Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	14.00	14.00	100.00 	Baik

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan

- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$[(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}] \times 100\%$$

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Realisasi persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan I tahun 2025 adalah 14,00 % dari target 14,00 %. Realisasi tersebut berasal dari 1 (satu) perkara di tahun berjalan pada tahap SPDP, dan 1 (satu) perkara carry over (2020) pada Tahap I. Sehingga capaian kinerja keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan I tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100,00 % dengan kriteria Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 61. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5	14.00	15.14 	Perlu Upaya Keras

Realisasi TW I tahun 2025 yaitu 14,00 %, telah sesuai dengan target TW I, namun dibandingkan dengan target tahunan sebesar 92,25 %, capaiannya menjadi 15,14 %. Dengan capaian tersebut, maka capaian realisasi kinerja triwulan I dibanding target tahun 2025 masuk dalam kategori Perlu Upaya Keras.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada awal Triwulan I, Balai Besar POM di Banda Aceh berhasil mencapai kinerja yang baik, yaitu sebesar 100,00% dari target triwulan yang telah ditetapkan. Indikator dari pencapaian ini adalah telah diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Penerbitan SPDP tersebut didahului oleh serangkaian proses untuk memenuhi berbagai persyaratan, baik dari segi kelengkapan administratif penyidikan seperti Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan, maupun kelengkapan sarana, prasarana, anggaran, serta formasi personel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penindakan.

Kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja pada Triwulan I ini terletak pada kecepatan dan kesiapan personil, mengingat pada awal tahun masih terdapat kendala dalam ketersediaan anggaran. Hal ini merupakan dampak dari diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga kegiatan penindakan baru dapat dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret 2025.

Namun demikian, capaian kinerja pada tahap ini masih jauh dari target tahunan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 92,50%. Terlebih lagi, masih terdapat satu perkara carry over yang saat ini masih berada pada Tahap I, yang berpotensi membebani nilai capaian kinerja dan menghambat pencapaian target tahunan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya agar target pada triwulan-triwulan selanjutnya dapat tercapai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa faktor yang menunjang pencapaian kinerja yang baik pada Triwulan I, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan Teknik Intelijen tepat

Teknik yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan adalah teknik cover, baik melalui media sosial target dengan cara menyamar sebagai pengikut (follower) guna memantau aktivitas target, maupun dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli secara langsung (offline) di lokasi/sarana. Selain itu, teknik pengamatan (surveillance) dan eliciting juga dimanfaatkan dalam proses investigasi sebagai upaya untuk mengungkap suatu kasus secara lebih mendalam.

2. Adanya dukungan Fungsi Laboratorium Kimia

Laboratorium Kimia berperan penting dalam proses pengujian barang bukti, yang hasilnya memperkuat dugaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Adanya dukungan Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memberikan dukungan berupa penyediaan anggaran serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sejak tahap investigasi hingga pelaksanaan kegiatan penindakan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 62. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	473.984.000	13.740.000	2.90	100	Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran **tidak efisien** di mana realisasi capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Dari capaian kinerja yang baik pada indikator keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi interim sehingga target-target interim selanjutnya dapat tercapai sesuai perencanaan.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Salah satu resiko kegiatan penindakan yang dilakukan pada TW I adalah Petugas tidak menemukan barang bukti di TKP, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebelum dilakukan penindakan, petugas melakukan pemantauan terhadap aktivitas sosial media terduga pelaku yang menjadi target, selain itu petugas juga melakukan investigasi di lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari sosial media.

SASARAN KEGIATAN 7
Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 7 dicapai dengan NPS 100 dengan kategori Baik.

Indikator Kinerja

20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 63. Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100 	Baik

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT yang terdiri dari:

- Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25%);
- Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun (50%);
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT (25%).

Pada TW I, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00% sedangkan realisasi yang tercapai pada TW I tahun 2025 sebesar 50,00 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut di atas dibandingkan terhadap target TW I sebesar 100,00 % yang berarti berkinerja **Baik**.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 64. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	50.00	55.56 ▼	Perlu Upaya Keras

Pada tahun 2025, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00%. Realisasi yang tercapai pada TW I tahun 2025 sebesar 50,00 %. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas dibandingkan terhadap target tahunan adalah sebesar 55,56 %. Dengan capaian tersebut, masih Perlu Upaya Keras untuk mencapai target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian kinerja sebesar 100,00 % terhadap target TW I sebesar 50,00% berasal dari salah satu komponen penyusunnya, yaitu Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber, yang dihitung berdasarkan jumlah laporan analisis penelusuran siber yang disampaikan tepat waktu, yaitu sebesar 50%.

Sementara itu, dua komponen lainnya, yaitu Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT, belum dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan karena Rekomendasi Cegah Tangkal dari Direktorat Cegah Tangkal BPOM RI belum ada, dan pembuatan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dijadwalkan selesai pada Triwulan IV. Sehingga, jika dibandingkan dengan target tahunan, masih perlu upaya keras untuk pencapaiannya.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun pencapaian yang berhasil diraih pada TW I ini tidak terlepas dari, koordinasi yang baik dengan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BPOM RI sebagai pengelola aplikasi baik Aplikasi Dashboard Penindakan, maupun Aplikasi WEBCRAWLER, sehingga kendala pada Aplikasi bisa ditangani lebih cepat.

Selain itu dari internal Balai Besar POM di Banda Aceh. Tim IT juga berperan penting, sehingga petugas di Fungsi Penindakan tidak terkendala pada koneksi internet maupun perangkat keras yang digunakan untuk melakukan pelaporan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 65. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	73.305.000	-	-	100	N/A

Belum bisa dilakukan penilaian, karena kegiatan patroli siber dilakukan melalui penelusuran internet.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Dari capaian kinerja yang baik pada indikator Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, maka laporan kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi interim sehingga target-target interim selanjutnya dapat tercapai sesuai perencanaan.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Salah satu resiko yang dapat menghambat pencapaian pada indikator kerja ini adalah keterlambatan pelaporan hasil Patroli Siber, sehingga pengelolaan risikonya adalah monitoring pelaksanaannya dilakukan oleh ketua tim setiap tanggal 20 bulan bersangkutan.

SASARAN KEGIATAN 8

Layanan Publik UPT yang prima

Sasaran Kegiatan 8 belum ada penilaian pada triwulan I dengan didukung 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT.

Indikator Kinerja

21. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 66. Realisasi Indeks Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan

K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
- 6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03. Selanjutnya, penghitungan nilai indeks merupakan nilai komposit dari 2 formulir, dimana nilai per indikator merupakan nilai hasil pembobotan formulir F02 dan F03 dikali dengan bobot indikator. Setelah nilai indeks diperoleh, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori yaitu:

Tabel. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 - 1.00	F	Gagal
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 - 2.00	D	Buruk
2.01 - 2.50	C-	Cukup (dengan catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
3.01 - 3.50	B-	Baik (dengan catatan)
3.51 - 4.00	B	Baik
4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima

Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan unit kerja sehingga dapat melihat mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Nilai Indeks Pelayanan Publik di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh akan diperoleh pada akhir tahun.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 67. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7	-	-	-

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025 karena nilai akan diperoleh pada akhir tahun. Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu mengupdate data dukung yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data dan informasi di SIPP.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025 karena nilai akan diperoleh pada akhir tahun. Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu mengupdate data dukung yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data dan informasi di SIPP.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan target tahun 2025 karena nilai akan diperoleh pada akhir tahun. Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan selalu mengupdate data dukung yang diperlukan sesuai 6 aspek penilaian pada UPP dan melakukan pemutakhiran data dan informasi di SIPP.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 68. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik UPT	112.285.000	340.000	0.30	0	Tidak Efisien

Penggunaan anggaran pada indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tidak efisien. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian pada indikator belum ada pada triwulan I.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim dan tahunan Balai Besar POM di Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga diperlukan sebuah strategi kegiatan yang terintegrasi dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat secara bertahap. Penerima manfaat internal dalam hal ini ialah kelompok substansi pengampu indeks kinerja dan bagian Program dan Evaluasi sebagai acuan dalam melakukan analisis dan perbaikan strategi pelaksanaan program untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penerima manfaat eksternal dalam hal ini ialah Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja unit kerja serta stakeholder, masyarakat sebagai objek penerima manfaat program kinerja.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Peristiwa risiko yang diidentifikasi yaitu pemecatan petugas pelayanan publik. Penyebab resikonya adalah Petugas pelayanan melanggar aturan/kriteria yang ditetapkan pada kontrak sehingga berdampak Pelayanan publik Balai Besar POM di Banda Aceh terganggu dengan level risiko inheren 11. Aktivitas Pengendalian yang disusun adalah membuat kontrak kerja yang berisi syarat dan aturan yang jelas. Atribut Pengendalian berupa Dokumen Kontrak kerja. Penilaian Kelemahan Pengendalian adalah Kelemahan tidak signifikan dengan simpulan efektivitas pengendalian Efektif dengan level resiko residu turun menjadi 5. Resiko yang diidentifikasi telah dimitigasi dan dipantau sehingga target dapat dicapai.

SASARAN KEGIATAN 9

Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

22. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 69. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Indeks RB Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan menjumlahkan nilai pada bobot komponen pengungkit dan bobot komponen hasil

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024. Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Banda Aceh.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: Manajemen Perubahan: bobot 8%; Penataan Tatalaksana: bobot 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; Penguatan Pengawasan: bobot 15%; Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%; Birokrasi Bersih dan Akuntabel: bobot 22,5%; Pelayanan Publik yang Prima: bobot 17,5%.

Pada triwulan I tahun 2025 nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada dan akan diperoleh pada triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 70. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	90.25	-	-	-

Nilai pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada pada triwulan I dan akan diperoleh triwulan IV. Namun, Balai Besar POM di Banda Aceh tetap melakukan perbaikan dan mengisi LKE ZI secara mandiri pada triwulan I.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2025, Balai Besar POM di Banda Aceh melakukan penancangan WBBM, sehingga dilakukan peningkatan dan perbaikan setiap pokja dalam hal memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2025, dilakukan perubahan tim kerja dan juga dilakukan penguatan inovasi yang lebih berdampak serta monev inovasi dengan ketat. Konsistensi pelaksanaan RB akan terus dipertahankan guna menjaga keberlangsungan predikat WBK yang telah diraih serta penerapan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar POM di Banda Aceh. Penyebab keberhasilan dalam peningkatan kinerja:

1. Telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada tahun 2023.
2. Pimpinan terlibat aktif dan berperan sebagai role model dalam penyusunan perencanaan, perjanjian kinerja serta memantau pencapaian kinerja secara

berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

3. Inovasi pada area Penguatan Pengawasan yaitu Siap Melayani Laporan Anda (SIMELAN) merupakan kanal pengaduan yang memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui adanya praktik gratifikasi, suap, dan/atau benturan kepentingan. Inovasi ini telah didukung dengan SOP Mikro serta kebijakan formal.
4. Memiliki inovasi dalam area pelayanan publik sebagai berikut:
 - a. KORPORASI
Berkolaborasi dengan OPD untuk memfasilitasi UMK dalam percepatan sertifikasi sarana produksi dan registrasi izin edar produk Obat Tradisional, Kosmetika dan Pangan Olahan di Aceh agar dapat memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk, sehingga dapat berdaya saing dan meningkatkan kepercayaan publik dalam satu aksi.
 - b. Sanger Ureung Aceh
Inovasi yang menyatukan layanan pemberian KIE, pemeriksaan sarana, dan pengujian sampel produk makanan yang ada di warung kopi. Inovasi ini berkolaborasi dengan SAKA POM sehingga sangat memungkinkan dapat dilaksanakan di seluruh wilayah pengawasan Balai Besar POM di Banda Aceh.
 - c. Si JANET
Informasi yang disampaikan dalam bentuk video yang berisi jawaban atas pertanyaan oleh masyarakat/netizen melalui media sosial Balai Besar POM di Banda Aceh (instagram, facebook, whatsapp, twitter). Saat ini telah dilakukan improvement dengan livestreaming instagram dengan tema yang inovatif dan informatif. Inovasi ini telah dilakukan secara berkelanjutan dan didukung publikasi pada media sosial.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan menurut saran APIP terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Rencana kerja pembangunan ZI belum komprehensif dan sebatas pemenuhan atas pertanyaan pada LKE, sehingga belum menggambarkan tujuan akhir dari

- pembangunan ZI pada unit kerja. Pemantauan dan evaluasi atas rencana kerja juga belum dilakukan secara memadai.
2. Kampanye pembangunan ZI kepada unit kerja sekitar/stakeholder belum dilakukan secara aktif dan masif, upaya pembangunan budaya kerja belum mampu mengurangi resistensi pegawai atas perubahan, dan Budaya kerja core value ASN BerAKHLAK belum dituangkan ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
 3. Inovasi yang dikembangkan belum seluruhnya didukung dengan bukti sosialisasi, latar belakang, target dan pengukuran atas dampak serta pemantauan dan evaluasi dari penerapan inovasi tersebut.
 4. Penempatan pegawai baru dan/atau pegawai hasil mutasi internal belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dikaitkan dengan perbaikan kinerja unit kerja serta rencana pengembangan kompetensi belum dapat menunjukkan pemberian kesempatan yang sama kepada semua pegawai.
 5. Pemanfaatan IT dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM dan pemberian pelayanan publik serta pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum dilakukan pemantauan dan evaluasi secara memadai dan berkala.
 6. Sistem pengendalian internal yang dibangun belum memadai dibuktikan dengan adanya pelanggaran kode etik yang terbukti melalui Whistleblowing System (WBS) tahun 2023.
 7. Perbaikan standar layanan belum sepenuhnya memanfaatkan hasil forum komunikasi publik dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) serta Publikasi atas seluruh layanan belum dilakukan dengan jelas dan lengkap melalui media sosial.
 8. Pemberian reward and punishment bagi petugas pemberi layanan belum dilakukan pemantauan dan evaluasi yang memadai dan berkala.
 9. Terdapat rekomendasi BPK yang masih dalam proses tindak lanjut.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun 2025, antara lain:

1. Melakukan sosialisasi terkait budaya kerja dan pola pikir melalui:

- a. Inovasi KURSI (Kuis Reformasi Birokrasi) yang dilakukan setiap hari senin secara daring setelah Apel Nasional Badan POM.
 - b. Parrkir (Pantun hari krida olahraga), dilakukan setiap hari kamis untuk mengingatkan dan mengajak pegawai untuk berolahraga pada hari Jumat.
2. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik di Balai Besar POM di Banda Aceh (melalui media sosial Balai), melalui inovasi:
 - a. Rasa dari Hati, pengisian data sampel untuk komoditi pangan, kosmetik dan obat oleh Fungsi Pengujian dan Pemeriksaan.
 - b. SPRINT, pembuatan surat tugas melalui aplikasi.
3. Pengembangan kompetensi pegawai melalui inovasi REPOST (Reward and Punishment) dengan menentukan pegawai teladan dan telatan setiap bulan yang dinilai dari SKP dan Perilaku 360.
4. Melakukan peningkatan nilai kinerja dan anggaran melalui inovasi internal Aplikasi SIGARANG (Sistem Informasi Pagu Alokasi, Realisasi dan Sisa Anggaran) yang memuat pagu alokasi, jenis kegiatan, jenis belanja, laporan FA detail, link capaian output, RHPK dan usulan revisi anggaran.
5. Melakukan pembekalan dan sosialisasi tentang gratifikasi, whistle blowing system, benturan kepentingan dan manajemen risiko terhadap seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh melalui inovasi SIMELAN (Siap Menindaklanjuti Laporan Anda).
6. Memberikan kuis seputar Obat dan Makanan yang disajikan dalam bentuk TTS, susun kata, true or false dan lainnya melalui inovasi Kuis TIMBA (Tambah Informasi Bersama BPOM Aceh) ditujukan untuk para followers Instagram BPOM Aceh agar menambah wawasan dan informasi kepada masyarakat terkait pengawasan Obat dan Makanan serta meningkatkan engagement sehingga jumlah followers di Instagram BPOM Aceh bertambah.
7. Gerakan efisiensi dan penghematan dalam penggunaan energi selama bekerja di kantor melalui inovasi HEALING (Hemat Energi Air, Listrik dan Konservasi Lingkungan) dan LAHKETUKER (Langkah Kecil Untuk Perubahan).
8. Inovasi APATU (Apresiasi Ulang Tahun) berupa ucapan selamat ulang tahun kepada pegawai melalui voice speaker kantor dalam rangka meningkatkan nilai-

nilai harmonis dan loyal di lingkungan kerja Balai Besar POM di Banda Aceh.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 71. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	480.974.000	7.574.800	1.57	-	Tidak Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran **tidak efisien** di mana realisasi capaian indikator belum tersedia pada triwulan I.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan Laporan Kinerja tahun 2024, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh perlu meningkatkan kinerja di bidang reformasi birokrasi dengan memanfaatkan inovasi-inovasi di setiap kelompok kerja serta melakukan monitoring dan evaluasi RB secara rutin. Untuk mempertahankan predikat WBK dan mendapatkan predikat WBBM, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan perbaikan-perbaikan di setiap pokja terutama pada pelayanan publik yang pada tahun 2024 nilainya menurun dari tahun sebelumnya.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Untuk mengatasi risiko terhadap pemantauan dan evaluasi rencana kerja yang belum dilaksanakan secara konsisten, kampanye pembangunan Zona Integritas (ZI) yang belum dilakukan secara masif, dan inovasi yang dikembangkan yang belum memberikan dampak nyata kepada masyarakat, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Langkah pertama adalah memperbaiki dan memperkuat sistem pemantauan serta evaluasi yang ada, dengan memastikan bahwa setiap rencana kerja dapat dipantau secara real-time dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua elemen instansi bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk mendukung pemantauan dan evaluasi akan sangat membantu untuk meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah terkait kampanye pembangunan ZI, penting bagi Balai Besar POM di Banda Aceh untuk merancang kampanye yang lebih luas dan inklusif, yang dapat menjangkau berbagai kalangan stakeholder dan masyarakat. Kampanye ini perlu melibatkan berbagai saluran komunikasi, baik itu media sosial, media massa, atau kegiatan tatap muka seperti seminar dan diskusi publik, agar informasi tentang ZI tersebar secara efektif. Agar kampanye ini sukses, perlu ada strategi yang matang untuk mengedukasi masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya ZI dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik.

Terkait dengan inovasi yang belum memberikan dampak nyata, Balai Besar POM di Banda Aceh harus memastikan bahwa setiap inovasi yang dikembangkan berfokus pada kebutuhan masyarakat dan dapat diterima dengan baik oleh publik. Ini dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan inovasi, serta terus memantau dampak yang dihasilkan untuk memastikan bahwa inovasi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, feedback dari masyarakat dan pemangku kepentingan sangat penting untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap setiap inovasi yang ada.

23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 72. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh dengan rentang nilai sebagai berikut:

Table 73. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Table 74. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Banda Aceh 2020-2024

Tahun	Nilai SAKIP	Keterangan
2020	75.91	Sangat Baik (BB)
2021	75.96	Sangat Baik (BB)
2022	79.16	Sangat Baik (BB)
2023	79.48	Sangat Baik (BB)
2024	81.48	Memuaskan (A)

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini.

Pada triwulan I nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada dan akan diperoleh pada triwulan IV.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 75. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	82.78	-	-	-

Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh belum ada pada triwulan I dan akan diperoleh triwulan IV. Namun, Balai Besar POM di Banda Aceh akan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dan perbaikan agar target tahun 2025 dapat terpenuhi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, Balai Besar POM di Banda Aceh telah berhasil menaikkan nilai AKIP dari 79,48 (Kategori BB) menjadi 81,48 (Kategori A). Namun, tetap perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai tersebut, karena target tahun 2025 juga meningkat. Rekomendasi penilaian AKIP di tahun 2024, antara lain:

1. Menyusun kertas kerja dan matriks reviu target dengan menyajikan penetapan target final dan diformalkan oleh Pimpinan Satker dan memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.
2. Menyempurnakan SOP Mikro Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.
3. Mendokumentasikan arahan pimpinan dan dokumen monev untuk memastikan penggunaan sumber data yang valid.
4. Memastikan keselarasan penyajian rencana tindak lanjut dan menyusun analisis capaian kinerja berupa kendala/RTL pada aplikasi SIMETRIS, laporan

evaluasi internal dan laporan kinerja interim.

5. Menyusun Laporan Kinerja tahunan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan SAKIP.
6. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan kendala dan rekomendasi yang memadai serta monitoring terkait tindak lanjut atas rekomendasi periode sebelumnya.

Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari APIP, telah dilakukan beberapa upaya dengan mempersiapkan Tim AKIP yang lebih kuat, Pimpinan turut terlibat dalam pembahasan, pengawalan bersama dalam mencapai target kinerja UPT, dan benchmarking pada laporan UPT dengan Nilai AKIP terbaik. Komponen Evaluasi Internal pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena terdapat beberapa kelemahan pada Laporan Evaluasi Internal seperti belum menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjutnya. Seluruh komponen indikator kinerja perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan berkelanjutan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Nilai AKIP antara lain melakukan rapat koordinasi antar fungsi di Balai Besar POM di Banda Aceh sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan serta kegiatan pertemuan penyusunan laporan kinerja. Melakukan tindak lanjut terhadap seluruh rekomendasi Inspektorat Utama pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) penilaian SAKIP tahun 2024 dan meningkatkan/memperkuat pelaksanaan evaluasi internal dengan melakukan monev kinerja berkala yang dilaksanakan setiap bulannya.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 76. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	110.271.00	-	-	-	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, Nilai AKIP tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Namun, untuk tahun 2025 diperlukan perbaikan kinerja hal ini dikarenakan target tahun 2025 meningkat dan terhadap komponen evaluasi internal yang mengalami penurunan, diperlukan konsistensi dan kesesuaian rekomendasi dalam pencapaian target kinerja yang dilakukan setiap triwulan. Terhadap komponen lainnya diperlukan juga perbaikan agar dapat meningkatkan nilai AKIP tahun berikutnya.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Dalam penyelenggaraan AKIP yang maksimal diperlukan komitmen seluruh ketua tim kerja dan anggota tim. Namun, terdapat risiko yang dihadapi seperti ketua tim kerja dan anggota tim yang tidak sepenuhnya memahami pentingnya menindaklanjuti rekomendasi sehingga rekomendasi perbaikan kinerja per triwulan tidak ditindaklanjuti. Untuk itu, perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens dengan ketua tim kerja terkait agar masalah tidak kembali terulang dan menghambat kinerja organisasi.

Selain itu, data kinerja dari tim terkait tidak lengkap atau tidak akurat sehingga terlambat mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja dan dapat mengakibatkan pelaporan evaluasi kinerja tidak dilaporkan tepat waktu. Untuk mengatasi risiko ini, diberikan batas waktu pengumpulan data kepada penanggung jawab data untuk selanjutnya disusun dalam bentuk laporan.

Metode pengumpulan data tidak konsisten juga dapat menjadi risiko yang

mengakibatkan data realisasi kinerja yang ditampilkan berubah-ubah (tidak valid). Untuk itu, diperlukan membuat media pengumpulan data yang dapat diakses secara online seperti google worksheet untuk menghindari keputusan rekomendasi tindak lanjut menjadi keliru.

24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

a. Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025

Table 77. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh				

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh diperoleh dengan rumus: $(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$

Realisasi berasal dari nilai EKA sebesar 92,31 dari aplikasi Smart dan Nilai IKPA 98,40 dengan perhitungan $(92.31 \times 50\%) + (98,40 \times 50\%)$ sehingga diperoleh realisasi nilai kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh Tahun 2024 adalah 95.35 dengan kategori sangat baik.

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh triwulan I tahun 2025 belum ada karena penilaian dilakukan pada akhir Bulan Desember (triwulan IV).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output.

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 78. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target Tahun 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	5	-	-	-

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran belum diperoleh sehingga belum dapat diperbandingkan. Untuk penilaian tahun 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun 2025 penilaian diperoleh dari hasil konversi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian nilai kinerja anggaran triwulan I belum ada, namun untuk komponen nilai NKA dipengaruhi oleh:

1. Revisi DIPA

Indikator revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh, dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam rentang semester dan tidak bersifat kumulatif.

Revisi yang diperhitungkan adalah 14 jenis revisi pagu tetap yang disahkan oleh

kementerian keuangan yang tidak mengakibatkan perubahan pagu di level Balai Besar POM di Banda Aceh.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Indikator ini mengukur selisih antara realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan dalam DIPA. Ambang batas deviasi bulanan sebesar 5 persen untuk memperoleh nilai maksimal 100.

3. Belanja Kontraktual

Belanja kontraktual dihitung berdasarkan perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya selesai tahun anggaran berjalan dan kontraknya telah didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani.

4. Penyelesaian Tagihan

Indikator kinerja penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal berita acara serah terima (BAST) atau berita acara pembayaran pekerjaan (BAPP).

5. Capaian Output

Indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dan nilai kinerja capaian RO sehingga Balai Besar POM di Banda Aceh.

6. Pengelolaan UP/TUP

Indikator ini mengukur efektivitas pengelolaan UP dan TUP oleh Satker dihitung berdasarkan jumlah SP2D GUP/GUP Nihil/GUTUP yang tepat waktu disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan.

7. Penyerapan Anggaran

Indikator ini mengukur persentase realisasi anggaran terhadap total anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan.

8. Dispensasi SPM

Indikator ini mengukur persentase SPM yang mendapatkan dispensasi atau izin keterlambatan.

9. Nilai Efisiensi pada EKA yang rendah

Komponen penilaian pada Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dimana salah satu komponen yang dinilai adalah Efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran akan bernilai tinggi apabila anggaran yang direalisasikan rendah dan capaian output yang dihasilkan tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh target yang harus dicapai oleh satuan kerja yaitu di atas 99%, dengan demikian apabila capaian output mencapai 100% maka nilai efisiensi hanya tercapai mendekati angka normal yaitu 0, sehingga nilai efisiensi tidak bisa mencapai nilai efisiensi tertinggi pada aplikasi yaitu -20.

Untuk mencapai nilai efisiensi maksimal maka diperlukan realisasi capaian output kegiatan yang jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan capaian anggaran di atas 99% dapat mendorong nilai efisiensi anggaran dimaksud sehingga nilai EKA dapat meningkat dan selanjutnya mempengaruhi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Banda Aceh dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala

Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP.

- Peningkatan kompetensi pengelola keuangan
Tahun 2025 pengelola keuangan Balai Besar POM di Banda Aceh mengikuti bimtek terkait IKPA yang diselenggarakan oleh direktorat perbendaharaan setiap triwulan.
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh telah melakukan 2 (dua) kali penyesuaian kegiatan dan anggaran melalui mekanisme revisi DIPA dan 34 (empat) kali revisi POK.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 79. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	12.287.976.000	2.374.491.240	19.32	-	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh dapat dilakukan dengan penyesuaian kegiatan melalui mekanisme revisi POK.

g. Informasi tentang pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 memenuhi target, namun tahun 2025 tetap diperlukan perbaikan dalam pencapaian target kinerja.

Realisasi Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2024 No. DIPA- 063.01.2.432790/2025 yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp20.121.623.000,- (Dua puluh milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah). Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 3.180.894.861,- atau 15.65 persen.

JENIS BELANJA	TARGET PAGU AWAL (Rp)	TARGET PAGU SETELAH REVISI	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	6.833.861.000	6.833.861.000	1.706.472.843	24.97
Belanja Barang	11.438.540.000	11.639.540.000	895.512.618	7.69
Belanja Modal	1.849.222.000	1.849.222.000	578.909.400	31.31
Jumlah	20.121.623.000	20.322.623.000	3.180.894.861	15.65

Realisasi PNBPN Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh

JENIS BELANJA	TARGET PAGU AWAL (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendapatan Pajak Tidak langsung lainnya Deposit	0	6.325.056	0
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	0	-647.500	0
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	220.000.000	17.684.418	8.00
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi	0	971.250	0
Jumlah	220.000.000	24.333.224	11.00

Pengukuran Efisiensi dan Efektifitas Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan, maksudnya adalah mengukur kemampuan suatu kegiatan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar, atau persentase capaian *output* lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran):

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Nilai maksimum dari SE adalah 1, dan digunakan sebagai indeks efisiensi, dihitung menggunakan rumus:

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

Untuk mengukur apakah suatu kegiatan dinyatakan efisien atau tidak efisien, digunakan formula logika sebagai berikut:

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Derajat efisiensi atau disebut Tingkat Efisiensi (TE) merupakan pernyataan seberapa jauh/tinggi tingkat efisiensi kegiatan yang dinyatakan tidak efisien. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi setiap kegiatan dihitung menggunakan persamaan:

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

Efektivitas kegiatan adalah derajat/tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui derajat efektivitas perlu diketahui pencapaian indikator *outcome*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa waktu (dalam satuan tahun) setelahnya. Pengukuran tingkat efektivitas sifatnya masih berdasarkan angka, bukan realisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada setiap sasaran kegiatan dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut:

- 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Manajemen risiko terkait nilai kinerja anggaran adalah upaya untuk mengelola risiko yang dapat berdampak pada kinerja anggaran. Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan RPD Halaman III DIPA merupakan salah satu faktor risiko yang disebabkan oleh jadwal pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan dikarenakan kondisi internal dan eksternal sehingga berakibat terjadi deviasi pada halaman III dIPA +/- 5% dan mempengaruhi nilai IKPA satker.

Pertanggungjawaban UP dan TUP tidak tepat waktu juga berakibat terhadap target nilai kinerja anggaran menjadi rendah karena disebabkan kegiatan yang dilakukan tidak sesuai perencanaan dan penyelesaian pekerjaan oleh pihak ke III tidak sesuai waktu kontrak.

Selain itu capaian output triwulan tidak sesuai target juga menjadi ancaman yang dapat mengurangi nilai IKPA dan kualitas kinerja anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk itu diperlukan upaya melakukan monev anggaran triwulan serta komitmen pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai perencanaan guna menjaga nilai kinerja anggaran sesuai target. Selain itu, capaian output triwulan tidak sesuai target juga menjadi ancaman yang dapat mengurangi nilai IKPA dan kualitas kinerja

anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh. Untuk itu diperlukan upaya melakukan monev anggaran triwulan serta komitmen pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai perencanaan guna menjaga nilai kinerja anggaran sesuai target.

25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh

a. **Perbandingan target dan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025**

Table 80. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh

Indikator Kinerja	Target TW I (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh				

Indeks Manajemen Risiko (IMR) merupakan indeks yang mengukur tingkat kematangan (maturitas) penerapan manajemen risiko dalam suatu unit kerja. Manajemen risiko didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang mencakup budaya, proses, dan struktur organisasi untuk menangani risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tingkat maturitas dibagi menjadi 5 (Lima) Kategori yaitu:

1. Risk Naive (Skor 0–16): Risiko ditangani secara individual, belum ada sistem formal.
2. Risk Aware (Skor 17–32): Kesadaran risiko ada, tapi proses belum terstruktur.
3. Risk Defined (Skor 33–48): Proses penanganan risiko mulai teratur dan diprioritaskan.
4. Risk Managed (Skor 49–64): Proses manajemen risiko sudah terintegrasi dan terukur.
5. Risk Enabled (Skor 65–80): Risiko menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis.

Hingga triwulan I tahun 2025, belum diperoleh hasil pengukuran Indeks Manajemen Risiko atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja TW I tahun 2025 dengan triwulan sebelumnya

Realisasi dan capaian triwulan I tahun 2025 belum bisa dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja triwulan I dengan target tahun 2025

Table 81. Perbandingan realisasi kinerja TW I dengan target tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	3.2	-	-	-

Realisasi indeks manajemen resiko atas kinerja pengawasan obat dan makanan untuk triwulan I tahun 2025 belum diperoleh hasil. Dengan target yang diberikan oleh Biro Perencanaan, Balai Besar POM di Banda Aceh optimis mencapai target tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

d. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Indeks Manajemen Resiko diukur melalui kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang Menjalankan tahapan-tahapan mengidentifikasi resiko dan menentukan aktivitas pengendalian yang akan mengurangi atau meniadakan Resiko yang akan mempengaruhi target kinerja Balai Besar POM di Banda Aceh. Secara umum penyebab keberhasilan dari tercapainya Indeks Manajemen Resiko Balai Besar POM yaitu:

1. Komitmen Pimpinan

Adanya dukungan aktif dari pimpinan unit kerja dalam mendorong implementasi manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.

2. Pemahaman SDM yang Meningkat

Pegawai mulai memahami pentingnya identifikasi dan pengelolaan risiko dalam pelaksanaan tugas.

3. Tersedianya Dokumen dan Prosedur

Penyusunan dokumen pendukung seperti daftar risiko, rencana mitigasi, dan sistem pelaporan risiko membantu proses berjalan lebih sistematis.

4. Koordinasi dan Pemantauan yang Konsisten

Adanya monitoring dan evaluasi berkala serta keterlibatan unit pengawasan internal dalam proses evaluasi maturitas risiko.

5. Keikutsertaan seluruh pegawai

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan selama triwulan I agar menunjang pencapaian indeks Manajemen Resiko;

1. Rutin melakukan Sosialisasi-sosialisasi terkait Manajemen resiko.
2. Mengundang Inspektorat dalam rangka Sosialisasi dan Brainstorming terkait Manajemen Resiko.
3. Mengadakan Rapat Pembahasan yang diikuti seluruh pegawai Balai Besar POM di Banda Aceh Terkait Penentuan Risk Event dan Tindak Lanjut Pengendalian dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh.
4. Lebih Melibatkan Ketua Tim dalam mengidentifikasi Risk Event masing masing bidang.
5. Melakukan evaluasi Secara berkala.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Table 82. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	22.640.000	-	-	-	Tidak Efisien

Dari hasil tabel di atas diperoleh bahwa penggunaan anggaran tidak efisien di mana realisasi capaian indikator belum tersedia pada triwulan I dan capaian anggaran belum ada dikarenakan efisiensi.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, hasil Indeks Manajemen Resiko Pengawasan Obat dan Makanan di Banda Aceh tidak menjadi target Indeks Kinerja dan baru menjadi target di Tahun 2025. Untuk tahun 2024 nilai manajemen resiko yang didapat dari hasil evaluasi adalah 2.844 dengan tingkat maturitas Risk Aware.

h. Informasi Pengelolaan Risiko untuk pencapaian indikator kinerja

Pengelolaan risiko terkait Tercapainya indeks manajemen resiko Balai Besar POM di Banda Aceh yakni harus selalu melakukan evaluasi rutin terkait Update resiko yang ada di Balai Besar POM di Banda Aceh serta tindak pengendalian resiko tersebut. Sosialisasi-sosialisasi terus dilakukan dan pengemban ilmu terkait manajemen resiko diberikan dan diwajibkan diikuti oleh seluruh pegawai.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
									Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
										Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	100	117.99	1. Capaian pada TW 1 adalah 100 % dari target 84.75 % (Persentase capaian 117.99 %), karena DO pada tahun 2025 berbeda dengan DO tahun sebelumnya. Tahun ini asesment dilakukan secara mandiri terhadap proses kegiatan. 2. Karena adanya efisiensi anggaran pada TW 1, realisasi sampling masih sedikit. Ini juga menjadi faktor yang mendukung pencapaian 100 %. Untuk TW berikut telah dibuka blokir anggaran sehingga target kembali ke target awal. 3. Sampel dapat diselesaikan sesuai timeline. Tapi waktu pengerjaan sampel menjadi lebih lama padahal jumlah sampel hanya sedikit (33 sampel dalam 3 bulan). Hal ini diakibatkan kerusakan 2 alat KCKT yaitu LC 10 ADdan LC 2030C Plus. 4. Kolom KCKT sudah banyak yang menurun performanya karena usia dan overload penggunaan akibat jumlah kolom yang terbatas. Hal ini mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan sampel lebih banyak karena penguji harus mengganti kolom lain yang bisa digunakan, hal ini juga mengakibatkan penggunaan reagensia menjadi lebih banyak	1. Kekurangan sampel pada TW 1 akan dipenuhi pada TW 2 - TW 4 2. Perbaikan alat KCKT yang rusak 3. Pengadaan kolom KCKT	1. April - Juni 2025 2. April 2025 3. Juni 2025	1. Renlak sampling penyesuaian setelah buka blokir 2. KCKT sudah selesai diperbaiki pada 18 April 2024 dan sudah bisa digunakan			
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Akhir Tahun			Pada TW 1 dilakukan KIE terhadap 45 sarana pelayanan kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik. Kegiatan dilakukan tanggal 25 Maret 2025 secara daring.			KIE Farmakovigilans	Monitoring pelpaoran e-Meso oleh 45 sarana pelayanan kesehatan yang telah diberikan KIE pada 25 Maret 2025	April - Juni 2025	
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.46	109.95	1. Realisasi TW I adalah 93,46 dari target 85% (Capaian 109,95%), dimana target tahun 2025 merupakan penilaian tahapan proses kegiatan yang dilakukan secara mandiri, mulai dari pelaksanaan sampling, kesesuaian pengujian, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan serta tindak lanjut sesuai pedoman. 2. Dari semua tahapan proses, sebesar 34,62% sampel yang dilaporkan tepat waktu, hal ini dikarenakan waktu penarikan data oleh pusat adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan sampel Januari masuk laboratorium di akhir bulan dan SIPT masih terkendala karena Perubahan Pedoman Sampling. Waktu untuk timeline pengujian masih tercapai untuk 20 HK 3. Pada TW I pengujian dilakukan untuk sampel dengan paramater yang masih dapat diuji lengkap (reagen dan baku masih tersedia) 4. Adanya efisiensi, jumlah sampel yang masuk laboratorium masih sedikit sebesar 9.60% (29 dari 302), sehingga untuk tahapan proses masih dapat dicapai dengan maksimal	1. Akan dilakukan percepatan dan penyesuaian rencana pelaksanaan sampling sesuai relaksasi anggaran 2. Koordinasi antara fungsi inspeksi dan fungsi pengujian terkait ketersediaan sumber daya untuk pengujian sampel TW II 3. Koordinasi dengan Balai Lab regional terkait parameter uji sampel regional (ketersediaan reagen dan jadwal pelaksanaan) dan waktu masuk sampel 4. Percepatan pengadaan baku dan reagen 5. Monev waktu pelaporan pengujian 6. Untuk ketepatan waktu pelaporan sampel akan masuk ke laboratorium pada minggu pertama setiap bulan sehingga ketepatan waktu pelaporan dapat tercapai sesuai timeline.	April - Juni 2025	-	1. Renlak sampling relaksasi anggaran 2. Koordinasi bidang pemeriksaan dengan Laboratorium 3. Koordinasi dengan Lab Regional terkait sampel regional 4. Pengadaan baku dan reagen 5. Monev waktu pelaporan pengujian	April - Juni 2025	-
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100		0	Tidak ada sampel KLB yang diterima selama TW I						
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.18	103.74	1. Realisasi TW I adalah 88.18 dari target 85% (Capaian 103.74%), dimana target tahun 2025 merupakan penilaian tahapan proses kegiatan yang dilakukan secara mandiri, mulai dari pemenuhan target, kesesuaian pengujian, ketepatan pengambilan kesimpulan, ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan serta tindak lanjut sesuai pedoman. 2. Dari semua tahapan proses, tidak ada sampel PIRT yang dilaporkan tepat waktu, hal ini dikarenakan waktu penarikan data oleh pusat adalah tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan sampel PIRT Januari masuk laboratorium di akhir bulan dan SIPT masih terkendala karena Perubahan Pedoman Sampling. Waktu untuk timeline pengujian masih tercapai untuk 20 HK 3. Terdapat 1 sampel PIRT yang tidak dapat diuji lengkap yaitu produk kopi karena tidak tersedianya baku dan reagen, dan pengadaan reagen ditunda. 4. Pada bulan Februari dan Maret tidak ada penambahan sampel PIRT (target awal DIPA 28 sampel) karena terdampak efisiensi anggaran	1. Akan dilakukan percepatan dan penyesuaian rencana pelaksanaan sampling PIRT 2. Koordinasi antara fungsi inspeksi dan fungsi pengujian terkait ketersediaan sumber daya untuk penyelesaian pengujian sampel PIRT seluruhnya di TW II agar dapat tepat waktu 3. Percepatan pengadaan baku dan reagen 4. Monev waktu pelaporan pengujian	April - Juni 2025		1. Renlak penyesuaian relaksasi anggaran 2. Koordinasi pemeriksaan dan terkait kesiapan sumber daya pengujian 3. Percepatan pengadaan baku dan reagen 4. Monev waktu pelaporan pengujian	April - Juni 2025	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
									Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
										Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	75.96	101.28	Realisasi pada TW 1 adalah 75.96 % dari target 75 % , persentase capaian 101.28 %. Dari kedua aspek penilaian yaitu pelaku usaha dan lintas sektor, keduanya memenuhi target.	1. Pada TW selanjutnya akan ditingkatkan capaian dengan berupaya maksimal dan komitmen petugas dalam mengawal feedback CAPA dari stakeholder. 2. Memberikan panduan dan bimbingan terkait penyelesaian CAPA oleh stakeholder melalui komunikasi WA, email, Hp maupun tatap muka di kantor Balai Besar POM di Banda Aceh			1. Menghubungi dan mendatangi sarana yang akan diberikan surat tindak lanjut secara intensif. 2. Memberikan bimbingan pembuatan CAPA secara intensif melalui komunikasi Whatsapp dan telepon maupun tatap mukalangsung ke kantor. 3. Intensif menghubungi instansi terkait baik kepada pimpinan dan tim teknisnya. 4. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.	Apr - Juni 2025	
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53	Realisasi pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi pada TW adalah 100% dari target 93% (capaian 107,53%). 1. Sarana produksi sediaan farmasi di Propinsi Aceh hanya sarana produksi OBA dan kosmetik, dan adanya efisiensi anggaran pada TW I tahun 2025, terjadi perubahan target sarana produksi OBA- Kosmetik, pada TW 1 sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pemeriksaan hanya sarana produksi kosmetik. 2. Pada tahun 2025 penilaian capaian kinerja berdasarkan penilaian mandiri terhadap proses tahapan proses kegiatan, sesuai dengan DO yang tercantum dalam manual IKU 2025	1. Adanya relaksasi anggaran pada TW II dan target pemeriksaan sarana produksi dikembalikan ke target awal tahun, akan dilakukan penyusunan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.	April-Juni 2025		Renlak penyesuaian pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	April - Juni 2025	
		8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00		0	1. Realisasi belum dapat ditetapkan karena masih menunggu ketetapan dari unit pengampu dan biro perencanaan terkait indikator ini. 2. Pemeriksaan sarana produksi selama TW II hanya 2 sarana dan telah ditindaklanjuti sesuai pedoman pengawasan produksi pangan olahan. 3. Target yang dilaksanakan selama TW I merupakan target efisiensi.	1. Adanya relaksasi anggaran, perlu dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana. 2. Monev setiap tahapan proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman.	April - Juni 2025		1. Renlak penyesuaian pemeriksaan sarana. 2. Monev hasil pemeriksaan.	April - Juni 2025	
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75	100	103.36	Realisasi 100 % dari target 96.75 %, sehingga Capaian TW 1 adalah 103.36 %. Pada TW 1 jumlah sarana masih sedikit yang diperiksa karena adanya efisiensi anggaran. Penilaian untuk indikator ini masih menunggu ketetapan dari unit pengampu dan biro perencanaan.	1. Penyesuaian target sarana dari target efisiensi kembali ke target awal tahun 2. Monev setiap tahapann proses pelaksanaan pemeriksaan sesuai pedoman	April - Juni 2025		1. Renlak penyesuaian pemeriksaan sarana. 2. Monev hasil pemeriksaan.	April - Juni 2025	
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	1. Realisasi TW I tercapai 100%, dimana sebanyak 11 sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa telah ditindaklanjuti sesuai pedoman dan dilaporkan tepat waktu. 2. Target pemeriksaan TW I merupakan target efisiensi anggaran.	1. Adanya relaksasi anggaran, perlu penyesuaian rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan. 2. Monev hasil pemeriksaan sarana agar sesuai dengan pedoman.	April - Juni 2025		1. Renlak penyesuaian pemeriksaan sarana. 2. Monev hasil pemeriksaan.	April - Juni 2025	
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.80	100	116.55	Realisasi TW I tercapai 100% dari target 85,80%, dimana iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilakukan sesuai pedoman pengawasan iklan dan dilaporkan tepat waktu	Monev pelaksanaan pengawasan iklan sesuai pedoman	April - Juni 2025		Monev pelaksanaan pengawasan iklan sesuai pedoman	April - Juni 2025	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25.00	25.00	100.00	1. Realisasi TW I sudah sesuai target yang ditetapkan dimana 1 sarana telah diperiksa yaitu sarana fortifikasi garam. 2. Sarana yang menjadi target telah tutup dan tidak produksi sehingga perlu koordinasi terlebih dahulu dengan pelaku usaha untuk pelaksanaan pemeriksaan. 3. Sarana produksi fortifikasi yang terdapat di ACeh bukanlah sarana yang aktif dan berproduksi setiap saat.	1. Pelaksanaan rencana pemeriksaan 1 sarana di TW II. 2. Jika perlu dapat dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha fortifikasi terlebih dahulu agar pemeriksaan lebih efektif menghindari sarana tutup atau tidak produksi saat petugas sudah tiba di lapangan.	April - Juni 2025		1. Pemeriksaan 1 sarana di TW II. 2. Jika perlu dapat dilakukan koordinasi dengan pelaku usaha fortifikasi terlebih dahulu agar pemeriksaan lebih efektif menghindari sarana tutup atau tidak produksi saat petugas sudah tiba di lapangan.	April - Juni 2025	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
									Rencana aksi yang sudah selesai	Belum		
										Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.00	72.2	101.69	Target SKL 2024 (87.00) , Capaian 87.75 (100.86%) (2024) Komponen penilaian terdiri dari 3 komponen yaitu : - Ruang Lingkup (50%) capaian (92.02%) - Kompetensi (30%) capaian (93.91%) - Peralatan (20%) capaian (77.32)	Pada Tahun 2025 terjadi perubahan penilaian terhadap SKL menjadi 4 komponen Yaitu : - Ruang Lingkup (50%) - Peralatan (20%) - Kompetensi (20%) - Verifikasi Metoda Analisa (10%) = {44.4%} Rekomendasi - Perlu adanya revisi Anggaran untuk pengadaan sampel ruang lingkup komoditi Obat untuk penambahan RL diluar pengadaan sampel rutin - Perbaikan alat di Lab Kimia dan Mikrobiologi - Pengadaan Baku pembading - Pengadaan suku cadang - Kalibrasi internal dan Eksternal - Pengadaan alat gelas - Pelatihan Lab Kimia dan Mikro	April s.d Juni 2025	1. Kalibrasi internal dari P3OMN 2. Perbaikan alat / HPLC di Lab Obat (pengadaan Pompa) 3. Perbaikan dan Kalibrasi GCMS oleh Vendor	- Pengadaan suku cadang - Pengadaan alat gelas - Kalibrasi Eksternal - Pengadaan sampel ruang lingkup komoditi obat - Perbaikan alat di lab kimia dan Pangan - Pelatihan di Lab Kimia dan Mikrobiologi	Jan - Des 2025	
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	95.96	110.89	Kegiatan KIE tatap muka dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu KIE di area Car Free Day, KIE dengan melibatkan unsur pentaheliks, dan KIE di warung kopi melalui inovasi Sanger Ureung Aceh yang berkolaborasi dengan SAKA POM. Dari beberapa kegiatan KIE tatap muka yang telah dilakukan diperoleh Indeks Efektivitas KIE tatap muka sebesar 91,92 (Sangat Efektif). Untuk kegiatan KIE melalui media telah dilaksanakan dengan membuat konten-konten secara mandiri di media sosial BBPOM Banda Aceh dan membuat inovasi Podcast Berbisik BPOM (Berbincang Asik Bersama BPOM). Berdasarkan hasil survei efektivitas KIE yang diisi oleh responden, diperoleh Indeks Efektivitas KIE melalui media sebesar 100 (Sangat Efektif).	Selain melaksanakan KIE Obat dan Makanan, juga melaksanakan KIE untuk pencegahan stunting dan KIE untuk program P4GN	April s.d Juni 2025	-	-	-	-
		15. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0.00	0	#DIV/0!	Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah belum dilaksanakan pada TW 1, sesuai surat edaran terbaru diharapkan dilaksanakan terpadu dengan Program Desa dan Pasar pada Bulan April 2025	Melakukan Survei sekolah dan madrasah sebagai data awal dalam lakukan audiensi dan koordinasi dengan pemerintah daerah/Walikota Banda Aceh dan perencanaan kegiatan Advokasi pada Bulan April 2025	April 2025				
		16. Jumlah desa pangan aman	0.00	0	#DIV/0!	Pelaksanaan Program Desa Pangan Aman di mulai dari tahapan Advokasi Kelembagaan Desa mengacu Surat Edaran terbaru tentang pelaksanaan Desa Pangan Aman dimana pelaksanaan dilakukan pada Bulan April 2025, sehingga pada bulan Maret baru dilaksanakan Audiensi kepada pemangku kepentingan sebagai langkah awal melakukan Advokasi Kelembagaan Desa Pangan Aman	Koordinasi dengan PIC Desa di PMPU Badan POM RI dan penjadwalan Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa pada minggu ke III April 2025	April 2025				
		17. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.00	0	#DIV/0!	1. Pelaksanaan Program Pasar Aman dimulai dari tahapan Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar, dimana sesuai Juknis dilaksanakan periode Januari-April 2025 . 2. Efisiensi anggaran menyebabkan penunjukan lokus Kab/kota intervensi pasar sama dengan kab/kota program Sekolah dan Desa Pangan Aman, yaitu Kota Banda Aceh, sementara 4 pasar yang berada di Kota Banda Aceh sudah pernah mendapatkan intervensi program yang sama sejak tahun 2021 3. Audiensi dengan BLUD Pasar meerekomendasikan yang menjadi lokus pasar adalah pasar Almahira namun kesepakatan dengan Linsek bersama Walikota adalah Pasar Seutui sehingga kedepannya perlu koordinasi lebih lanjut	Perencanaan pelaksanaan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor diupayakan tidak melewati timeline, dijadwalkan pada Minggu ke IV bulan April 2025	April 2025				
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18.00	11.67	64.83	1. Pada awal tahun terjadi perubahan target sarana pendampingan yaitu 13 sarana UMKM pangan, OBA dan Kosmetik dengan komposisi 8 sarana pangan, 3 sarana OBA dan 2 sarana Kos (8;3;2), karena kondisi di lapangan memang belum ditemukan sarana OBA dan Kos yang menjadi target pendampingan sehingga di usulkan menjadi komposisi dari 13 (11;1;1) 2. Pada manual IKU pada penetapan target dijadwalkan pada Jan-Feb 2025, bergeser di Maret 2025. 3. Kegiatan sosialisasi keamanan pangan yang direncanakan luring karena efisiensi menjadi daring dan sudah dilaksanakan di Maret 2025.	1. Pada TW 2 akan dilakukan bimtek pendampingan kepada UMKM pangan, OBA dan Kos yang semestinya dilakukan secara daring karena efisiensi maka kemungkinan akan ada bantuan dari OTA untuk dilaksanakan secara luring di aula kantor, sampai sekarang masih menunggu konfirmasi dari pusat 2. Kegiatan pendampingan lebih dimaksimalkan melalui komunikasi via wa dan telp aktif dua arah dengan peserta target UMKM yang akan didampingi.	April-Des 2025				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
									Rencana aksi yang sudah selesai	Belum	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	14	14	100.00	1. Pada awal TW I, terjadi perubahan target perkara yaitu satu perkara karena adanya efisiensi anggaran. Namun pada akhirnya target kembali pada rencana awal yaitu 4 Perkara. 2. Sedangkan perkara Carry over sesuai target DO tahun 2025 ada satu perkara yang posisinya ada pada Tahap I. 3. Pada bulan Maret didapatkan satu perkara yang lalu diproses hingga terbit SPDP. 4. Setelah dihitung sesuai DO, nilai realisasi yang didapatkan adalah 14 persen dari target kinerja awal 3,75, sehingga capaian menjadi 373 persen atau di atas target. 5. Setelah target dikoreksi menjadi 14 persen, maka capaian kinerja menjadi 100 persen.	1. Pada TW II akan selesaikan satu perkara yang didapatkan pada TW I hingga tahap II. 2. Perkara Carry Over akan ditindaklanjuti dengan cara berkoordinasi dengan Kejati dan meminta pendampingan dari Direktorat Penyidikan. 3. Investigasi dan Siber akan terus ditingkatkan untuk menjadi bahan dalam Operasi Penindakan, yang diharapkan akan diperoleh 2 perkara baru.	1. Perkara TW ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Mei 2024. 2. Perkara Carry Over akan berproses sampai akhir TW II. 3. Investigasi dan Siber akan dilaksanakan secara rutin dan pelaporan disampaikan sebelum tanggal 25 pada bulan berjalan	1. Operasi Siber dan Profilling TW I pada bulan Januari sd Maret 2025 2. Investigasi tertutup terhadap sarana distribusi kosmetik/OBA ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya. 3. Pengumpulan data kerawanan TW I pada bulan Januari sd Maret 2025 4. Operasi penindakan sarana distribusi kosmetik/OBA ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya pada bulan Maret 2025	1. operasi Pangea sd tanggal 23 Mei 2025 2. Intensifikasi penindakan sd tanggal 30 April 2025. 3. Operasi Siber dan Profilling TW II tahun 2025 4. Pengumpulan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan TW II tahun 2025 5. Investigasi sarana hasil pengaduan masyarakat dan dari medsos 6. Operasi penindakan sarana yang mendistribusikan sediaan farmasi ilegal atau mengandung bahan berbahaya 7. Koordinasi dengan Kejaksaan terkait perkara yang Carry Over	1. 23 Mei 2025 2. 30 April 2025 3. tanggal 25 bulan berjalan 4. tanggal 25 bulan berjalan 5. tanggal 10 bulan berikutnya 6. pertengahan bulan Mei 2025	Seluruhnya masih sesuai dengan rencana
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100.00	1. indikator ini berdasarkan 3 unsur yaitu laporan operasi siber, tindak lanjut rekomendasi dan analisa kejahatan obat dan makanan, dimana porsi masing-masing adalah 50, 25 dan 25 persen. 2. Untuk TW I, operasi siber dapat dipenuhi sesuai ketentuan dan tidak melampaui batas waktu. Sedangkan tindak lanjut dan analisa kejahatan belum dilakukan. 3. Sehingga realisasi indikator hanya dari porsi 50 persen operasi siber.	1. Pada Triwulan II akan dilakukan operasi siber secara rutin dan dilaporkan sesuai ketentuan dan tepat waktu sehingga capaian tidak menjadi dibawah 100 persen 2. Dilaksanakan kegiatan penggalangan pada TW II, yaitu pada bulan Mei atau Juni 2025	1. Pelaporan siber akan dilakukan paling lambat pada tanggal 25 pada bulan berjalan 2. Penggalangan akan dilaksanakan pada bulan Mei 2025 dengan tema pengawasan Obat palsu atau disalahgunakan, seperti Tramadol dan Kosmetik berbahaya	1. pelaporan Siber dan Profilling TW I tahun 2025 2. Pengumpulan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan TW I tahun 2025	1. pelaporan operasi Siber dan Profilling TW II tahun 2025 2. Pengumpulan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan TW II tahun 2025 3. Penggalangan bertema pengawasan Obat palsu atau disalahgunakan dan kosmetik berbahaya	1. tanggal 25 pada bulan berjalan 2. tanggal 25 pada bulan berjalan 3. Akhir bulan Mei atau pertengahan bulan Juni 2025	Semua masih sesuai dengan rencana yang telah disusun
8	Layanan Publik UPT yang prima	21. Indeks Pelayanan Publik UPT	Akhir Tahun									
9	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22. Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun									
		23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun									
		24. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun									
		25. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	Akhir Tahun			Tahun 2024 capaian manajemen risiko adalah 2,844 dengan beberapa rekomendasi dari Inspektorat Utama : 1. Melaksanakan pembahasan manajemen risiko dengan mempertimbangkan capaian target kinerja; 2. Melaksanakan pengujian aktivitas pengendalian atas risiko inheren dengan nilai risiko 16 ke atas; 3. Melakukan reviu terhadap uraian peristiwa risiko/risk event dan penyebab risiko pada daftar risiko 4. Melakukan reviu atas simpulan efektivitas pengendalian agar selaras dengan hasil penilaian kelemahan pengendalian; 5. Melibatkan seluruh ketua tim dalam pengelolaan manajemen risiko;	1. Penyusunan manajemen risiko semester I yang melibatkan seluruh ketua tim 2. melakukan pengujian aktivitas pengendalian atas risiko inheren dengan nilai risiko 16 ke atas 3. Melakukan reviu terhadap uraian peristiwa risiko/risk event dan penyebab risiko pada daftar risiko 4. Melakukan reviu atas simpulan efektivitas pengendalian agar selaras dengan hasil penilaian kelemahan pengendalian; 5. Melibatkan seluruh ketua tim dalam pengelolaan manajemen risiko;	Januari-Agustus 2025	1. Penyusunan manajemen risiko semester I yang melibatkan seluruh ketua tim 2. melakukan pengujian aktivitas pengendalian atas risiko inheren dengan nilai risiko 16 ke atas 3. Melakukan reviu terhadap uraian peristiwa risiko/risk event dan penyebab risiko pada daftar risiko	1. Penyusunan manajemen risiko semester I dan I yang melibatkan seluruh ketua tim 2. melakukan pengujian aktivitas pengendalian atas risiko inheren dengan nilai risiko 16 ke atas 3. Melakukan reviu terhadap uraian peristiwa risiko/risk event dan penyebab risiko pada daftar risiko 4. Melakukan reviu atas simpulan efektivitas pengendalian agar selaras dengan hasil penilaian kelemahan pengendalian; 5. Melibatkan seluruh ketua tim dalam pengelolaan manajemen risiko;	Januari-Agustus 2025	

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja Triwulan I Tahun 2025 Balai Besar POM di Banda Aceh memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses evaluasi dan penyesuaian strategi serta kebijakan guna mencapai kinerja yang lebih optimal pada triwulan berikutnya. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut menjadi dasar analisis terhadap capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan, sehingga memungkinkan dilakukan identifikasi secara dini terhadap deviasi atau ketidaksesuaian antara target dan realisasi. Dengan demikian, pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami akar permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun strategis, serta merumuskan langkah korektif yang tepat sasaran.

Melalui pemanfaatan data dan informasi dari laporan kinerja, dilakukan penyesuaian strategi, seperti penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengalokasian sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Informasi ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan obat dan makanan, memperbaiki tata kelola internal, dan memperkuat sistem monitoring serta evaluasi. Dengan pendekatan berbasis data ini, Balai Besar POM di Banda Aceh dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel Tingkat Efisiensi Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	% Capaian Anggaran	% Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi	Kategori
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	4.09	96.84	22.68	Tidak Efisien
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	0.00	100.00	0.00	Tidak Efisien
3.	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	21.39	101.69	4.75	Tidak Efisien
4.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	4.28	110.89	21.68	Tidak Efisien

5.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	0.00	64.83	0.00	Tidak Efisien
6.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	2.90	100.00	34.50	Tidak Efisien
7.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0.00	100.00	0.00	Tidak Efisien
8.	Layanan Publik UPT yang prima	0.66	-	0.00	Tidak Efisien
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	10.45	-	0.00	Tidak Efisien

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran kegiatan selama triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama yaitu, "Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 78.284.876,- atau 2.46% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan serta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah tidak efisien, karena pada triwulan I terjadi efisiensi anggaran.
2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedua yaitu, "Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi sebesar Rp. 5.069.000,- atau 0.16% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi fortifikasi, pemeriksaan sarana dalam rangka koordinasi.

Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak bagi peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedua adalah tidak efisien, meskipun target indikator sudah terpenuhi namun anggaran belum digunakan dikarenakan efisiensi pada triwulan I.

3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketiga yaitu, “Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 639.988.844,- atau 20.12% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemenuhan/peremajaan alat-alat laboratorium, peningkatan ruang lingkup pengujian serta koordinasi dan monev pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah tidak efisien, karena pada triwulan I terjadi efisiensi anggaran.
4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keempat yaitu, “Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT sebesar Rp. 66.073.601,- atau 2.08% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan intervensi terhadap komunitas sekolah, desa dan pasar. Pada sasaran kegiatan ini dilakukan KIE tatap muka yang dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu KIE di area Car Free Day, KIE dengan melibatkan unsur pentaheliks, dan KIE di warung kopi melalui inovasi Sanger Ureung Aceh yang berkolaborasi dengan SAKA POM. Kegiatan intervensi terhadap komunitas sekolah, desa dan pasar dilaksanakan mulai Bulan April sesuai dengan surat edaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keempat adalah tidak efisien, karena kegiatan pada 3 (tiga) indikator Pro PN sekolah, desa serta pasar baru dilakukan pada awal April dan tahap pelaksanaannya mengikuti surat edaran terbaru.
5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kelima yaitu, “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu belum ada karena terjadinya efisiensi anggaran pada triwulan I sehingga kegiatan dilaksanakan secara daring. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan advokasi dan pendampingan UMKM

dengan melakukan sosialisasi keamanan pangan pada Bulan Maret secara daring. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah tidak efisien, karena capaian sasaran (64.83%) belum memenuhi target pada triwulan I.

6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keenam yaitu, “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT sebesar Rp. 13.740.000,- atau 0.43% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan operasi siber dan profiling TW I pada bulan Januari sd Maret 2025, investigasi tertutup terhadap sarana distribusi kosmetik/OBA ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya, pengumpulan data kerawanan TW I pada bulan Januari sd Maret 2025 serta operasi penindakan sarana distribusi kosmetik/OBA ilegal dan atau mengandung bahan berbahaya pada bulan Maret 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah tidak efisien, karena capaian sasaran (100%) yang dihasilkan melebihi anggaran (2.90%) yang dikeluarkan.
7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu, “Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT belum ada. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilakukan selama triwulan I berupa pelaporan siber dan profiling TW I tahun 2025 serta pengumpulan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan TW I tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketujuh adalah tidak efisien, meskipun capaian indikator kinerja sudah terpenuhi namun indeks efisiensi lebih kecil dari standar tidak efisien
8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu, “Layanan Publik UPT yang prima sebesar Rp. 741.500,- atau 0,02% dari keseluruhan realisasi anggaran. Adanya efisiensi anggaran sehingga menurunkan jenis layanan informasi, seperti mengurangi jumlah informasi melalui media cetak dan media elektronik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kedelapan adalah tidak efisien, karena capaian sasaran belum ada pada triwulan I.

9. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu, “Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal sebesar Rp. 2.382.066.040,- atau 74.89% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk belanja pegawai dan biaya operasional kantor. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesembilan adalah tidak efisien, karena capaian sasaran belum ada pada triwulan I.

Tabel...Tingkat Efisiensi Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75	100	117.99	613.168.000	15.293.891	2.49	47.38	46.38	75%
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Akhir Tahun			43.550.000	0	0.00	0.00	-1.00	75%
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	93.46	109.95	325.667.000	23.581.947	7.24	15.18	14.18	75%
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Diexclude dari Penilaian TW I			22.755.000	1.629.369	7.16	0.00	-1.00	75%
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	88.18	103.74	22.755.000	1.629.369	7.16	14.48	13.48	75%
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75.00	75.96	101.28	101.637.500	200.000	0.20	506.04	505.4	75%

7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	100	107.53	13.333.750	200.000	1.50	71.68	70.68	75%
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Diexclude dari Penilaian TW I			13.333.750	200.000	1.50	0.00	-1.00	75%
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Diexclude dari Penilaian TW I			341.019.500	12.372.605	3.63	0.00	-1.00	75%
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	117.65	341.019.500	12.372.605	3.63	32.41	31.41	75%
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8	100	116.55	318.251.000	10.805.090	3.40	34.28	33.28	75%
12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	25.00	25.00	100	5.069.000	0	0.00	0.00	-1.00	75%
13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.00	72.20	101.69	2.992.448.000	639.988.844	21.39	4.75	3.75	75%
14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54	95.96	110.89	272.181.000	13.920.851	5.11	21.70	20.70	75%
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	-	-	-	436.427.000	1.936.010	0.44	0.00	-1.00	75%

16	Jumlah desa pangan aman	-	-	-	709.656.000	42.358.840	5.97	0.00	-1.00	75%
17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	-	-	-	140.558.000	7.857.900	5.59	0.00	-1.00	75%
18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	18.00	11.67	64.83	48.359.000	0	0.00	0.00	-1.00	75%
19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	14.00	14.00	100	473.984.000	13.740.000	2.90	34.48	33.48	75%
20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100	73.305.000	0	0.00	0.00	-1.00	75%
21	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	112.285.000	741.500	0.66	0.00	-1.00	75%
22	Nilai Pembangunan ZI Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	480.974.000	7.574.800	1.57	0.00	-1.00	75%
23	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banda Aceh bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	110.271.000	0	0.00	0.00	-1.00	75%
24.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	12.287.976.000	2.374.491.240	19.32	0.00	-1.00	75%
25	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar POM di Banda Aceh	-	-	-	22.640.000	0	0.00	0.00	-1.00	75%

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Koordinasi	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	Input : Dana Output : Kegiatan	73.305.000 14	0 3	0,00 21,43	0,00	1	-1	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pelayanan Publik Lainnya	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	Input : Dana Output : Dokumen	112.285.000 188	741.500 38	0,66 20,21	3.061	1	29,61	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	Input : Dana Output : Orang	169.905.000 723	7.758.750 273	4,57 37,76	826,87	1	7,27	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pemantauan Produk	3165.BKB.001	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana Output : Laporan	317.000.000 1	7.574.800 0,00	2,39 0,00	0,00	1	-1,000	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Komunikasi Publik	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Input : Dana Output : Jenis Layanan	102.276.000 24	6.162.101 14	6,02 58,33	968,19	1	8,68	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Input : Dana Output : Paket	50.000.000 1	0 0,00	0,00 0,00	0,00	1	-1,000	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	3165.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Input : Dana Output : Unit	100.000.000 7	0 0	0,00 0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Prasarana Bidang Kesehatan	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	Input : Dana Output : Unit	150.000.000 0	0 0	0,00 0,00	0	1	-1,00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Standarisasi Lembaga	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Input : Dana Output : Lembaga	1.443.226.000 1	61.079.444 0,00	4,23 0,00	0,00	1	-1,000	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Perkara Hukum Badan Usaha	3165.QCD.U12	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banda Aceh	Input : Dana Output : Perkara	473.984.000 4	13.740.000 1	2,90 25,00	862,42	1	7,62	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.06)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Input : Dana Output : Lembaga	436.427.000 10	1.936.010 0	0,44 0,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
			3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	Input : Dana Output : Lembaga	709.656.000 4	42.358.840 0	5,97 0,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
			3165.QDB.003	Pasar pangan aman berbasis komunitas	Input : Dana Output : Lembaga	140.558.000 1	7.857.900 0	5,59 0,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	Input : Dana Output : Orang	43.550.000 45	0 45	0,00 100,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	Input : Dana Output : UMKM	48.359.000 13	0 1,08	0,00 8,31	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	Kode RO	RINCIAN RO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TARGET	INDEKS EFISIENSI (IE)	STANDAR EFISIENSI (SE)	TINGKAT EFISIENSI (TE)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Input : Dana Output : Produk	371.177.000 335	26.840.685 39	7,23 11,64	160,99	1	0,61	Efisien
			3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	Input : Dana Output : Produk	613.168.000 890	15.293.891 86	2,49 9,66	387,41	1	2,87	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Input : Dana Output : Lembaga	53.335.000 54	800.000 4	1,50 7,41	493,84	1	3,94	Tidak Efisien
			3165.QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	Input : Dana Output : Lembaga	5.069.000 3	0 1	0,00 33,33	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
			3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Input : Dana Output : Lembaga	1.075.260.000 634	35.350.300 56	3,29 8,83	268,67	1	1,69	Tidak Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Sarana Bidang Kesehatan	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	Input : Dana Output : Paket	1.549.222.000 1	578.909.400 0	37,37 0,00	107,07	1	0,071	Efisien
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (063.01.DR)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (3165)	Layanan BMN	6384.EBA.956.001	Layanan BMN	Input : Dana Output : Layanan	8.000.000 1	0 0	0,00 0,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN (063.01.WA)	Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Aceh (6384)	Layanan Perkantoran	6384.EBA.994.001	Layanan Perkantoran	Input : Dana Output : Bulan	12.276.861.000 1	2.374.491.240 0	19,34 0,00	0,00	1	-1,00	Tidak Efisien

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Triwulan I adalah 98.30% dengan kategori Baik. Dari 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, terdapat **5 (lima)** indikator kinerja dengan kategori **Sangat Baik**, **3 (tiga)** indikator kinerja dengan kategori **Baik**, **4 (empat)** indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, 1 (satu) indikator kinerja yang berkategori **Cukup**, **3 (tiga)** indikator kinerja yang **diexclude** dari penilaian dan 9 (**sembilan**) indikator kinerja yang **belum ada penilaian**.

- a. Indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik, yaitu:
 1. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **109.95%**.
 2. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **103.74%**.
 3. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan capaian **101.28%**.
 4. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **107.53%**.
 5. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan capaian **101.69%**.
- b. Indikator kinerja dengan kategori Baik, adalah:
 1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 2. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.
 3. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
- c. Indikator kinerja dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, yaitu:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **117.99%**.
2. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan capaian **116.55%**.
3. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan capaian **110.89%**.
- d. Indikator kinerja dengan kategori Cukup yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kosmetik yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan capaian **64.83%**.

Balai Besar POM di Banda Aceh pada Triwulan I tahun 2025 telah merealisasikan **Rp. 3.180.894.861,-** atau mencapai **15,65%** dari anggaran DIPA dengan pagu sebesar **Rp. 20.322.623.000,-**.

4.2 Saran

1. Melakukan perencanaan anggaran dengan tepat agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Menyusun langkah-langkah strategis peningkatan capaian Indikator Kinerja yang belum mencapai target dengan menerapkan rencana aksi yang berkesinambungan dan selaras dengan perencanaan kinerja organisasi mencakup analisa terukur penyebab kegagalan atau dukungan keberhasilan capaian indikator kinerja dan rekomendasi peningkatan di interim berikutnya.
3. Melakukan upaya-upaya peningkatan kecepatan dan keakuratan data kinerja melalui mekanisme pengumpulan data kinerja dan evaluasi internal yang terjadwal dan terdokumentasi secara baik pada tiap level manajemen organisasi sesuai dengan perencanaan kinerja interim dan tahunan.
4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pencapaian target pada siklus pencapaian kinerja interim dengan memetakan prioritas rencana aksi pencapaian kinerja hasil rekomendasi pada evaluasi kinerja interim.



LAMPIRAN

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUDI NOVIANDI

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Banda Aceh

YUDI NOVIANDI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan

TARUNA IKRAR

Lampiran

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANDA ACEH**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	84.75 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83.3 Person
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.75 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.8 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73 Persen
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86.54 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	90.3 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	92.5 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Persen
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.25 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.78 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 20,121,623,000 (Dua Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3185 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	8,037,762,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,083,861,000

Banda Aceh, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Banda Aceh



YUDI NOVIANDI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan



TARUNA IKRAR



@bpom.aceh



@bpom.aceh



bbpom.aceh



aceh.pom.go.id



08116853301

#Kolabor **AKS**
Siap WBBM



JL. MOHD DAUD BEUREUH NO.110, BANDAR
BARU, KEC. KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH